

# **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI LOKAL**

**(Studi Kasus Pada Desa Kamulan Kecamatan Durenan  
Kabupaten Trenggalek)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**TEDJA BAGUS SULAKSANA  
105030101111082**



Dosen Pembimbing:

1. Drs. Suwondo, MS
2. Trisnawati, S.Sos, M.AP

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2014**

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al-Mujadila: 11)

Sesiapa yang berikhtiar tanpa melibatkan Allah, maka Allah tiada terlibat kecuali apa-apa yang menjadi sunnatullah-Nya. Maka siapa yang melibatkan Allah maka sungguh ikhtiarnya menjadi ibadah lepas apakah berhasil ataukah tidak. Kemudahan hanya milik Allah dan segala kehendak adalah milik Allah. Tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah mengijinkan.

( Yusuf Mansur )



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia  
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227  
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Lokal (Studi Pada Desa  
Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)

Disusun oleh : Tedja Bagus Sulaksana

NIM : 105030101111082

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 1 Juli 2014

Komisi Pembimbing,

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

**Drs. Suwondo, MS**  
NIP : 19530201 198010 1 001

**Trisnawati, S.Sos, M.AP**  
NIP : 19800307 200801 2 012



## TANDA PENGESAHAN

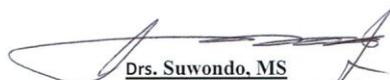
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 Juli 2014  
Jam : 10.00 WIB  
Skripsi atas nama : Tedja Bagus Sulaksana  
Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Lokal (Studi Kasus Pada Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)

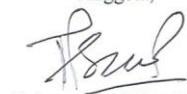
Dan Dinyatakan LULUS

## MAJELIS PENGUJI

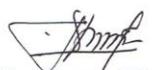
Ketua,

  
**Drs. Suwondo, MS**  
NIP. 19530201 198010 1 001

Anggota,

  
**Trisnawati, S.Sos, M.AP**  
NIP. 19800307 200801 2 012

Anggota,

  
**Drs. Siswidiyanto, MS**  
NIP. 19600717 198601 1 002

Anggota,

  
**Dr. Moch. Saleh Soeaidy, MA**  
NIP. 19540212 198103 1 006

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 3 Juli 2014

Mahasiswa



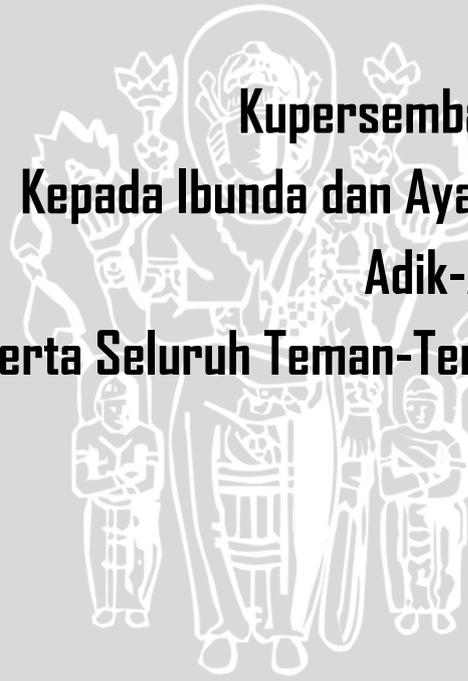
11D

Nama : Tedja Bagus Sulaksana

NIM : 105030102111001

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**Kupersembahkan karyaku  
Kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta  
Adik-Adikku tercinta  
Serta Seluruh Teman-Temanku Tercinta**



## RINGKASAN

Tedja Bagus Sulaksana. 2014. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Lokal (Studi Pada Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek). Ketua pembimbing: Drs. Suwondo, MS. Anggota : Trisnawati, S.Sos, M.AP. 134 Hal +

---

Industri kecil menjadi salah satu bidang yang saat ini menjadi faktor penting dalam perekonomian. Pemerintah daerah berusaha memajukan industri yang ada di daerahnya dengan melihat pada potensi lokal masing-masing wilayah. Seperti yang ada di desa Kamulan, sebagian besar masyarakatnya merupakan para pelaku industri kecil. Industri yang ada di Kamulan antara lain yaitu industri tanah liat (genteng), industri dupa, industri kain pantai, serta industri meubel. Daerah Kamulan juga terkenal sebagai kawasan sentra industri genteng. Sehingga peran dari pemerintah dibutuhkan untuk bisa memberdayakan industri lokal yang ada di Kamulan. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan industri lokal di desa Kamulan maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dari Spradley.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat beberapa peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan industri dan dijadikan sebagai fokus dalam penelitian ini. Peran yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan industri itu meliputi beberapa aspek, antara lain pendanaan; pendidikan dan pelatihan; teknologi; pemasaran; dan perijinan. Dalam penelitian ini terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan industri di desa Kamulan. Faktor pendukung perkembangan industri kecil itu berupa bahan baku yang berkualitas dan kualitas produksi yang ditingkatkan. Sedangkan faktor penghambat dari proses perkembangan industri ini adalah sarana dan prasarana untuk proses kegiatan produksi yang belum maksimal, seperti peralatan yang masih tradisional dalam proses kegiatan produksi, dan dibutuhkan teknologi yang lebih modern untuk menunjang perkembangan industri di desa Kamulan. Namun peran yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan industri di desa Kamulan belum berlangsung maksimal, dan masih sedikit.

Rekomendasi yang peneliti berikan dalam skripsi ini, sebaiknya ada kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa agar program-program dalam proses pemberdayaan bisa terlaksana secara optimal. Diperlukan pendampingan dan penyuluhan terhadap para pelaku industri lokal di Kamulan, sehingga apa yang menjadi masalah bagi industri bisa segera ditanggapi oleh pemerintah dan bisa ditemukan jalan penyelesaiannya.

Kata kunci :

Peran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, dan Industri Kecil.

## SUMMARY

Tedja Bagus Sulaksana. 2014. *Role of Local Government in the Local Empowerment Industry (Studies in Rural District of Durenan Kamulan Trenggalek)*. Guide chief : Drs. Suwondo, MS. Member : Trisnawati, S.Sos, M.AP. 134 page +

---

*Small industry became one of the fields that are currently becoming an important factor in the economy. Local governments are trying to promote industries in the region with respect to the local potential of each region. Like the one is in the Kamulan village, the most people are small industry players. There are some industries in Kamulan such as, industrial clay (tile), incense industry, industrial fabrics beach, and furniture industries. Kamulan is also known as a center area of tile industry. So the role of the government is needed to empower the local industry in Kamulan. To find out how the local government's role in the empowerment of the local industry in the village Kamulan. In this study, researchers used a type of qualitative method. Data analysis in this study uses data analysis by Spradley.*

*Based on the result of the study, it was found that there are some roles that have been done by the local government in empowering the industry and serve as a focus in this study. The government's role in empowering the industry includes several aspect, such as funding; education and training; technology; marketing; and licensing. In this study there supporting and inhibiting factors in the process of empowerment of rural industry in Kamulan. Factors supporting the development of small industries in the form of raw material quality and improved production quality. While the limiting factor of the development of this industry is the infrastructure for the production activities are not maximized, such as equipment that is still in the process of production of traditional and more modern technology needed to support industrial development in the Kamulan village. However, the role of government in the empowerment of rural industry has not lasted Kamulan maximum, and still little.*

*The recommendations are given in this thesis research, there should be cooperation between the local government and village governments that the programs in the processes can be implemented optimally. Its need assistance and counseling to the local industry in Kamulan, so what is may become the problem could be addressed by the government and can easy to find the solution of that problem.*

**Keywords :**

*Role of Local Government, Empowerment, and Small Industries.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, berkah kesehatan serta kemampuan sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Lokal (Studi Kasus di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)”**. Tidak lupa Sholawat serta salam penulis panjatkan bagi junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai tugas akhir dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Drs. Suwondo, MS, selaku dosen pembimbing I yang selalu setia dalam meluangkan waktunya, dan terimakasih telah membimbing serta

memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai tulisan ini dapat terselesaikan.

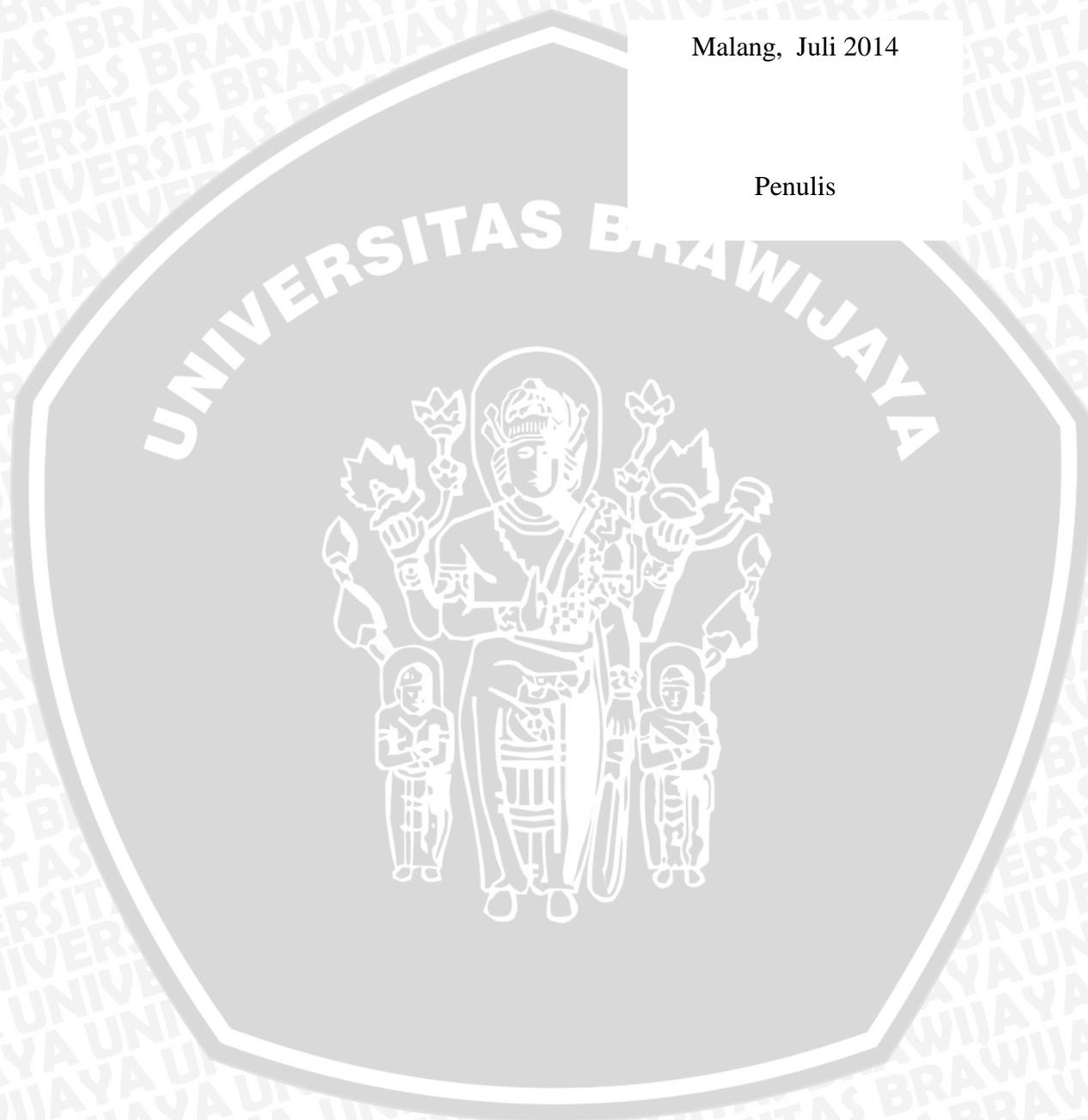
5. Ibu Trisnawati, S.Sos, M.AP, selaku dosen pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan motivasi, bimbingan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan.
6. Seluruh dosen fakultas ilmu administrasi, khususnya dosen jurusan ilmu administrasi publik yang selama ini telah memberikan bimbingan serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama dalam proses perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
7. Karyawan dan Karyawati Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah membantu dalam segala urusan akademik, keuangan dan kemahasiswaan untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Tambang dan Energi Kabupaten Trenggalek beserta staf yang telah membantu selama penelitian.
9. Kepala Desa Kamulan beserta jajaran dan warga masyarakatnya yang membantu dalam kelangsungan proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis masih mengharapkan masukan baik saran maupun kritik yang sifatnya membangun. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Akhir kata semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua.

Malang, Juli 2014

Penulis



DAFTAR ISI

	Hal.
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>SUMMARY</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kontribusi Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pemerintah Daerah	
1. Desentralisasi .....	11
2. Otonomi Daerah .....	16
3. Peran Pemerintah Daerah .....	19
B. Pemberdayaan	
1. Konsep Pemberdayaan .....	21
2. Tujuan dan Upaya Pemberdayaan .....	25
3. Model-Model Pemberdayaan .....	28
4. Indikator dan Strategi Pemberdayaan .....	34
C. Konsep Industri	
1. Pengertian Industri .....	37
2. Pengembangan industri .....	41
a. Pentingnya Pengembangan Industri .....	41
b. Bentuk Pengembangan Industri .....	43
c. Strategi Pengembangan Industri Kecil .....	43
3. Pembinaan Industri Kecil .....	44
a. Pengertian Pembinaan .....	44
b. Tujuan Pembinaan Industri Kecil .....	45
c. Pola Pembinaan Industri Kecil .....	46
4. Permasalahan yang Dihadapi Industri Kecil .....	46

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	48
B. Fokus Penelitian .....	49
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	50
D. Sumber dan Jenis Data .....	51
E. Teknik Pengumpulan Data .....	52
F. Instrumen Penelitian .....	53
G. Analisis Data .....	54

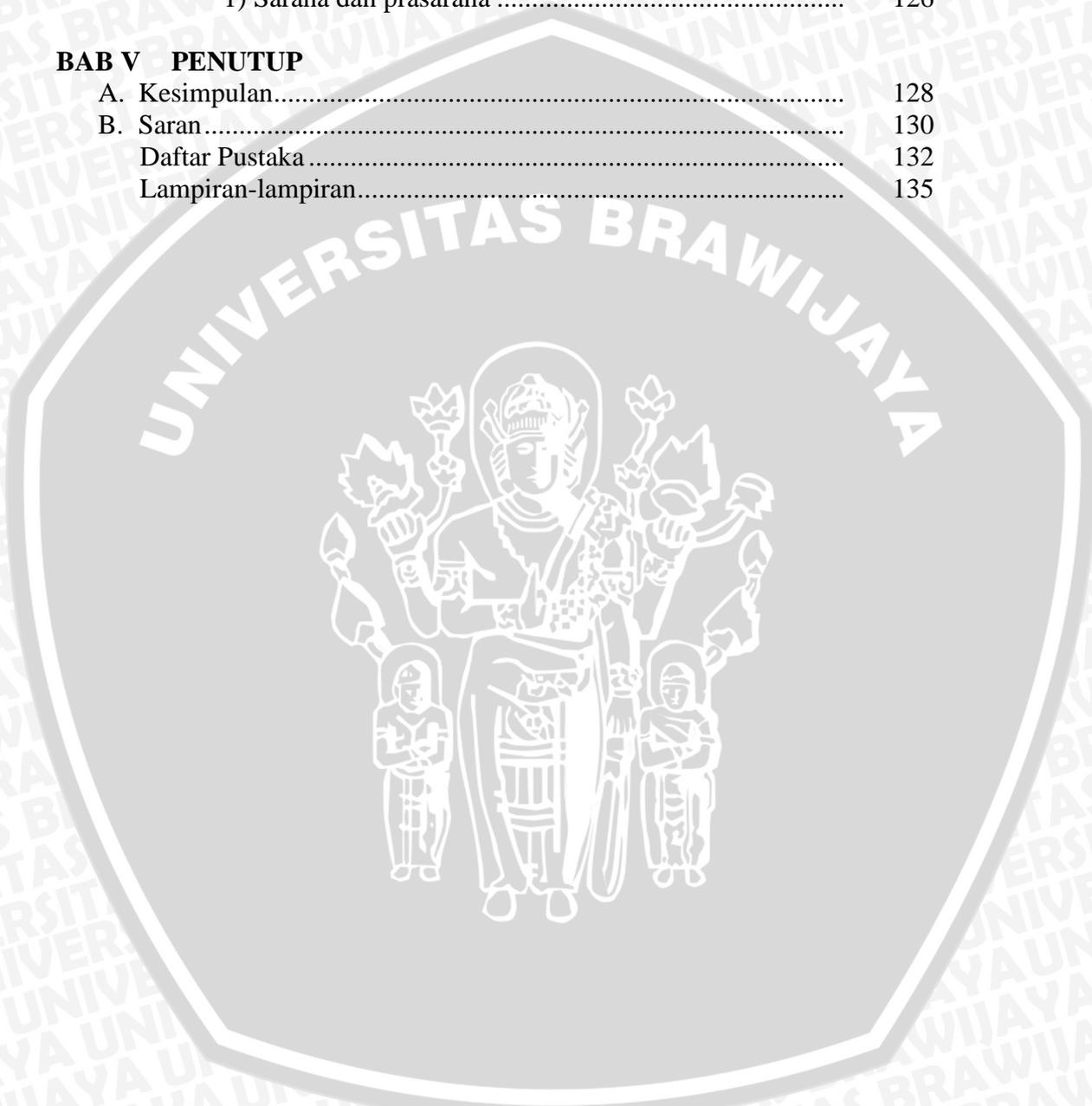
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum	
1. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Trenggalek.....	57
2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Tambang, dan Energi Kabupaten Trenggalek	68
3. Gambaran Umum Desa Kamulan.....	72
B. Penyajian	
1. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Industri .....	73
a. Pendanaan.....	73
b. Pendidikan dan Pelatihan .....	79
c. Teknologi.....	83
d. Pemasaran.....	86
e. Perijinan.....	89
2. Hasil Pemberdayaan .....	92
a. Perkembangan Industri Kecil .....	92
b. Perijinan.....	94
c. Pemasaran.....	96
d. Kemampuan SDM.....	98
3. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	99
a. Faktor Pendukung.....	99
1) Bahan baku yang berkualitas dan kualitas produksi yang ditingkatkan.....	99
b. Faktor Penghambat .....	102
1) Sarana dan prasarana .....	102
C. Pembahasan	
1. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Industri .....	104
a. Pendanaan.....	104
b. Pendidikan dan Pelatihan .....	107
c. Teknologi.....	109
d. Pemasaran.....	111
e. Perijinan.....	112
2. Hasil Pemberdayaan .....	114
a. Perkembangan Industri Kecil .....	114
b. Perijinan.....	115
c. Pemasaran.....	117
d. Kemampuan SDM.....	118
3. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	124

a. Faktor Pendukung.....	124
1) Bahan baku yang berkualitas dan kualitas produksi yang ditingkatkan.....	124
b. Faktor Penghambat.....	126
1) Sarana dan prasarana .....	126

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	130
Daftar Pustaka .....	132
Lampiran-lampiran.....	135



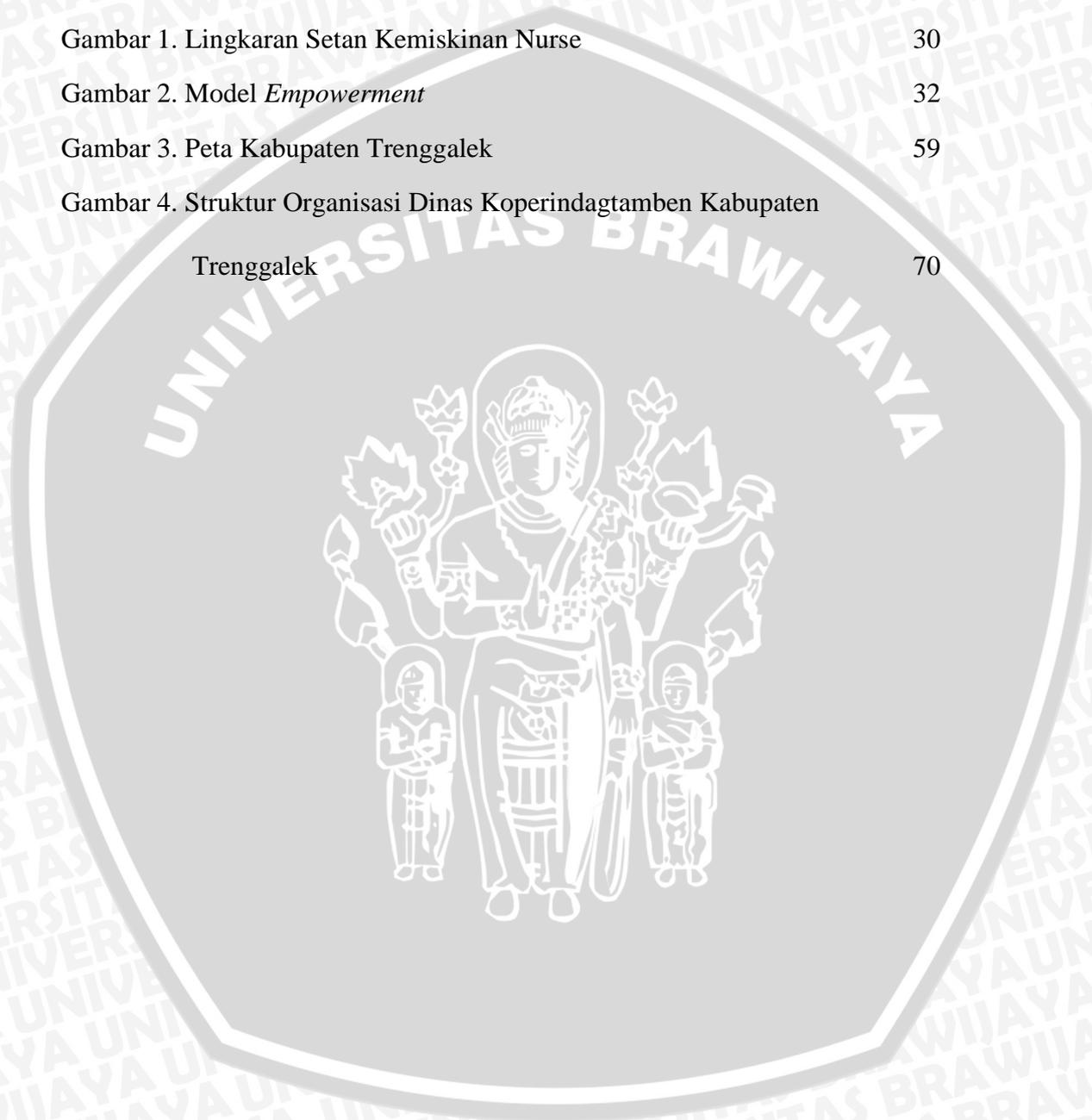
**DAFTAR TABEL**

	Hal.
Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek 2012	58
Tabel 2. Tinggi Wilayah Kecamatan dari permukaan Laut, Hari Hujan dan Rata-rata Curah Hujan Kabupaten Trenggalek 2012	63
Tabel 3. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Trenggalek 2012	65
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	67
Tabel 5. Jumlah Kepala keluarga dan Kepadatan Penduduk	67
Tabel 6. Jumlah Personil PNS di kalangan Dinas Koperindagtamben	71
Tabel 7. Tabel Industri yang Memiliki Surat Ijin	94



## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Lingkaran Setan Kemiskinan Nurse	30
Gambar 2. Model <i>Empowerment</i>	32
Gambar 3. Peta Kabupaten Trenggalek	59
Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Koperindagtamben Kabupaten Trenggalek	70



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tersebar di seluruh wilayah nusantara. Potensi kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan kegiatan perekonomian negara dan dalam memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945, bahwa seluruh kekayaan alam yang melimpah dikelola dan diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya dengan dasar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang adil dan makmur, salah satunya adalah dengan melaksanakan pembangunan.

Tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, serta merata secara materiil dan spiritual dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mempercepat pembangunan, membangun kemandirian, pemerataan pembangunan, pemerintah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur, mengelola dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah melalui otonomi daerah dengan menerbitkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian di revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kewenangan Keuangan Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004.

Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan saat ini adalah dengan meningkatkan perekonomian masyarakat secara merata agar

tercipta masyarakat yang sejahtera. Upaya peningkatan perekonomian tersebut dimulai dengan melakukan pemberdayaan pada usaha kecil yang lebih condong kepada usaha rakyat menengah ke bawah. Usaha kecil lebih merakyat dengan masyarakat karena sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan kegiatan perekonomiannya pada sektor informal ataupun segala jenis usaha kecil. Usaha kecil itu sendiri terdiri dari berbagai macam usaha, diantaranya seperti pedagang kaki lima (PKL), pedagang asongan, usaha kerajinan, industri kecil, industri rumah tangga, dan usaha kecil lainnya.

Upaya pemberdayaan melalui sektor industri, menjadi salah satu peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memajukan kegiatan perekonomian yang ada di daerahnya. Pemberdayaan sendiri mempunyai pengertian sebagai “upaya membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkannya”, Sulistiyan (2004:79). Sementara itu definisi tentang pemberdayaan juga terdapat dalam UU No 20 tahun 2008 yang berarti upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mandiri.

Definisi pemberdayaan juga diungkapkan oleh Kartasasmita (1996), yaitu:

“Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat yang akan berakibat meningkatkan produktivitas rakyat. Sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat pula ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai

tambah ekonomis. Pada akhirnya, rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum memanfaatkan secara penuh potensinya, akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Dengan demikian pemberdayaan tidak saja menumbuhkembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya.”

Sedangkan pengertian industri berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 1984, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi untuk penggunaannya termasuk kegiatan merancang bangun dan perekayasaan industri. Konsep pemberdayaan industri sendiri merupakan suatu cara atau usaha untuk meningkatkan kemampuan industri kecil dalam persaingan usaha dengan industri menengah dan besar.

Berkaitan dengan industri, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur serta memberikan perlindungan terhadap perkembangan industri di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah menggariskan lima (5) bidang yang diutamakan dalam pengembangan industri. Bidang-bidang tersebut yaitu:

1. Industri yang menunjang sektor pertanian dengan produksi sarana-sarana pertanian/mengolah hasil pertanian sehingga dengan demikian pembangunan sektor pertanian menarik dan merangsang sektor industri;
2. Industri yang menghasilkan devisa atau menghemat devisa dengan jalan menghasilkan barang-barang pengganti impor, untuk barang-barang ini jelas ada pasarnya di dalam negeri;
3. Industri yang mengolah lebih banyak bahan-bahan dalam negeri dari pada bahan-bahan luar negeri;
4. Industri yang relatif menggunakan lebih banyak tenaga kerja dari pada modal untuk memperluas lapangan kerja;
5. Industri yang dapat membangkitkan kegiatan pembangunan daerah;

Melalui peraturan tersebut, Departemen Perindustrian juga memberikan batasan bahwa penerapan strategi dasar yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengembangkan industri dititikberatkan pada:

1. Industri yang mendayagunakan keunggulan komperatif dari aspek pengelolaan sumber daya alam yang kita miliki (*Resources Based Industries*).
2. Industri yang menggunakan tenaga kerja banyak (*Labour Intensive Industries*).
3. Industri yang bercirikan padat teknologi (*Technology Based Industries*) (Marpaung, 1994:6).

Tujuan dari pemberdayaan industri kecil juga tertuang dalam Undang-undang No 9 tahun 1995 antara lain:

1. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah;
2. Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan usaha, peningkatan ekspor; serta
3. Peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur ekonomi nasional.

Pengembangan sektor industri perlu dilakukan karena mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam pembangunan nasional, seperti yang ditunjukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Keberadaan industri kecil dan UKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Industri yang berkembang di masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dapat mengurangi tingkat urbanisasi dan migrasi ke kota. Sehingga hal ini akan mengurangi pula berpindahnya tenaga-

tenaga potensial masyarakat desa ke kota, dan juga akan mengurangi tingkat kesenjangan masyarakat kota dan desa dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan.

Selain itu pengembangan industri juga berguna untuk menunjang pembangunan daerah yang maksimal, karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreativitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Ini merupakan ciri khas dari sifat dan keberadaan industri kecil yang mampu bersinergi dengan kondisi sosial kultural masyarakat setempat. Pemberdayaan industri kecil pada dasarnya ditekankan pada upaya untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan usaha, melestarikan seni budaya, modernisasi masyarakat desa, memperkuat struktur industri dan meningkatkan ekspor nasional. Adanya pemberdayaan terhadap industri ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan nantinya dapat mengembangkan industri kecil ke arah yang lebih maju dan mandiri.

Selain keberadaan industri kecil yang menguntungkan, banyak pula kendala yang dihadapi, bahkan dapat berdampak pada kondisi terburuk yakni usaha industri terpaksa gulung tikar. Kendala-kendala tersebut antara lain dilihat dari aspek permodalan, informasi, teknologi dan pemasaran. Kendala-kendala yang dihadapi oleh industri ini harus menjadi perhatian dari pemerintah, sehingga keberadaannya perlu untuk diberdayakan. Peran serta pemerintah dalam memberdayakan industri kecil dan UKM sangat diperlukan agar usaha industri dapat berkembang lebih pesat. Tugas dan peran tersebut diantaranya adalah:

- 1) menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan perundang-undangan dan kebijakan;
- 2) melakukan pembinaan dan pengembangan industri kecil bersama-sama dengan masyarakat,
- 3) menyediakan pembiayaan,
- 4) serta bekerjasama dengan lembaga keuangan serta memfasilitasi kemitraan usaha kecil.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dalam visi dan misinya berusaha memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemberdayaan yang dilakukan, berdasarkan pada potensi-potensi setiap daerah yang dimiliki. Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025, kabupaten yang memiliki 14 kecamatan dan 157 desa ini memiliki berbagai macam potensi lokal. Potensi-potensi yang ada di kabupaten Trenggalek antara lain, perikanan, peternakan, pertanian pangan dan perkebunan, pertambangan dan pariwisata yang merupakan potensi sumber daya alam, serta industri pengolahan.

Industri pengolahan di Kabupaten Trenggalek didominasi oleh industri non formal dengan persentase 97,60 persen. Industri formal mempunyai nilai investasi sebesar 79,24 milyar rupiah dan menyerap tenaga kerja 4.662 orang, sedangkan industri non formal mempunyai nilai investasi 45,48 milyar rupiah dan menyerap tenaga kerja 63.936 orang dari total tenaga kerja industri yang ada dengan nilai produksi 1.043,04 milyar rupiah untuk industri formal dan 499,26 milyar rupiah untuk industri non formal, (BPS, hal.17). Sementara itu industri di Kabupaten

Trenggalek didominasi oleh industri kecil yang meliputi genteng, anyaman bambu, batik, dan makanan khas Trenggalek (tempe kripiq, alen-alen, manco, dan geti), sale, kripiq pisang, tapioka, penyulingan minyak atsiri dan lain-lain. Berdasarkan data BPS tahun 2012, industri kecil yang ada di Trenggalek sebanyak 310 dan industri kerajinan rakyat sebesar 22.138 buah.

Salah satu industri yang sudah terkenal di kabupaten Trenggalek adalah industri tanah liat, berupa genteng dan batu bata yang sudah terkenal di daerah-daerah sekitar Trenggalek. Salah satu desa yang memproduksi industri genteng adalah desa Kamulan dan dikenal sebagai daerah sentra industri genteng, selain itu terdapat juga industri pembuatan dupa. Keberadaan industri ini menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat di desa Kamulan merupakan para pengrajin Genteng. Produk industri dari desa Kamulan sudah terkenal di daerah-daerah lain seperti Malang, Bali, Lamongan, Blitar, Kalimantan. Keberadaan industri di desa Kamulan sudah berlangsung sejak lama dan sebagian sudah menjadi warisan turun temurun, juga menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kamulan.

Namun banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku industri dalam melaksanakan kegiatan produksinya, seperti persoalan sarana dan prasarana, permodalan dan bahan baku, dan juga pemasaran. Karena itu, peran pemerintah daerah dibutuhkan untuk dapat mengembangkan dan memberdayakan industri-industri yang ada, terutama industri lokal. Peran dari pemerintah kabupaten Trenggalek yang merupakan fasilitator diharapkan mampu menyelesaikan setiap persoalan dan hambatan yang dihadapi oleh para pelaku

industri kecil, serta mampu memberikan apa yang menjadi kebutuhan para pelaku industri kecil, dari segi pendanaan, teknologi, pasar agar keberadaan industri kecil bisa lebih berkembang dan dapat diberdayakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi dan ditujukan sebagai tugas akhir skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI LOKAL (Studi Kasus Pada Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Industri Lokal di Desa Kamulan ?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam proses pemberdayaan industri lokal di Desa Kamulan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan industri lokal di desa Kamulan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan industri lokal di desa Kamulan.

#### D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain :

##### a. Kontribusi Akademis

1. Sebagai analisa terhadap teori pemberdayaan;
2. Bahan kajian dan membangun pemikiran dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik;
3. Bekal wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan kemampuan berfikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada.

##### b. Kontribusi Praktis

1. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam hal pemberdayaan industri.
2. Memberikan strategi alternatif terhadap pemberdayaan/pengembangan industri lokal yang ada di Kabupaten Trenggalek umumnya dan di Desa Kamulan pada khususnya.

#### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang garis besar teoritis yang menjadi dasar bagi penulis dalam memberikan alternatif solusi atas segala permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisa data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini disajikan deskripsi wilayah penelitian yang digunakan dengan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya penyajian data dilakukan secara sistematis disertai dengan analisa atas data yang telah disajikan tersebut.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang mungkin dapat penulis berikan atas adanya permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemerintah Daerah

##### 1. Desentralisasi

Hakekat dari penyelenggaraan pemerintahan adalah fungsi pelayanan kepada masyarakat, yaitu mengenai pengalokasian sumber daya yang ada untuk diberikan kepada masyarakat. Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka pemerintah perlu didekatkan kepada masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu membagikan beberapa kewenangan atau kekuasaannya kepada pemerintah daerah (*sharing of power*) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, *sharing of power* terjadi secara vertikal antara pusat dan daerah yang memungkinkan daerah membuat kebijakan-kebijakan strategi yang bebas dari intervensi pemerintah pusat berkaitan dengan fungsi pelayanan. Sementara itu, di daerah *sharing of power* juga terjadi secara horizontal antara lembaga di daerah dengan masyarakat yang membuka peluang lahirnya kebijakan yang mewakili aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan tersebut menjadi rendah derajat resistensinya, Fitriyah (2002:103). Hasil dari adanya *sharing of power*, diharapkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat lebih memuaskan.

Istilah Pemerintah Daerah sering digunakan berdampingan dengan kata *local government*, seperti diungkapkan Kaho (dalam Fitriyah, 2002:112), yang menggambarkan *local government* sebagai:

“Bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan undang-undang yang dimiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak, serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya.”

Pemerintah daerah sering kali diistilahkan sebagai *local government*, dalam hal ini *local government* merupakan sebuah konsep yang dapat mengandung beberapa arti, Hoessein (dalam Muluk 2005:10) diantaranya adalah:

- a. Sebagai Pemerintahan Daerah yang mengacu pada organ. Yakni pemerintah daerah yang identik dengan DPRD (*council*) dan kepala daerah (*mayor*), yang perekrutannya berdasarkan pemilihan (pilihan langsung oleh masyarakat di masing-masing daerah otonom).
- b. Mengacu pada Pemerintahan Daerah (*local government*) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Yakni pengertian pemerintahan daerah yang lebih mengacu pada fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Fungsi tersebut yaitu menjalankan tugas yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, namun di sisi lain pemerintah daerah harus melakukan apa saja yang ditentukan oleh para pengambil keputusan di daerah sebagai tanggung jawab pemerintah daerah.
- c. Bermakna Daerah Otonom. Yaitu tempat dimana lokalitas atau pengelolaan wilayah berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu. Masyarakat yang ada di dalamnya, sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan menangani urusan pemerintahannya sendiri dan tidak ada kedaulatan daerah atau negara di dalamnya.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pengertian pemerintahan daerah dan pemerintah daerah termuat dalam pasal 1 ketentuan umum, yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dengan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”

Sejarah pertumbuhan pemerintahan daerah modern di Indonesia telah melewati beberapa fase dan juga muncul berbagai perubahan perundang-undangan mulai dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewenangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang dirasa sudah dapat melengkapi serta memperbaiki perundang-undangan sebelumnya. Sejarah perjalanan pemerintahan daerah dari masa penjajahan sampai masa reformasi setelah kemerdekaan membawa beberapa perubahan penting yang terkandung dalam kebijakan baru saat ini, menyangkut semangat memasukkan kembali perimbangan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang partisipatif. Perubahan penting lainnya adalah penentuan kepala daerah yang dilakukan melalui cara pemilihan langsung oleh masyarakat, tidak lagi melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD dan pembagian tugas pemerintahan kepada provinsi juga dipertegas.

Konsep yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berkenaan dengan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau lebih dikenal dengan Desentralisasi. Definisi tentang desentralisasi

dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok *Anglo Saxon* dan kelompok *Kontinental*.

a. Kelompok *Anglo Saxon*

Kelompok *Anglo Saxon* (dalam Kaho 2005:29), mendefinisikan desentralisasi sebagai: “Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada pejabat pusat yang ada di daerah disebut dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonomi daerah yang disebut devolusi”. Devolusi diartikan sebagai pemberian sebagian kekuasaan yang diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan, baik secara politis maupun secara administratif.

Sementara itu, menurut Corolie Bryant dan Louis G. With (dalam Kaho 2005: 29) menegaskan bahwa desentralisasi adalah: “Transfer kekuasaan yang dapat dibedakan ke dalam desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik”. Desentralisasi administrasi merupakan pendelegasian wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada para pejabat pusat ditingkat lokal. Sebaliknya desentralisasi politik adalah pemberian kewenangan dalam membuat keputusan dan pengawasan tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal, dengan tujuan untuk pemberdayaan lokal.

b. Kelompok *Continental*

Menurut R. Tresna 1990 (dalam Kaho 2005:30) membedakan desentralisasi atas dua bagian, yakni: “*Amtalijke decentralitie*”

(desentralisasi jabatan) atau dekonsentrasi dan “*staatskundige decentralitie*” (desentralisasi ketatanegaraan) yang dibagi lagi ke dalam desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi jabatan adalah pemberian atau penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian semata-mata guna kelancaran pekerjaan. Sedangkan desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah didalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.

Sementara itu, Arman Muslimin (dalam Kaho, 2005:30) tidak memasukkan dekonsentrasi sebagai salah satu jenis dari desentralisasi.

Desentralisasi dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
- 2) Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu.
- 3) Desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan, agama dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan diatas, dalam pelaksanaan pemerintahan, daerah mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kedaan dan kondisi masyarakat setempat. Rincian tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai gambaran bahwa pelaksanaan desentralisasi masih berada pada pengawasan pusat. Pemerintah daerah dapat

mengatur dan melaksanakan pemerintahannya sendiri, namun tetap pada kaidah Undang-Undang Dasar 1945 dan atas kedaulatan negara bukan daerah.

## 2. Otonomi Daerah

Istilah “otonomi” secara etimologi berasal dari bahasa latin “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomos*” yang berarti aturan. Dari pandangan lain, beberapa sarjana memberi arti otonomi sebagai “*zetwetging*” atau pengundangan sendiri atau perundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri atau pemerintahan sendiri. Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih baik. Maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah yaitu berorientasi pada pembangunan. Yang dimaksud pembangunan adalah pembangunan dalam arti luas, meliputi segi kehidupan dan penghidupan. Merupakan kewajiban bagi daerah untuk ikut

melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat yang diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada hakekatnya juga memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya disini dalam arti, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004. Dalam hal ini daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga diterapkan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip yang sama tentang pelaksanaan otonomi daerah juga diungkapkan (Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004:8), yaitu prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab, yang dijelaskan sebagai berikut:

“Prinsip otonomi yang nyata berarti pemberian otonomi kepada daerah hendaknya berdasar pertimbangan, perhitungan tindakan, dan kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutan nyata-nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri, sedangkan prinsip otonomi yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu:

- 1) Lancar dan teraturnya pembangunan di seluruh wilayah bangsa;
- 2) Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahannya yang telah diberikan;
- 3) Sesuai dengan pembinaannya politik dan kesatuan bangsa;

- 4) Terjaminnya keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daewrah;
- 5) Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah.”

Sementara itu fungsi dari pemerintahan daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan berlandaskan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah daerah mempunyai wewenang yang dibedakan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota merupakan unsur yang berskala kabupaten atau kota, meliputi 16 buah urusan, tertuang dalam UU No 32 Tahun 2004, yang meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanian;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan urusan pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

### 3. Peran Pemerintah

Pemerintah merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi negara. Pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam arti luas dan arti sempit. Seperti yang dikemukakan oleh Budiyanto (2000:25),

“dalam arti luas, yaitu pemerintah berdaulat yang berarti gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu pemerintah yang berdaulat, berarti suatu badan yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri.”

Peranan dan fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung oleh beberapa hal, dan seringkali tergantung dengan tingkat kemajuan suatu negara terutama di bidang ekonomi materiil.

Dalam manajemen pemerintahan modern, yang memberikan ruang ekspresi secara luas pada partisipasi masyarakat, masalah mendasar yang perlu diketahui adalah menentukan peran (*role*) yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun daerah bersama masyarakat. Ada empat peran strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah menurut Munir (2002: 207), yaitu:

- 1) *Enteerpreneur*, artinya pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan usaha sendiri dalam mengelola sumber daya ekonomi. Misalnya dengan mengelola BUMD yang mengelola aset-aset daerah dan sumber daya ekonomi potensial, sehingga secara ekonomi menguntungkan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

- 2) *Coordinator*, sebagai koordinator pemerintah daerah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi-strategi bagi pembangunan daerah, dan merangkul semua komponen masyarakat dan dunia usaha untuk menjadi aktor dalam pembangunan.
- 3) *Fasilitator*, sebagai fasilitator pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal, yaitu berkaitan dengan perbaikan perilaku budaya masyarakat dan birokrasi. Hal ini akan meningkatkan kinerja pelayanan publik, mempercepat proses pembangunan, perbaikan prosedur perijinan dan pelayanan, serta melakukan penetapan daerah (*tunning*) untuk memantapkan pengaturan dimensi spasial dalam pembangunannya.
- 4) *Stimulator*, artinya pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui kebijaksanaan khusus yang dapat menarik investor menanamkan investasi di daerah. Sensitifitas pemerintah daerah dalam kaitan ini sangat diperlukan

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan dengan jelas mengenai kewenangan daerah dalam membuat kebijakan daerah adalah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pemerintah daerah berperan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat terutama pada penentuan rambu-rambu dan aturan main secara umum. Peran pemerintah yang paling menonjol terletak pada peran pengambilan keputusan dan pendanaan, Sulistiyani (2004:97). Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat antara lain, formulasi, penetapan kebijakan (*policy*), implementasi, pengawasan (*monitoring*), evaluasi dan mediasi. Lebih lanjut Sulistiyani menegaskan tentang peran pemerintah:

“Peran pemerintah pada umumnya berada pada posisi fasilitasi terhadap jalannya proses pemberdayaan masyarakat dengan baik. Fasilitasi tersebut dapat berupa kebijakan politik, kebijakan umum, kebijakan sektoral/departemental, maupun batasan-batasan normatif lain. Disamping itu fasilitasi dapat berupa tenaga ahli,

pendanaan, penyediaan teknologi dan tenaga terampil, dan lain-lain.”

Sehingga peran pemerintah daerah dalam membangun daerah menjadi sentral dan sangat besar, karena daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang memberikan peluang besar bagi daerah dalam membangun daerahnya, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan yaitu melalui pemberdayaan. Artinya, pemerintah daerah tidak lagi sebagai penyedia (*provider*) dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan masyarakat. Berdasarkan pengertian-pengertian tentang peran pemerintah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya terjadi pergeseran dalam peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu yang semula sebagai penyedia pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator.

## **B. Pemberdayaan**

### **1. Konsep Pemberdayaan**

Konsep *empowerment* berawal dari pemahaman terhadap konsep *power* yang berarti kekuasaan, kekuatan, atau daya dengan konsep *disadvantaged* yang berarti ketimpangan. Kartasmita (1996: 4), mengatakan bahwa:

“kata *power* dalam *empowerment* diartikan sebagai “daya” sehingga *empowerment* diartikan sebagai pemberdayaan. Daya berarti kekuatan yang berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Pemberdayaan merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan *power* dengan pembagian kesejahteraan.”

Lebih lanjut, Kartasmita (1996) juga mendefinisikan pemberdayaan sebagai:

“Upaya pengeralahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat yang akan berakibat meningkatkan produktivitas rakyat. Sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat pula ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Pada akhirnya, rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya, akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Dengan demikian pemberdayaan tidak saja menumbuhkembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya.”

Pemberdayaan di dalamnya mengandung nilai-nilai intrinsik dan nilai-nilai instrumental. Pemberdayaan memiliki relevansi pada dataran individual dan kelembagaan serta bisa berkaitan dengan masalah perekonomian, sosial maupun politik. Definisi mengenai konsep tentang pemberdayaan juga diungkapkan oleh Sulistiyani (2004:79) yang menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkannya.

Definisi tentang pemberdayaan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang berbunyi:

“ pemberdayaaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis

dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan terhadap usaha mikro kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mandiri.”

Konsep tentang pemberdayaan mempunyai garis besar yang didalamnya terdapat kemampuan masyarakat yang harus diberdayakan agar bisa mandiri dan menentukan jalan kehidupannya sendiri. Pemberdayaan tidak dapat terlepas dari kondisi masyarakat yang perlu diberdayakan, sehingga dalam konsep pemberdayaan muncul pemberdayaan masyarakat. Robert Chamber (1995, Kartasasmita 1996:5) juga mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering, and sustainable*”. Sementara itu, Vitalaya (2000, dalam Zubaedi 2007:103) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun kemampuan (*capacity building*) masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan tiga-P (Pendampingan, Penyuluhan, dan Pelayanan).

Terdapat beberapa pendekatan dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Kartasasmita (2003:13) mengatakan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan yaitu masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Lebih lanjut, Kartasasmita juga menyebutkan pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

“Pertama, upaya itu harus terarah (*targetted*) yang ditujukan langsung bagi yang memerlukan dan dirancang untuk mengatasi masalah sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang

menjadi sasaran. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok karena jika secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.”

Sementara itu, Suryono dan Nugroho (2008:25-26) mengatakan bahwa:

“Pendekatan pemberdayaan yang berpusat pada manusia (*people centered development*), melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (*community based resources management*) sebagai mekanisme perencanaan *people centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (*empowerment*).”

Suharto (2005:66) menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- 2) Pendekatan *mezzo*. Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
- 3) Pendekatan makro. Pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem pasar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Berbagai pemaparan mengenai konsep pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat dan pendekatan pemberdayaan yang diungkapkan oleh beberapa ahli tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat keberdayaan seseorang dengan

memaksimalkan potensi yang dimiliki, sehingga bisa menjadi orang yang mandiri dan menjadi orang yang berdaya. Beberapa pendekatan terhadap pemberdayaan telah dipaparkan diatas. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam pendekatan pemberdayaan ini meliputi pendekatan yang terarah, kelompok, dan pendampingan. Sedangkan Pemberdayaan industri merupakan suatu cara atau usaha untuk meningkatkan kemampuan industri kecil dalam persaingan usaha dengan industri menengah dan besar. Pemberdayaan industri harus mengacu pada permasalahan yang dihadapi oleh industri itu sendiri, seperti permodalan, pemasaran, informasi, teknologi, dan sumber daya manusianya.

## **2. Tujuan dan Upaya Pemberdayaan**

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Agar tercapainya kemandirian masyarakat tersebut diperlukan sebuah proses. Sementara itu, beberapa ahli juga menyebutkan tujuan dari pemberdayaan. Menurut Ife (2008:30) tujuan pemberdayaan hakekatnya yaitu "*empowerment aims to increase the power of disadvantage*". Sedangkan menurut Erwan (2004:80) bahwa tujuan pemberdayaan usaha kecil adalah membentuk usaha kecil yang mandiri sehingga dapat berkembang menjadi usaha menengah. Kemandirian usaha ini diukur dari tingkat ketergantungan usaha kecil terhadap faktor-faktor luar yang mempengaruhi usaha kecil seperti mitra usaha, supplier, pemberi modal dan sebagainya.

Selanjutnya, dalam UU No 20 tahun 2008 disebutkan tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; serta;
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Untuk dapat mencapai tujuan pemberdayaan, maka dibutuhkan proses, tahapan atau upaya dalam pelaksanaan pemberdayaan agar bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Sumodiningrat (dalam Sulistiyani 2004:82), pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu mandiri, dan kemudian, dijaga agar tidak jatuh lagi. Dari pendapat tersebut, berarti pemberdayaan harus melalui suatu proses belajar untuk dapat mencapai status yang mandiri. Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang dilalui antara lain:

- a) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri; T
- b) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-kecakapan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan; T
- c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Sulistiyani, 2004:83). T

Sementara itu, Kartasasmita (dalam Zubaedi, 2007:103) menyebutkan bahwa upaya dalam pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga arah, yaitu:

1. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Artinya, setiap manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi, sehingga pada saat melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi yang telah dimiliki.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Artinya, langkah pemberdayaan diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar, serta sarana-prasarana lainnya.
3. Melindungi masyarakat. Hal ini berarti, dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan langkah-langkah yang mencegah persaingan secara tidak seimbang serta praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.

Senada dengan hal itu, Suharto (2005:67) juga menyebutkan dimensi dalam pemberdayaan sebagai suatu proses, yaitu:

1. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.
2. *Empowering*, yakni penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
3. *Protecting*, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.
4. *Supporting*, yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong

masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. *Fostering*, yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

H.M Yakub (1985, dalam Zubaedi, 2007: 105) juga menyebutkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat (*empowering society*) mencakup dua hal penting. Pertama, berupaya membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Kedua, menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat.

### 3. Model-Model Pemberdayaan

Model dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti contoh, pola, acuan, ragam, macam, dan sebagainya. Sedangkan pemberdayaan sendiri, berdasarkan penjelasan dari berbagai ahli di atas dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat keberdayaan seseorang dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki, sehingga bisa menjadi mandiri dan lebih berdaya. Dapat ditarik garis besar bahwa model pemberdayaan adalah contoh, pola, acuan, ragam, macam upaya peningkatan kemampuan dan kemandirian sehingga orang atau lembaga tersebut mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Suryono dan Nugroho (2008:29-37) menyebutkan beberapa model pemberdayaan dalam bukunya yang berjudul “Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah”, sebagai berikut:

- a) *Model People Center Development*

Pada model ini, pembangunan kualitas manusia merupakan upaya meningkatkan kapasitas manusia untuk mempengaruhi dan mengatur masa depannya. Korten (dalam Suryono dan Nugroho

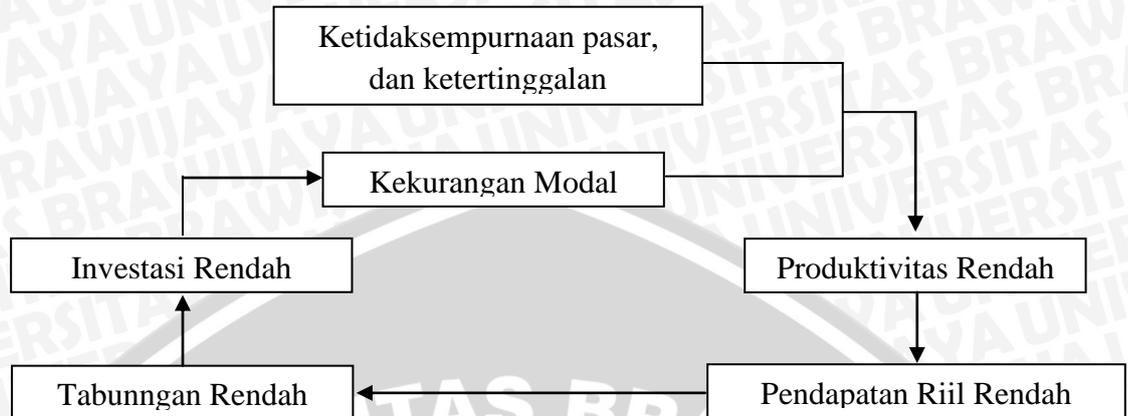
2008:29) menyebutkan model ini sebagai model *People Centre Development*. Model ini memberikan pemahaman bahwa manusia tidak dapat disamakan dengan alat produksi yang digunakan untuk dapat melipatgandakan hasil semata, tetapi manusia hendaknya juga dihargai dan dihormati. Oleh sebab itu, model ini mencoba untuk mengangkat martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki harga diri, kemampuan intelegensi, dan perasaan.

Beberapa contoh program yang menerapkan model ini antara lain, program impres desa tertinggal (IDT), proyek kawasan terpadu (PKT), proyek pendapatan petani dan nelayan kecil (P4K), jaring pengaman sosial (JPS), bantuan beras untuk orang miskin (Raskin), bantuan langsung tunai (BLT). Beberapa program tersebut dimaksudkan untuk dapat memberdayakan dan mengeluarkan masyarakat dari perangkap kemiskinan. Akan tetapi program-program tersebut sedikit banyak telah mengalami kegagalan. Seperti yang diidentifikasi Suryono dan Nugroho (2008:30), sebab-sebab kegagalan tersebut antara lain:

- 1) Program itu direncanakan pemerintah atas dasar persepsi dan asumsi yang keliru terhadap sebab munculnya kemiskinan;
  - 2) Perencanaan program anti kemiskinan dilakukan secara uniform;
  - 3) Lemahnya monitoring pemerintah terhadap pelaksanaan program anti kemiskinan;
  - 4) Kurangnya dukungan penelitian perihal masalah-masalah kemiskinan;
  - 5) Tertutupnya sikap pemerintah terhadap masalah-masalah kemiskinan;
  - 6) Justru melahirkan sikap ketergantungan dari masyarakat terhadap pemerintah.
- b) Model lingkaran setan kemiskinan versi Nurkse

Nurkse mensinyalir bahwa "*a poor country is poor because it is poor*" (negara itu miskin karena dia miskin), Kuncoro (dalam Suryono dan Nugroho, 2008:30). Kemiskinan merupakan suatu lingkaran yang disebutnya dengan lingkaran kemiskinan yang mengemukakan bahwa kemiskinan diawali dari adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi.

Untuk lebih mengerti mengenai model lingkaran setan versi Nurkse, digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 1. Lingkaran Setan Kemiskinan**

**Sumber: Nurkse (1953) dalam Suryono dan Nugroho (2008)**

Sampai saat ini, negara berkembang masih memiliki beberapa ciri, terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi maka kecenderungan kapital dapat terjadi, diikuti rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal, dan demikian terus berputar. Oleh sebab itu setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

c) Model Kemitraan

Kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Menilik dari pengertian tersebut, kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu (1) ada dua pihak atau lebih; (2) memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan; (3) ada kesepakatan; dan (4) saling membutuhkan (Suryono dan Nugroho, 2008:31-33).

Contoh pada model kemitraan dalam upaya pemberdayaan masyarakat antara lain adalah model kemitraan dalam program IDT. Program tersebut memiliki model kemitraan dua arah antara pemerintah dan agen pembaru tanpa melibatkan swasta. Pada program ini pemerintah berada level perencana dan donatur, sedangkan agen pembaru berada pada *level implementator*, sedangkan keterlibatan masyarakat, pada penerima program Sulistiyani (2004:148).

d) Model Grameen Bank

Model Gramen Bank adalah model kerja sebuah bank, dimana dengan sebuah bank yang dipimpin oleh manager lapangan dan sejumlah pekerja yang mencakup area 15-20 desa. Manajer dan karyawan datang ke desa-desa untuk memperkenalkan mereka dan mengenalkan program bank pada masyarakat. Model ini memberikan kredit kepada masyarakat tanpa agunan dan menciptakan sistem perbankan yang berbasis pada kesalingpercayaan, akuntabilitas, partisipasi, dan kreativitas.

Pada langkah pertama dua orang dari kelompok yang menerima pinjaman, akan dipantau selama satu bulan apakah anggota kelompok mengikuti aturan bank. Jika kedua orang mengembalikan pinjaman dengan bunganya selama periode 50 minggu maka anggota lain dapat melakukan pinjaman. Batasan ini menyebabkan anggota lain agar segera mengembalikan dalam jangka waktu tertentu. Ini membuat rasa tanggung jawab bersama dalam kelompok seperti sebuah jaminan dari pinjaman. Model Grameen Bank bertujuan memberikan pelayanan keuangan kepada kelompok miskin khususnya perempuan guna menolong mereka memerangi kemiskinan. Meskipun demikian, model ini tetap berusaha mencari keuntungan agar operasional bank tidak berhenti.

e) Model Sri Mahila SEWA Sahakari Bank

Model ini diterapkan oleh Sri Mahila SEWA Sahakari Bank, yakni lembaga keuangan yang memberikan akses keuangan terhadap wanita-wanita yang lemah/miskin. Peminjaman hanya untuk kegiatan ekonomi bukan untuk keperluan pribadi. Bank mempekerjakan dan mendorong wanita-wanita tersebut untuk menyelamatkan kehidupan mereka dengan menabung melalui bank tersebut. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan mengunjungi wanita-wanita ditempat kerja atau dirumah sehingga, mereka dapat menyimpan tabungan dengan mudah. Ketika wanita-wanita tersebut memerlukan pinjaman, pegawai-pegawai bank tersebut datang dengan seorang nasabah yang telah meminjam atau mengenal SEWAAN Bank.

Wanita-wanita diharapkan mendaftarkan rekening tabungan di bank mereka dan aset mereka, seperti rumah dan perkakas di dalamnya. Bank menyediakan pinjaman dengan periode pembayaran kembali tiga tahun untuk tujuan produktif. Modal pinjaman terbagi dalam tiga peruntukan, yaitu modal kerja untuk membeli perkakas perdagangan, pembuatan rumah, atau pembukaan toko atau pekerjaan.

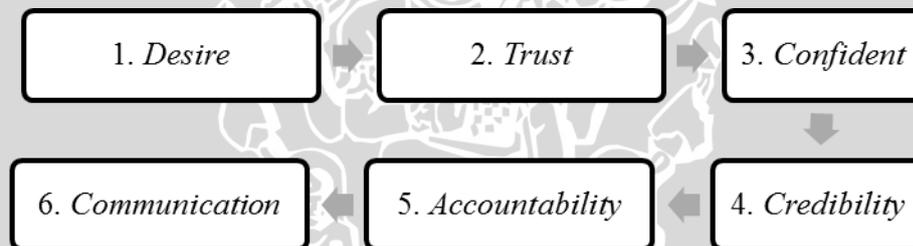
f) Model Sistem Kelompok Tanggung Renteng

Model ini banyak dipakai oleh para pengelola koperasi di Indonesia, khususnya pengelola koperasi simpan pinjam yang pada dasarnya merupakan upaya penguatan kelompok dalam berinteraksi

antara manusia. Sistem kelompok tanggung renteng dapat diperjelas dalam uraian berikut:

- 1) Hakikat sistem tanggung renteng merupakan upaya memperbaiki kualitas manusia melalui interaksi antar manusia.
- 2) Kelompok tanggung renteng merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana pendewasaan manusia melalui interaksi antarmanusia dalam kelompok menuju manusia berkualitas.
- 3) Nilai-nilai kelompok tanggung renteng mengembangkan nilai-nilai umum dan nilai-nilai khusus sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki koperasi.

Sementara itu, Khan (dalam Bakri 2011:20-24) juga menawarkan sebuah model pemberdayaan yang dapat dikembangkan dalam sebuah organisasi untuk menjamin keberhasilan proses pemberdayaan sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. Model Empowerment**  
**Sumber : Khan (1997:49) dalam Bakri (2011: 21)**

Penjelasan mengenai model dan tahapan-tahapan dalam pemberdayaan pada gambar di atas adalah sebagai berikut:

1. *Desire*  
 Pemberdayaan tahap pertama adalah tahap *desire* (pendelegasian) yaitu dimana adanya pendelegasian dari pihak manajemen dalam hal ini pemerintah untuk mendelegasikan dan melibatkan masyarakat, hal ini antara lain: (1) masyarakat diberi kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang berkembang, (2) pemerintah memperkecil *directive personality* dan memperluas keterlibatan masyarakat, (3) pemerintah mendorong terciptanya perspektif baru dan memikirkan kembali strategi kerja, (4) pemerintah mengembangkan keahlian dan melaith masyarakat untuk mengawasi sendiri (*self control*).

## 2. *Trust*

Tahap *trust* (membangun kepercayaan) yaitu adanya keinginan dari pemerintah untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat agar tercipta kondisi yang baik untuk pertukaran informasi dan saran tanpa adanya rasa takut. Tindakan yang dilakukan antara lain: (1) pemerintah memberi kesempatan atas pengguna sumber daya yang mencukupi bagi masyarakat, (2) pemerintah menyediakan waktu dan sumber daya yang mencukupi bagi masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaannya, (3) pemerintah menyediakan pelatihan yang mencukupi bagi kebutuhan masyarakat, dan (4) pemerintah menyediakan akses informasi yang cukup.

## 3. *Confident*

Tahap *confident* (saling percaya) yaitu menimbulkan rasa saling percaya diantara pemerintah dan masyarakat dengan menghargai terhadap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dengan cara: (1) pemerintah mendelegasikan tugas kepada masyarakat, (2) pemerintah mengenali ide dan saran dari masyarakat, (3) pemerintah memperluas tugas dan membangun jaringan dengan masyarakat, (4) pemerintah menyediakan jadwal pelatihan dan mendorong penyelesaian yang baik.

## 4. *Credibility*

Yakni tahap dimana ada keinginan dari pemerintah untuk menjaga kredibilitas dengan cara pemberian penghargaan dan pengembangan masyarakat, dan dilakukan dengan cara: (1) pemerintah memandang bahwa masyarakat sebagai partner yang strategis dalam mengembangkan pembangunan nasional, (2) pemerintah memperkenalkan inisiatif masyarakat untuk melakukan perubahan melalui partisipasinya, (3) pemerintah membantu menyelesaikan perbedaan dalam penentuan tujuan dan prioritas.

## 5. *Accountability*

Pada tahap ini pemerintah menginginkan pertanggung jawaban dari masyarakat yang merupakan sarana evaluasi terhadap prestasi kerja dan tanggung jawab dari wewenang yang diberikan. Tindakan yang dilakukan antara lain: (1) pemerintah menggunakan jalur training dalam mengevaluasi prestasi masyarakat, (2) pemerintah memberikan bantuan dan saran kepada masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya, (3) pemerintah menyediakan periode dan waktu pemberian *feedback* atau menambah bantuan.

## 6. *Communication*

Pemerintah ingin mengadakan komunikasi yang saling terbuka untuk menciptakan keadaan yang saling memahami antara masyarakat dan pemerintah. Caranya antara lain: (1) pemerintah menetapkan kebijakan *open door communication*, (2) pemerintah menyediakan waktu untuk mendiskusikan permasalahan secara terbuka, (3) pemerintah menciptakan kesempatan untuk *cors training*.

#### 4. Indikator dan Strategi Pemberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator pemberdayaan yang dapat menunjukkan seorang itu berdaya atau tidak. Hal ini diperuntukan ketika semua program pemberdayaan telah diberikan, semua upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari perubahan yang perlu dioptimalkan.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis, Suharto (2005:63). Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*).

Dalam UU No 20 tahun 2008, juga disebutkan indikator dalam pemberdayaan UMKM, yaitu (1) melalui penumbuhan iklim usaha; (2) pengembangan dan pembinaan UMKM. Penumbuhan iklim usaha, diwujudkan melalui beberapa aspek, yang meliputi:

- a. Pendanaan;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Informasi usaha;
- d. Kemitraan;
- e. Perizinan usaha;
- f. Kesempatan berusaha;
- g. Promosi dagang; dan
- h. Dukungan kelembagaan

Sementara itu pengembangan dan pembinaan UMKM, dilakukan berdasarkan beberapa bidang, yaitu:

- a. Produksi dan Pengolahan;

- b. Pemasaran;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Teknologi;
- e. Pendanaan.

Menurut Kartasmita (2003:17), peran birokrasi sangat penting dalam proses pemberdayaan. Dalam hal ini upaya yang harus dilakukan antara lain:

- a. Birokrasi harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi rakyat.
- b. Birokrasi harus membangun partisipasi rakyat. Artinya, berilah sebanyak-banyaknya kepercayaan pada rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri.
- c. Untuk itu maka birokrasi harus menyiapkan masyarakat dengan sebaik-baiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan rakyat membangun dengan kemandirian.
- d. Birokrasi harus membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat, dan agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat.
- e. Birokrasi harus membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.
- f. Birokrasi harus menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan lemah.

Untuk mencapai keberdayaan masyarakat, harus melalui proses pemberdayaan terlebih dahulu. Menurut Kesi (2011:18) indikator yang digunakan untuk mengukur proses pemberdayaan, yaitu:

- a) Kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat mulai dari kegiatan kajian atau analisis masalah;
- b) Perencanaan program;
- c) Pelaksanaan program;
- d) Keterlibatan dalam evaluasi secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Kesi (2011:18) juga menambahkan bahwa tingkat keberdayaan masyarakat diukur melalui tiga aspek, yaitu: (a) kemampuan dalam pengambilan keputusan; (b) kemandirian dan; (c) kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan.

Kartasasmita (2003:21-22), mengatakan bahwa ada beberapa langkah strategis yang harus ditempuh untuk mengembangkan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan. Pertama, peningkatan akses kedalam aset produksi (*productive assets*), terutama aset ke dalam modal, dan akses ke dalam teknologi. Kedua, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Selanjutnya Kartasasmita (2003:16-17) juga menjelaskan tentang berbagai ukuran keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut.

”Pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada bidang ekonomi, sehingga cara mengukurnya dengan melihat jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah desa miskin, peranan industri kecil, nilai tukar pertanian, upah minimum, dan sebagainya. Pembangunan manusia yang berkualitas bukan hanya pada aspek ekonominya saja, tetapi juga pendidikan dan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat, pada akhirnya bertujuan untuk membangun masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera.”

Dubois dan Miley (dalam Suharto, 2005: 68 ) menyebutkan beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- 1) Membangun relasi pertolongan yang: (a) merefleksikan respon empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*); (c) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (d) menekankan kerjasama klien (*client partnerships*).
- 2) Membangun komunikasi yang: (a) menghormati martabat dan harga diri klien; (b) mempertimbangkan keragaman individu; (c) berfokus pada klien; (d) menjaga kerahasiaan klien.

- 3) Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (b) menghargai hak-hak klien; (c) merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar; (d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- 4) Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial, melalui: (a) ketaatan terhadap kode etik profesi; (b) keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan; (c) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; (d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Strategi pemberdayaan masyarakat haruslah mampu menggerakkan kemampuan masyarakat dalam berfikir, bertindak dan terlibat langsung dalam pembangunan. Idealnya dalam proses pemberdayaan dapat terjadi sinergi dari kelompok pemberi dan penerima pemberdayaan itu sendiri. Memang sangat sulit untuk merencanakan ataupun merancang strategi seperti ini, akan tetapi setidaknya kita dapat memberikan alternatif agar strategi pemberdayaan dapat mencapai tujuan. Inti dari strategi pemberdayaan adalah naiknya daya tawar orang atau kelompok yang belum berdaya.

## **C. Konsep Industri**

### **1. Pengertian Industri**

Menurut Undang-Undang No 5 tahun 1984, industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan merancang bangun dan perekayasaan industri.

Menurut Dumairy (1996:227), istilah industri mempunyai dua arti, yaitu:

“Pertama, industri dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. Misalnya dalam konteks ini sebutan industri kosmetika,

berarti himpunan perusahaan penghasil produk-produk kosmetik; industri tekstil maksudnya himpunan pabrik atau perusahaan tekstil. Kedua, industri dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.”

Berbagai definisi tentang industri tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa industri merupakan perusahaan atau pabrik yang di dalamnya terdapat kegiatan yang produktif yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Pengembangan terhadap industri dipengaruhi oleh lingkungan industri itu sendiri.

Menurut Kristanto (2002:156-257), secara garis besar industri diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

- a) Industri dasar atau hulu  
Industri dasar atau hulu adalah industri yang memiliki sifat padat modal berskala besar, teknologi maju dan teruji. Lokasinya selalu dipilih dekat dengan bahan baku yang mempunyai sumber energi sendiri dan pada umumnya lokasi ini belum tersentuh pembangunan. Oleh karena itu, industri hulu memerlukan perencanaan yang matang tentang pengaturan tata ruang yang matang, perencanaan pemukiman, pengembangan kehidupan perekonomian dan juga pencegahan kerusakan lingkungan. Pembangunan industri ini dapat mengakibatkan perubahan lingkungan, baik dari aspek sosial-ekonomi dan budaya maupun pencemaran, terjadi perubahan tatanan sosial, pola konsumsi, tingkah laku, kemudian kurduran kualitas udara, penyusutan sumber daya alam dan sebagainya.
- b) Industri hilir  
Industri hilir merupakan perpanjangan dari industri hulu. Pada umumnya industri ini mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi, lokasinya selalu diusahakan dekat dengan pasar, menggunakan teknologi yang teruji dan padat karya.
- c) Industri kecil  
Industri kecil merupakan industri yang banyak berkembang di pedesaan dan perkotaan. Pada industri kecil masih menggunakan peralatan yang sederhana. Walaupun hakikat produksinya sama dengan industri hilir, tetapi sistem pengolahannya lebih sederhana, sistem tata letak pabrik maupun pengolahan limbah juga belum mendapat perhatian.

Tiap-tiap industri tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu kelompok industri dasar mempunyai misi pertumbuhan ekonomi dan pengatur penguatan struktur dan teknologi tepat guna pada tingkat maju, teruji, dan madya, serta tenaga kerja bersifat padat karya dan tidak padat karya. Kelompok industri kecil mempunyai misi pemerataan dan masih bersifat sederhana serta tenaga kerjanya bersifat padat karya.

Industri dapat dibedakan berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) seperti dikutip Arsyad (2004:176), dibedakan menjadi empat yaitu:

- a) Industri/Perusahaan Besar jika mempekerjakan 100 orang atau lebih;
- b) Industri/Perusahaan Sedang jika mempekerjakan 20-99 orang;
- c) Industri/Perusahaan Kecil jika mempekerjakan 5-19 orang;
- d) Kerajinan Rumah Tangga jika mempekerjakan kurang dari 3 orang (termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar).

Pengelompokan industri, juga bisa dibedakan menjadi industri padat modal dan padat karya, menurut Arsyad (2004:306-308) yaitu:

- a) Industri padat modal, yaitu industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya.
- b) Industri padat karya, yaitu industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

Industri juga dapat diklasifikasikan berdasarkan modal investasinya. Dimana industri kecil mempunyai nilai investasi dibawah atau kurang dari 200 juta dan tidak termasuk tanah serta bangunan. Sedangkan industri menengah yaitu dengan investasi antara 200 juta – 1 M juga tidak termasuk tanah serta bangunan.

Investasi di atas 1 M masuk ke dalam ranah industri besar, juga tidak termasuk tanah dan bangunannya. (Diskoperindagtamben Trenggalek).

Menurut Saleh (1986:51-53), di Indonesia terdapat tiga jenis industri kecil, yaitu:

- a) Industri lokal, adalah kelompok jenis industri yang menggantungkan kelangsungan hidupnya pada pasar setempat yang terbatas, secara relatif tersebar dari segi lokasinya. Skala usahanya sangat kecil dan mencerminkan pola perusahaan yang bersifat subsistem. Target pemasaran sangat terbatas sehingga pada umumnya mempergunakan sarana transportasi yang sederhana (misalnya: sepeda, gerobak dan pikulan). Adapun karena pemasaran hasil produknya ditangani sendiri, maka jasa pedagang perantara boleh dikatakan kurang menonjol.
- b) Industri yang terkelompok atau sentra industri kecil adalah kelompok jenis industri yang dari segi satuan usaha memounyai skala kecil, tetapi membentuk suatu pengelompokan/kawasan produksi yang terdiri dari segi kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis. Ditinjau dari segi tempat pemasarannya kategori kedua ini umumnya menjangkau pasar yang lebih luas daripada kategori yang pertama. Sehingga peranan pedagang/pengumpul menjadi cukup menonjol.
- c) Industri mandiri yaitu kelompok jenis industri yang mempunyai sifat-sifat industri kecil, namun telah berkemampuan mengadaptasi teknologi produksi yang cukup canggih. Pemasaran hasil produksi kelompok ini relatif tidak tergantung pada peranan pedagang perantara. Dimaksudkan dengan sifat-sifat industri kecil yang masih dipunyai oleh kelompok industri ini adalah skala unit usaha yang relatif kecil atau sistem manajemen yang digunakan masih sederhana. Pada dasarnya kelompok industri mandiri ini tidak sepenuhnya dapat dinisbahkan sebagai bagian dari industri kecil, mengingat kemampuannya yang terlampaui tinggi dalam mengakomodasi berbagai aspek modernisasi. Dan sesungguhnya hanya dasar skala penyerapan tenaga kerja semata, maka kelompok ini menjadi termasuk ke dalam bagian dari sub sektor industri kecil.

Penjelasan dari para ahli diatas dapat memberikan sebuah kesimpulan tentang industri, yang berarti sebuah kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, dan mempunyai nilai ekonomis yang lebih

tinggi. Industri dibedakan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti jumlah tenaga kerja, permodalan, pemasaran, serta teknologi yang digunakan.

## 2. Pengembangan Industri

### a) Pentingnya Pengembangan Industri

Secara mendasar, definisi pengembangan dikemukakan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006:556), yang berarti perbuatan atau cara atau usaha pengembangan atau meluaskan usaha. Secara lebih luas, pengertian pengembangan berarti segala usaha atau perbuatan untuk memajukan, memperbaiki secara teratur dan bertahap serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada dengan apa yang diharapkan.

Arsyad (2004:375), mengungkapkan bahwa:

"pengembangan industri kecil diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan luar negeri. Melalui pengembangan industri kecil ini, akan didapatkan partisipasi masyarakat secara luas, dan masyarakat akan siap secara politis, sosial dan mental untuk menghadapi perubahan besar yang terjadi dalam proses industrialisasi."

Langkah pokok yang perlu dilakukan untuk mengembangkan industri kecil adalah pemecahan masalah pemasaran dengan melalui pembinaan industri kecil melalui pembinaan sentra-sentra industri kecil. Dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat demi perkembangan industri kecil di daerah, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tujuan dikembangkannya industri kecil karena hal ini berkaitan dengan penyelesaian terhadap masalah sosial dan ekonomi di Indonesia, seperti jumlah pengangguran yang besar terutama golongan masyarakat berpendidikan rendah, tingkat kemiskinan yang tinggi, ketimpangan pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, serta masalah urbanisasi dengan segala efek negatifnya. Sehingga dengan berkembangnya industri kecil, dapat membantu pemecahan masalah—masalah global yang ada di Indonesia.

Menurut Irianto (1996:10) peran industri kecil yaitu:

- 1) Perluasan tenaga kerja yang tiap tahun bertambah jumlahnya;
- 2) Peningkatan penghasilan masyarakat secara merata;
- 3) Industri kecil dalam meningkatkan nilai ekspor.

Peran industri kecil dalam upaya peningkatan pendapatan, dapat dilihat dari semakin meningkatnya pendapatan dari setiap individu. Namun banyaknya pemutusan hubungan kerja oleh industri besar telah memperburuk permasalahan yang telah ada sebelumnya, seperti kemiskinan dan pengangguran. Kondisi tersebut menyadarkan bahwa pengembangan industri kecil bukanlah sebagai suatu usaha dalam rangka pemerataan pembangunan, tapi merupakan suatu keharusan karena industri kecil telah menunjukkan dirinya sebagai struktur sosial yang dapat menyerap tenaga kerja dengan investasi kecil yang dapat berproduktif secara efektif.

## b) Bentuk Pengembangan Industri

Bentuk pengembangan industri kecil dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan. Menurut Syarif (1991:3) bentuk-bentuk pengembangan industri kecil meliputi:

- 1) Perangkat Lunak, meliputi:
  - a) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan;
  - b) Pembinaan usaha
  - c) Bantuan promosi dagang;
  - d) Keringanan dan kemudahan yang diberikan kepada pengusaha kecil dalam rangka mendorong berkembangnya usaha.
- 2) Perangkat Keras, meliputi:
  - a) Penyediaan fasilitas bersama, misalnya koperasi sentra usaha pada sentra-sentra industri kecil;
  - b) Bantuan langsung pada pengusaha industri kecil seperti penyediaan tempat usaha dan bantuan permodalan.

Bentuk-bentuk pengembangan industri kecil akan lebih terasa pada masyarakat bila ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pembinaan atas iklim usaha sebagai faktor eksternal dalam berusaha juga perlu mendapatkan perhatian karena hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan industri kecil.

## c) Strategi Pengembangan Industri Kecil

Strategi terhadap industri kecil mutlak diperlukan untuk dapat menciptakan keunggulan-keunggulan yang kompetitif dan dapat bersaing dengan usaha lain. Menurut Hetifah Syaifudin (1995:66-75), strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan industri kecil adalah:

- 1) Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial, melalui penyertaan modal sementara
- 2) Pengembangan pemasaran, meliputi:
  - a) Meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar;

- b) Proteksi Pasar;
- c) Menggeser Struktur Pasar Monopoli Menjadi bersaing.
- 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan
- 4) Strategi Pengaturan dan Perijinan, meliputi:
  - a) Pengaturan dan Perijinan;
  - b) Perencanaan Tata Ruang;
  - c) Fungsi Kelembagaan.

Sementara itu, Kartasmita (1996:5-7) juga menyebutkan beberapa strategi dalam pengembangan usaha kecil, termasuk di dalamnya industri kecil yang terdiri dari:

- 1) Peningkatan akses kepada akses produktif, terutama modal, disamping juga teknologi, manajemen, dan segi-segi lainnya yang penting;
- 2) Peningkatan akses pada pasar yang meliputi suatu spektrum kegiatan yang luas, mulai dari pencadangan usaha sampai pada informasi pasar, bantuan produksi, dan prasarana serta sarana pemasaran;
- 3) Kewirausahaan, dimana dalam hal ini pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting, serta dalam pelatihan ini ditanamkan pula semangat wirausaha;
- 4) Kelembagaan. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar, maka memperkuat pasar adalah penting, tetapi hal itu harus disertai dengan pengendalian agar bekerjanya pasar tidak melenceng dan mengakibatkan melebarnya kesenjangan;
- 5) Kemitraan usaha, yang merupakan jalur penting dan strategis bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat.

Melalui strategi-strategi tersebut, diharapkan upaya pemerintah daerah dalam pengembangan industri kecil dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

### **3. Pembinaan Industri Kecil**

#### **a) Pengertian Pembinaan**

Industri kecil perlu dikembangkan melalui proses pembinaan, karena peranannya yang mampu menampung tenaga kerja dan merupakan lapangan kerja non-pertanian yang bersifat padat karya. Menurut Miftah Thoha (1993:7), pembinaan yaitu:

“suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini, yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua, pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu”.

Dari definisi tersebut, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pembinaan merupakan suatu usaha untuk memberikan pengarah, bimbingan, dan motivasi melalui penyempurnaan atau pembaharuan, pengaturan, dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan kondisi yang ada sehingga tercipta sebuah kondisi yang lebih baik.

#### **b) Tujuan Pembinaan Industri Kecil**

Pada dasarnya hakekat pembinaan adalah terwujudnya suatu hal yang positif dari serangkaian sistem dan prosedur yang memuat program-program pembaharuan, secara menyeluruh dan terencana, baik oleh individu, maupun instansi yang bersangkutan dimana individu tersebut bekerja. Hal ini dapat berpengaruh terhadap perilaku individu yang dibina dan selanjutnya akan dapat bekerja dengan lebih baik serta mencapai tujuan-tujuan dalam bekerja. Karena itu, maka tujuan pembinaan industri kecil diarahkan pada upaya untuk mewujudkan pengusaha industri yang memiliki ketangguhan usaha dari segi efisiensi, tingkat kesehatan usaha dan kemandirian, serta mampu menjadi pilar kekuatan ekonomi rakyat guna mencapai pembangunan nasional. Tujuan pembinaan usaha kecil juga tertuang dalam PP Nomor 32 tahun 1998, yaitu untuk menumbuhkan

dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

#### c) Pola Pembinaan Industri Kecil

Ruang lingkup pembinaan industri kecil ini meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1998, pola pembinaan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
- 2) Penyiapan program pembinaan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
- 3) Pelaksanaan program pembinaan;
- 4) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, upaya pengembangan industri kecil dapat berjalan secara berkesinambungan. Apabila terjadi kegagalan dalam upaya pembinaan, dapat segera diatasi dengan upaya yang lebih tepat.

#### 4. Permasalahan Industri Kecil

Keberadaan industri kecil banyak menghadapi kendala yang membutuhkan perhatian untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Imam Hanafi dan Imam Hardjanto (2006:42), kendala atau tantangan yang sering dihadapi kebanyakan industri kecil adalah:

- a) Kelemahan Struktural, yaitu kelemahan dalam struktur perusahaan semisal kelemahan manajemen, pengendalian mutu, penguasaan teknologi, permodalan dan terbatasnya akses pasar;
- b) Kelemahan kultural, yaitu merupakan kelemahan yang menyebabkan kelemahan-kelemahan kultural seperti: informasi peluang, informasi mendapatkan bahan baku, informasi pengembangan produk, dan sebagainya.

Sementara itu, menurut Kuncoro (1997:316-317) masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil yakni:

- a) Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
- b) Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
- c) Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
- d) Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
- e) Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan.
- f) Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Menurut Tambunan (2002:70) bahwa masalah umum dari usaha kecil di Indonesia adalah hampir semua usaha kecil di Indonesia masih menggunakan teknologi yang lama/tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan mempengaruhi efisiensi dalam proses produksi, tetapi juga menjadikan rendahnya kualitas produk yang dibuat.

Dengan adanya upaya pemberdayaan diharapkan permasalahan-permasalahan yang dialami kebanyakan industri, khususnya industri kecil dapat diatasi dengan baik, sehingga industri kecil dapat berkembang dan bisa berperan aktif dalam perekonomian daerah.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi fenomena. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penelitian diartikan sebagai pemeriksaan yang teliti atau penyidikan. Sedangkan kata penyidikan sendiri diartikan sebagai pemeriksaan atau pengusutan, dan kata menyelidiki berarti memeriksa dengan teliti, mengusut dengan cermat atau menelaah (mempelajari) dengan sungguh-sungguh.

Pengertian metode adalah suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan menurut Sugiyono (2009:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Dengan demikian metode penelitian adalah cara untuk melaksanakan penelitian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk dapat memecahkan, menemukan, mengembangkan dan menguji permasalahan yang diteliti, serta dapat dipertanggungjawabkan hasil dan pembahasannya.

#### A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk

menggambarkan atau mendeskripsikan, memaparkan berbagai fenomena sosial yang terjadi pada obyek penelitian yang sistematis, dan faktual untuk diamati secara mendalam. Analisis kualitatif dalam penelitian ini menggunakan data-data non statistik dan tidak terbatas pada usaha-usaha yang mengungkapkan permasalahannya sebenarnya. Menurut Sugiyono (2009:215), objek penelitian kualitatif bukan semata-mata pada situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*), tetapi juga bisa berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan dan sejenisnya yang berinteraksi secara sinergis.

Penelitian ini akan menggambarkan tentang bagaimana peran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Tambang dan Energi dalam memberdayakan Industri Lokal yang ada di desa Kamulan Kecamatan Durenan. Hal itu beserta faktor-faktor lain yang mendukung maupun menghambat proses pemberdayaan itu sendiri.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Fokus penelitian berkedudukan sebagai batas, yaitu yang berguna untuk mencegah terjadinya pembiasan dalam mempersiapkan maupun dalam melakukan pembahasan nantinya. Fokus penelitian adalah pusat perhatian dari apa yang akan diteliti guna mendapatkan data yang akan dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan sesuai dengan masalah yang ditetapkan.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Industri, meliputi:

- a. Pendanaan;
- b. Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Bantuan Teknologi;
- d. Pemasaran;
- e. Perijinan.

2. Hasil Pemberdayaan

- a. Perkembangan Industri Kecil
- b. Perijinan
- c. Pemasaran
- d. Kemampuan SDM

3. Faktor pendukung dan penghambat

- a. Faktor pendukung
- b. Faktor Penghambat

### C. LOKASI DAN SITUS PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Desa Kamulan merupakan kawasan dengan mayoritas penduduknya bekerja pada industri genteng. Desa Kamulan juga terkenal sebagai kawasan sentra industri

Genteng. Keberadaan desa kamulan yang mayoritas penduduknya bekerja pada bidang industri, menarik peneliti untuk melakukan penelitian di daerah kamulan, dengan tujuan untuk mengetahui apa saja peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan industri yang ada di desa Kamulan.

Adapun yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Sedangkan yang menjadi situs penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Tambang dan Energi Kabupaten Trenggalek;
2. Para Pengrajin Industri Genteng Kodok Press Tangan dan Dupa di Desa Kamulan.

#### **D. SUMBER DAN JENIS DATA**

Sumber data merupakan asal darimanakah data tersebut didapatkan atau diperoleh. Keberadaan data adalah untuk dapat disajikan sebagai sumber informasi yang disajikan sebagai pokok kajian atau sebagai bahan pokok untuk dapat mengetahui yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan antara lain:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian maupun permasalahan yang ada. Data yang didapatkan diperoleh melalui hasil wawancara

dengan orang-orang yang bersangkutan dengan permasalahan, meliputi Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Tambang dan Energi Kabupaten Trenggalek, serta Para Pengrajin di Industri Genteng Kodok Press Tangan dan Industri Konveksi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti. Data tersebut antara lain dapat berupa:

- a. Foto;
- b. Arsip-arsip atau dokumen resmi;
- c. Catatan-catatan;
- d. Kompilasi data;
- e. Internet, majalah atau koran, jurnal-jurnal yang masih relevan dengan kajian penelitian ini.

## E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

### 1. Observasi (pengamatan langsung dilapangan)

Metode pengamatan observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Sumber informasinya berupa penampakan suasana atau perilaku yang diamati oleh petugas serta direkam dalam bentuk lembaran-lembaran isian yang didalamnya terdapat penampakan keadaan suasana atau

permasalahan yang ada. Melalui teknik observasi ini akan didapatkan gambaran yang jelas serta nyata.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan tanya-jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan secara resmi, terstruktur guna menggali pandangan subyek yang diteliti. Wawancara ini dapat dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat guna mendapatkan data yang rinci, sejujurnya dan mendalam, serta dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang dijelajahi.

## 3. Dokumentasi

Penggunaan dokumen ditujukan untuk menunjang data hasil wawancara dan observasi, untuk kemudian dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Dokumentasi ini berupa foto-foto hasil kegiatan, dokumen berupa buku panduan, arsip-arsip, serta data lain yang berhubungan dengan penelitian.

## F. INSTRUMEN PENELITIAN

Suatu penelitian memerlukan instrumen dalam pelaksanaannya. Sugiyono (2009:223) menjelaskan bahwa instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Sehingga dalam hal ini peneliti sendiri merupakan

instrumen penelitian, dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu, digunakan juga:

- a. Pedoman wawancara (*interview guide*), merupakan suatu daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada informan.
- b. Perangkat penunjang lain yang merupakan buku catatan dan alat tulis yang akan digunakan untuk mencatat data yang diperoleh dilokasi penelitian.
- c. Koneksi internet, yaitu peneliti mendapat berbagai macam informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara relevan melalui jurnal-jurnal, dan dokumen yang valid.

## G. ANALISIS DATA

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut, dimana data tersebut kemudian dideskripsikan guna memberikan gambaran dari kenyataan yang ada secara terperinci. Hasilnya nanti akan berupa data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan (dalam Sugiyono, 2009:244), menyatakan bahwa:

*“Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”*

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, dengan memilih data kemudian membuat kesimpulan sehingga dapat dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisa yang dikembangkan oleh Spradley (dalam Sugiyono, 2009:253-264) yaitu membagi analisis data menjadi 4 tahap, yaitu:

1. Analisa Domain. Setelah peneliti memasuki obyek penelitian yang berupa situasi sosial yang terdiri atas *place*, *actor*, dan *activity* (PPA), selanjutnya melakukan observasi partisipan, mencatat hasil observasi dan wawancara, melakukan observasi deskriptif, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis domain. Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian. Data diperoleh dari *grand tour* dan *minitour question*. Hasilnya berupa gambaran umum tentang obyek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Informasi yang diperoleh dalam analisis ini belum mendalam, masih di permukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.
2. Analisis Taksonomi, merupakan analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian domain yang telah ditetapkan menjadi *cover term* oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi.
3. Analisis Komponensial. Pada analisis ini, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terseleksi.
4. Analisis Tema Budaya, atau *discovering cultural themes*, sesungguhnya merupakan upaya mencari “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada (Sanapiah Faisal, 1990; dalam Sugiyono, 2009:264). Dengan ditemukan benang

merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu “konstruksi bangunan” situasi sosial atau obyek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian, maka menjadi lebih terang dan jelas.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang terletak dibagian selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Oleh karena kabupaten Trenggalek yang berada di bagian selatan pulau Jawa, maka berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, dan wilayahnya di dominasi oleh pegunungan serta perbukitan. Batas-batas Daerah Kabupaten Trenggalek yaitu:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan dengan wilayah kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo;
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung;
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka Samudra Indonesia;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan.

Posisi kabupaten Trenggalek secara geografis berada diantara koordinat  $111^{\circ} 24'$ - $112^{\circ} 11'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 53'$ - $8^{\circ} 34'$ Lintang Selatan.

Kabupaten Trenggalek mempunyai luas wilayah 126.140 Ha, dengan kondisi dua per tiga (2/3) dari luas wilayah merupakan pegunungan dengan ketinggian 0 – 90 dpl. Sedangkan sisanya satu per tiga (1/3 bagian) merupakan tanah dataran rendah. Ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 690 meter di atas

permukaan air laut. Kabupaten Trenggalek terbagi ke dalam 14 Kecamatan yang meliputi Kecamatan Panggul, Munjungan, Watulimo, Kampak, Dongko, Pule, Karang, Suruh, Gandusari, Durenan, Pogalan, Trenggalek, Tugu dan Bendungan dan terdiri dari 152 desa serta 5 kelurahan.

4 Kecamatan mayoritas desanya merupakan dataran rendah, yaitu Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas desanya merupakan daerah perbukitan. Luas wilayah kecamatan yang ada di Trenggalek dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek 2012**

Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )
Panggul	131,56
Munjungan	154,80
Watulimo	154,44
Kampak	79,00
Dongko	141,20
Pule	118,12
Karang	50,92
Suruh	50,72
Gandusari	54,96
Durenan	57,16
Pogalan	41,80
Trenggalek	61,16
Tugu	74,72
Bendungan	90,84
<b>Kabupaten Trenggalek</b>	<b>1,261,40</b>

Sumber : BPS Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan tabel 1, hanya ada satu Kecamatan yang luas wilayahnya kurang dari 50,00 Km<sup>2</sup>, yaitu Kecamatan Pogalan. Sedangkan ada 8 Kecamatan yang luasnya antara 50,00 Km<sup>2</sup> – 100,00 Km<sup>2</sup>, kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kampak, Karang, Suruh, Gandusari, Durenan, Trenggalek, Tugu dan Bendungan. Sisanya untuk lima Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100 Km<sup>2</sup>, kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Panggul, Munjungan, Watulimo, Dongko, dan Kecamatan Pule. Sementara itu pegunungan yang mendominasi di wilayah Kabupaten Trenggalek masih banyak ditumbuhi hutan dan menambah kealamian wilayah kabupaten Trenggalek.



**Gambar 3. Peta Kabupaten Trenggalek**

Sumber : [www.trenggalekkab.go.id](http://www.trenggalekkab.go.id)

Struktur tanah di Kabupaten Trenggalek terdiri dari lapisan tanah Andosol dan Latosol, Mediteran, Grumosol dan Regosol, Alluvial dan Mediteran. Lapisan tanah Alluvial terbentang di sepanjang aliran sungai di bagian wilayah timur dan merupakan lapisan tanah yang subur, luasnya berkisar antara 10 % hingga 15 % dari seluruh wilayah. Pada bagian selatan, barat laut dan utara, tanahnya terdiri dari lapisan Mediteran yang bercampur dengan lapisan Grumosol dan Latosol. Lapisan tanah ini memiliki daya serap yang rendah terhadap air yang menyebabkan lapisan tanah ini kurang subur.

Dilihat dari penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Trenggalek, paling banyak adalah hutan negara yaitu 48,31 persen dari wilayah kabupaten. Luas hutan negara dalam 10 tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya tukar-menukar lahan kawasan hutan dengan Pemerintah Daerah atau swasta dengan rasio 1:3, yang digunakan untuk pengembangan pariwisata, fasilitas umum, dan pertambangan. Sementara itu luas tanah sawah mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, disebabkan alih fungsi lahan dari tanah kering ke tanah sawah, berkaitan dengan pangsa pasar komoditas tertentu. Pada jenis penggunaan tanah kering terdapat hutan rakyat seluas 16.607,50 Ha dengan produksinya antara lain sengon, akasia, mahoni, jati, dan lain-lain, dengan produksi kayu bulat dan kayu bakar. (RPJPD Kab. Trenggalek 2005-2025)

Pada wilayah Kabupaten Trenggalek terdapat banyak aliran sungai, baik besar maupun kecil. Di bagian utara terdapat 2 sungai besar yang mengalir ke selatan, yaitu Sungai Bagong dan Sungai Pinggir. Sungai Ngasinan merupakan muara beberapa sungai yang cukup besar, yaitu dari utara Sungai Bagong yang

bermuara di Kelurahan Tamanan dan Sungai Prambon yang bermuara di Kecamatan Tugu, dan barat Sungai Pinggir yang bermuara di Kecamatan Tugu dan dari selatan Sungai Nglongah (Mlinjon) yang bermuara di Kecamatan Trenggalek. Sebelum masuk Dam Dawung menyatu dengan Sungai Munjungan. Sungai-sungai yang berada di DAS Brantas sebagian besar digunakan untuk irigasi, dan sebagian masuk ke PLTA Niyama. Sedangkan di bagian selatan terdapat sungai besar yang mengalir ke Samudera Indonesia, yaitu Sungai Gedangan berhulu di Kecamatan Pule, Dongko dan Panggul; Sungai Konang di Kecamatan Dongko dan Panggul; Sungai Tumpak Nongko di Kecamatan Munjungan; Sungai Ngemplak di Kecamatan Watulimo.

Jumlah sungai di Kabupaten Trenggalek sebanyak 28 sungai dengan panjang antara 2,00 Km hingga 41,50 Km dengan debit air antara 674 M<sup>3</sup>/detik (Kali Jati) sampai dengan 20.394 M<sup>3</sup>/detik (Kali Munjungan). Dengan debit air sungai yang relatif tinggi merupakan indikasi tingkat erosi yang cukup tinggi. Untuk pemanfaatan potensi aliran sungai tersebut baik untuk air bersih maupun irigasi diperlukan pembangunan lebih banyak bangunan penampung air, baik bendungan, embung, dam dan lain-lain. Adapun sumber air di Kabupaten Trenggalek sejumlah 361 sumber air. Sumber air di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan, baik jumlah maupun debitnya. Sumber-sumber air tersebut perlu mendapatkan perhatian dengan menjaga kelestarian alam, terutama area di sekitar sumber mata air sebagai kawasan lindung.

Wilayah Kabupaten Trenggalek memiliki panjang pantai  $\pm$  96 km yang tersebar di kecamatan Watulimo, Panggul, dan Munjungan. Salah satu pantai yang

terbesar adalah pantai Prigi yang memiliki ZEE (*Zone Economic Exclusive*) seluas 35.558 km<sup>2</sup> dengan tingkat eksploitasi ± 12,50 % dengan beroperasinya PPN (Pantai Pelabuhan Nasional). Dengan demikian pantai Prigi merupakan penyumbang hasil tangkapan laut terbesar di Kabupaten Trenggalek.

Wilayah Kabupaten Trenggalek juga kaya akan potensi pertambangan, antara lain: mangan, marmer, felspar, andesit, kalsit, deorit, sirtu, kaolin, batu lempung, gips, tanah merah, traso, batu bara, bijih besi, batu tupa, batu gamping dan lain-lain. Potensi tambang tersebut lebih banyak terdapat pada wilayah selatan Kabupaten Trenggalek yang sebagian besar berada di kawasan Perhutani, sehingga untuk kegiatan eksploitasi diperlukan tukar guling antara Pemerintah Daerah dan Perhutani. (RPJPD Kab. Trenggalek 2005-2025)

Kabupaten Trenggalek sebagai daerah tropis berada di sekitar garis katulistiwa, maka seperti daerah lain di Indonesia, Kabupaten Trenggalek mengalami perubahan iklim sebanyak dua kali setiap tahunnya, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September – April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei–Agustus. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 2. Tinggi Wilayah Kecamatan dari permukaan Laut, Hari Hujan dan Rata-rata Curah Hujan Kabupaten Trenggalek 2012**

Kecamatan	Tinggi dari Permukaan Laut (m)	Hari Hujan	Rata-rata Curah Hujan (Mm)
Panggul	7	106	18
Munjungan	5	106	22
Watulimo	295	-	-
Kampak	120	248	8
Dongko	525	128	21
Pule	655	114	21
Karangan	112	104	13
Suruh	-	-	-
Gandusari	100	107	12
Durenan	-	-	-
Pogalan	-	97	19
Trenggalek	110	115	18
Tugu	135/125	112/95	19/16
Bendungan	690	139	19
<b>Kabupaten Trenggalek</b>	249,91	124,32	17,14

Sumber : BPS Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa rata-rata hari hujan di Kabupaten Trenggalek adalah 124 hari dan rata-rata curah hujan 17,14 Mm. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa ada beberapa kecamatan yang tidak mempunyai data tentang kondisi curah hujan di kawasanya. Kondisi pola musim yang ada menggambarkan bahwa Kabupaten Trenggalek memiliki iklim yang relatif stabil.

Sistem Pemerintahan Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu kabupaten di propinsi Jawa Timur, mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten-kabupaten lain yang dipimpin oleh seorang bupati sebagai kepala pemerintahan kabupaten. Sistem perwilayahannya, Kabupaten Trenggalek

merupakan Pusat Pelayanan Lokal (PKL) dalam lingkup WP (Wilayah Pengembangan) Kediri dan sekitarnya, dengan fungsi wilayah yang diarahkan pada kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perikanan dan industri.

Kesadaran masyarakat pada bidang pemerintahan diwujudkan dalam berpartisipasi pada kegiatan pemilihan presiden atau wakil presiden, pemilu kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif. Kesadaran politik masyarakat mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik horisontal serius pada saat dan pasca pemilihan umum, meskipun tingkat partisipasi pemilih tidak terlalu tinggi. Penataan aparatur pemerintah guna mendapatkan aparatur yang memiliki kemampuan (*knowledge and skill*) dan sikap mental (*attitude*) yang baik. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui penataan kelembagaan agar terbentuk kelembagaan yang mantap dengan struktur dan fungsi yang optimal.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan kinerja aparatur, telah dilakukan standarisasi atas kualitas pelayanan publik maupun aparatur. Standarisasi tersebut dengan sertifikat ISO 9001: 2000. Dengan sertifikasi pelayanan tersebut berarti telah dilakukan pelayanan publik maupun pelayanan aparatur dengan kualitas yang lebih baik. Serta dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan masyarakat Kabupaten Trenggalek telah memiliki Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Dengan

UPTSA tersebut pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang terpadu, mekanismenya lebih sederhana, mudah, cepat, dan murah.

Pembagian wilayah administrasi di Pemerintahan Kabupaten Trenggalek dibagi menjadi 14 kecamatan, 152 desa, 5 kelurahan, 540 dusun atau lingkungan, 1290 Rukun Warga (RW), dan 4502 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah kecamatan Panggul dengan 17 desa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah kecamatan Suruh dan Kampak dengan 7 desa. Pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Trenggalek 2012**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa / Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	Rukun Warga	Rukun Tetangga
Panggul	Wonocoyo	17	66	155	521
Munjungan	Munjungan	11	44	66	353
Watulimo	Prigi	12	36	80	338
Kampak	Bendoagung	7	23	77	249
Dongko	Dongko	10	39	114	469
Pule	Pule	10	34	117	379
Karangan	Karangan	12	32	81	296
Suruh	Suruh	7	27	40	188
Gandusari	Gandusari	11	49	126	328
Durenan	Kendalrejo	14	47	78	296
Pogalan	Ngadirenggo	10	36	121	319
Trenggalek	Ngantru	13	33	72	242
Tugu	Gondang	15	45	99	322
Bendungan	Dompyong	8	29	64	202
<b>Kabupaten Trenggalek</b>	<b>Trenggalek</b>	<b>157</b>	<b>540</b>	<b>1290</b>	<b>4502</b>

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Jumlah penduduk mengandung dua konsekuensi bila dikaitkan dengan pembangunan, yaitu menjadi subyek dan obyek pembangunan. Sehingga, dalam

banyak hal besarnya penduduk merupakan potensi dan modal dasar pembangunan apabila peranan keduanya bisa diwujudkan. Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah 1.261,40 km<sup>2</sup>, pada tahun 2012 jumlah penduduk menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun sebesar 827.873 jiwa.

Berdasarkan data BPS dari jumlah seluruh penduduk tersebut sebanyak 418.622 jiwa (50,57%) merupakan penduduk laki-laki dan 409.251 jiwa (49,43%) merupakan penduduk perempuan. Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 1971 sebanyak 512.425 jiwa, tahun 1980 sebanyak 564.525 jiwa, tahun 1990 sebanyak 624.051 jiwa, tahun 2000 sebanyak 649.883 jiwa, dan tahun 2010 674.411 jiwa. Jika dibandingkan jumlah penduduk tahun 2012 dengan hasil sensus tahun 2010 terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 18,54 persen selama 2 tahun terakhir.

Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan kesetaraan gender dalam pembangunan harus dijunjung tinggi dalam mewujudkan cita-cita bersama. Suku yang ada didominasi oleh suku Jawa dan beberapa suku lainnya. Agamapun juga cukup beragam, ada Islam, Kristen dan beberapa penganut agama lainnya, dan islam yang mendominasi agama masyarakat Trenggalek.

Adapun berdasarkan jumlah kepala keluarga dan kepadatan penduduk per kecamatan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. Jumlah Kepala Keluarga dan Kepadatan Penduduk**

Kacamatan	Kepala Keluarga	Kepadatan Penduduk
Panggul	29.979	685,1
Munjungan	17.651	397,2
Watulimo	25.454	508,8
Kampak	13.999	516,7
Dongko	23.657	522,9
Pule	20.301	521,0
Karangan	18.707	1.097,3
Suruh	10.089	574,4
Gandusari	19.966	1.053,0
Durenan	19.433	1.062,4
Pogalan	19.491	1.442,5
Trenggalek	24.605	1.227,9
Tugu	18.901	762,6
Bendungan	10.028	331,6
Kabupaten Trenggalek	268.661	656,3

Sumber: [www.trenggalekkab.bps.go.id](http://www.trenggalekkab.bps.go.id)

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa Kecamatan Panggul merupakan kecamatan dengan kepala keluarga terbesar, yakni sebanyak 29.979 KK, diikuti dengan Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Trenggalek, masing-masing 25.454 KK dan 24.605 KK. Namun jika dilihat dari kepadatannya, Kecamatan Pogalan dan Trenggalek memiliki kepadatan penduduk tertinggi, masing-masing 1.443 jiwa/km<sup>2</sup> dan 1.228 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Bendungan merupakan kecamatan dengan jumlah KK dan tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu sebanyak 10.028 KK dengan tingkat kepadatan 332 jiwa/km<sup>2</sup>.

Industri pengolahan di Kabupaten Trenggalek didominasi oleh industri non formal dengan persentase 97,60 persen. Industri formal mempunyai nilai investasi sebesar 79,24 milyar rupiah dan menyerap tenaga kerja 4.662 orang, sedangkan industri non formal mempunyai nilai investasi 45,48 milyar rupiah dan

menyerap tenaga kerja 63.936 orang dari total tenaga kerja industri yang ada dengan nilai produksi 1.043,04 milyar rupiah untuk industri formal dan 499,26 milyar rupiah untuk industri non formal, (BPS, hal.17). Sementara itu industri di Kabupaten Trenggalek didominasi oleh industri kecil yang meliputi genteng, anyaman bambu, batik, dan makanan khas Trenggalek (tempe kripek, alen-alen, manco, dan geti), sale, kripek pisang, tapioka, penyulingan minyak atsiri dan lain-lain. Berdasarkan data BPS tahun 2012, industri kecil yang ada di Trenggalek sebanyak 310 dan industri kerajinan rakyat sebesar 22.138 buah.

## **2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek**

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pembentukan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Tambang dan Energi (KOPERINDAGTAMBEN) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Sejak peraturan ini berlaku, maka urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, tambang dan energi di Kabupaten Trenggalek menjadi kewenangan Dinas KOPERINDAGTAMBEN.

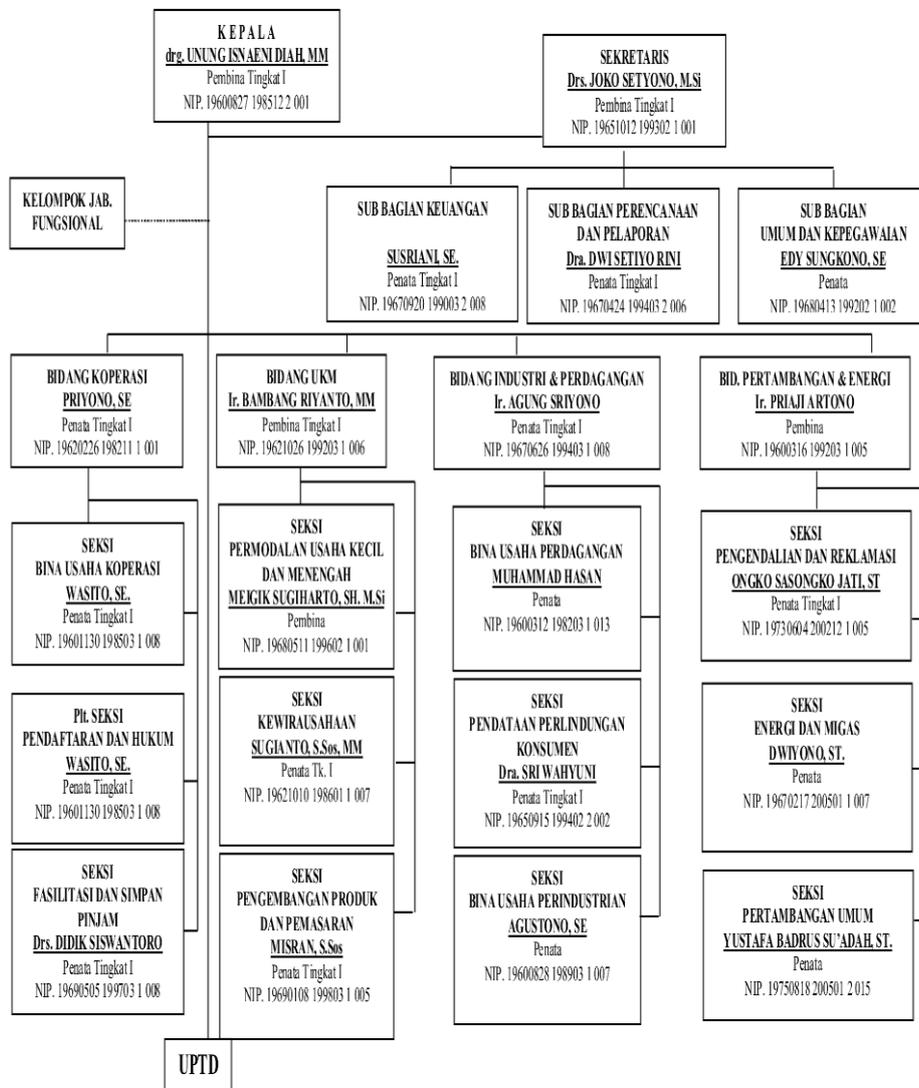
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, penentuan struktur organisasi patut mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara pimpinan dan bawahan. Struktur

organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antara pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari fungsi yang dapat menghubungkan dan menetapkan antar pegawai dalam suatu sistem kerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Struktur organisasi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Tambang dan Energi Kabupaten Trenggalek diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No.4 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:



SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOOPERASI, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN TRENGGALEK



Gambar 4. Struktur Organisasi

Sumber: www. koperindagtamben-trenggalek.com

Gambar 4 menunjukkan struktur organisasi Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Tambang dan Energi kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Kepala dinas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian Tata Usaha, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Bagian Tata Usaha dibagi menjadi tiga sub bagian: Subbag Keuangan, Subbag Perencanaan

dan Pelaporan, serta Subbag Umum dan Kepegawaian. Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Tambang dan Energi memiliki empat bidang: Bidang Koperasi, Bidang Industri dan Perdagangan, Bidang UKM, serta Bidang Pertambangan dan Energi. Masing-masing bidang masih terbagi lagi ke dalam berbagai seksi-seksi.

Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas ini adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, tambang dan energi. Fungsi dinas ini dalam rangka melaksanakan tugas tersebut adalah merumuskan program dan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, tambang dan energi.

Jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi per 31 Desember 2013 sejumlah 55 orang, yang terdiri sebagai berikut:

**Tabel 5. Jumlah Personil PNS Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek**

No	Uraian	Keterangan	Jumlah
1	Jenis Kelamin	Laki-laki = 36	55
		Perempuan = 19	
2	Pangkat/ Golongan Ruang	IV = 5	55
		III = 41	
		II = 4	
		I = 5	

Sumber: [www.koperindagtamben-trenggalek.com](http://www.koperindagtamben-trenggalek.com)

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek

berjumlah 55 orang yang keseluruhan telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Terdiri dari 36 laki-laki dan 19 perempuan. Sedangkan berdasarkan pangkat/golongan ruangnya terdiri dari golongan IV berjumlah 5 orang, golongan III berjumlah 41 orang, golongan II berjumlah 4 orang, dan golongan I berjumlah 1 orang.

### 3. Gambaran Umum desa kamulan dan Industri Kecil di Desa Kamulan

Kamulan adalah salah satu desa di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Indonesia. Letak desa ini tepatnya di ujung timur Trenggalek dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tulungagung. Sejarah Kabupaten Trenggalek bermula dari ditemukannya prasasti di desa Kamulan. Desa kamulan mempunyai luas wilayah sebesar 4,35 km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk yang ada di Kamulan pada tahun 2012 sebanyak 2548 jiwa dengan klasifikas penduduk laki-laki sebanyak 1348 jiwa dan perempuan sebanyak 1200 jiwa. Desa Kamulan saat ini merupakan salah satu kawasan dengan sentra industri genteng yang sangat besar. Hasil produksi genteng tersebut di kirim ke berbagai wilayah di sekitar Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan ada yang sampai di kirim ke pulau Bali dan Kalimantan. Penduduk di desa ini mayoritas bekerja pada bidang industri genteng.

Industri ini banyak menyerap tenaga kerja, yang umumnya dikerjakan oleh pemiliknya sendiri dengan bantuan tenaga kerja dari santri pondok yang nyambi ikut kerja. Di desa kamulan terdapat dua buah pondok pesantren besar yang banyak menarik santri dari berbagai daerah. Salah satu pondok tersebut adalah Pondok Pesantren Hidayatut Thullab, atau yang lebih di kenal dengan sebutan

pondok tengah karena lokasinya yang hampir persis di tengah-tengah desa, dan selain pondok tengah yaitu ada lagi pondok darussalam/jajar.

## **B. Penyajian**

### **1. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Industri**

#### **a. Pendanaan**

Modal merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap berkembangnya suatu usaha, dengan tersedianya modal yang cukup dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan produksi. Oleh karena itu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Diskoperindagtamben (Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi) Kabupaten Trenggalek dalam mendukung peningkatan produksi industri kecil yang ada di Trenggalek adalah dengan memberikan bantuan pendanaan atau permodalan. Terdapat berbagai macam model bantuan permodalan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas terkait. Diantaranya melalui bantuan pinjaman kredit lunak, yaitu melalui bantuan Kredit Modal Kerja dan Investasi pada tahun 2001-2003 dengan jangka waktu selama 2 tahun. Program bantuan pinjaman kredit lunak bagi industri kecil dan UKM dengan sistem dana bergulir serta bunga pinjaman sebesar 14 % per tahun untuk tahun pertama dan 12 % per tahun untuk tahun kedua. Dana pinjaman lunak tersebut merupakan dana yang digunakan untuk bantuan dana bergulir untuk pemberdayaan bantuan industri kecil dan UKM.

Hal ini seperti diungkapkan oleh NN, selaku staf bidang Industri dan Perdagangan yang mengatakan bahwa :

“Pada tahun 2001-2003 terdapat program bantuan pinjaman lunak dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Koperindagtamben berupa Kredit Modal Kerja dan Investasi bagi industri kecil dan UKM. Pinjaman ini merupakan sistem pinjaman bergulir dengan jangka waktu selama 2 tahun yang ditujukan untuk memberdayakan usaha industri kecil dan UKM. Pada tahun 2004-2005 pemerintah tidak menyediakan dana pinjaman lunak. Tetapi pada tahun 2006-2007 pemerintah menyediakan dana pinjaman lunak berupa Kredit Modal Kerja (KMK) yang langsung dikelola oleh Pemerintah Kabupaten melalui Sekretariat Daerah (Sekda) bidang Perekonomian. Sedangkan untuk saat ini, bantuan yang diberikan pemerintah yaitu menggunakan subsidi bunga lunak, dimana bunga yang diberikan pemerintah daerah dilakukan melalui kredit di bank.” (wawancara hari Selasa tanggal 4 Maret 2014, pukul 09.00 wib, di kantor Dinas Koperindagtamben)

Hal senada juga diungkapkan oleh AS selaku Kabid Industri dan Perdagangan Dinas Koperindagtamben, :

“Dulu ada kredit langsung kepada pengusaha IKM, dan sekarang ada program bantuan subsidi bunga. Tapi bukan melalui disperindag saja, yang pasti atas nama pemerintah kabupaten di bagian perekonomian. Subsidi bunga yaitu mengajukan pinjaman ke bank misal dengan bunga 16%, kemudian mengajukan proposal kepada pemerintah sehingga disubsidi oleh pemerintah misal 6%, sehingga bunganya tinggal 10%. Yang narik tetap bank. Dari pemerintah pusat juga ada KUR untuk IKM (subsidi bunga tapi langsung melalui pemerintah).” (wawancara hari Selasa tanggal 4 Maret 2014, pukul 09.00 wib, di kantor Dinas Koperindagtamben)

Bantuan subsidi bunga merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dengan pihak bank, agar dapat dimanfaatkan oleh pengusaha kecil sebagai sarana untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan usahanya. Model bantuan ini yaitu dengan meminjam ke bank dengan bunga pinjaman sesuai dengan keputusan

dari pihak bank. Akan tetapi para pengusaha kecil dapat meminta bantuan keringanan dari pemerintah dengan mensubsidi bunga pinjaman yang telah diputuskan pihak bank. Namun, supaya pemerintah dapat mensubsidi bunga pinjaman dari bank, para pengusaha harus mengajukan proposal terlebih dahulu, setelah itu pemerintah akan memberikan subsidi bunga. Tujuan yang ingin dicapai dari program pemerintah ini yaitu agar para pengusaha kecil tidak mengalami kesulitan permodalan, sehingga bisa memajukan usahanya.

Dalam pelaksanaannya, upaya yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Koperindagtamben dalam memberikan kemudahan untuk akses permodalan, masih belum mencapai target yang diharapkan, salah satunya seperti pada para pengrajin industri yang ada di Desa Kamulan. Masyarakat desa Kamulan, yang mayoritas berprofesi sebagai pengrajin industri belum merasakan dampak dari adanya program yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal permodalan.

Hal ini berkaitan dengan enggannya masyarakat untuk mengajukan pinjaman kepada pihak bank, karena harus membutuhkan jaminan yang besar untuk bisa melakukan pinjaman terhadap pihak bank, meskipun ada wacana dari pemerintah untuk membantu meringankan kredit dari bank tersebut melalui program bantuan subsidi bunga lunak yang menjadi program pemerintah. Bahkan ada juga sebagian di antara mereka yang tidak tahu mengenai program bantuan permodalan melalui subsidi bunga dari pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pengrajin genteng, JN yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah melakukan pinjaman ke bank, dan usaha ini berjalan dengan modal saya sendiri. Hasil yang saya dapat sebagian saya tabung untuk jadi modal membesarkan usaha pembuatan genteng ini sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya

bisa membeli truck, meskipun bekas. Untuk bisa melunasinya dengan kredit, sampai sekarang saya sudah punya 2 truck masing-masing membelinya masih bekas dan 1 mobil pribadi yang membeli baru. Saya tidak tahu tentang program dari pemerintah seperti kredit lunak dan subsidi bunga. Modal yang saya gunakan dalam usaha ini juga berasal dari dana pribadi.” (wawancara hari Jum’at tanggal 7 Maret 2014)

Hal senada juga diungkapkan oleh pengrajin lain, seperti yang diungkapkan oleh IM :

“Saya tidak pernah mengetahui informasi tentang program bantuan dana yang diusung oleh pemerintah, seperti yang mas bilang (subsidi bunga). Sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan usaha industri genteng ini saya usahakan secara mandiri dan tidak melakukan pinjaman dari manapun. Selain industri genteng, saya juga menjalankan bisnis sewa mobil untuk mencukupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan industri genteng saya.” (wawancara hari Minggu Tanggal 9 Maret 2014)

Sebagian besar para pengrajin di desa Kamulan tidak mengetahui program bantuan permodalan bagi para pelaku industri yang diusung oleh pemerintah. Mereka hanya lebih berfokus pada bagaimana cara menjalankan industri, menjual produknya dan menggunakan hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta dijadikan modal memenuhi kebutuhan dalam proses pembuatan produksi selanjutnya. Sebagian lainnya juga takut jika melakukan pinjaman ke bank, nantinya mereka tidak bisa melunasi pinjamannya. Sehingga untuk mencukupi kekurangan dana yang digunakan sebagai modal produksi, mereka lebih memilih meminjam kepada saudara sendiri daripada ke bank meskipun ada bantuan subsidi bunga dari pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh SS sebagai pelaku industri lokal yang mengatakan bahwa:

“saya tidak pernah melakukan pinjaman ke bank mergo wedi ra iso nglunasi (sebab takut jika tidak bisa melunasi) mas karena yang mempunyai dan menjalankan produksi genteng ini sudah tua/berumur, sehingga tidak berani melakukan pinjaman ke bank. Dana yang diperlukan untuk proses produksi ini berasal dari sendiri dan usaha mandiri. Jika ada kekurangan, saya akan meminjam kepada saudara-saudara saya.” (wawancara hari Minggu tanggal 9 Maret 2014)

Senada dengan hal tersebut SJ juga mengatakan hal yang sama, yaitu:

“saya belum pernah melakukan pinjaman kepada bank. Ngene iki yo ndak ngerti programe soko pemerintah mas, pengene yo iso dibantu ngono (begini juga tidak tahu program dari pemerintah seperti apa, inginnya juga bisa dibantu oleh pemerintah).

Modal yang digunakan juga dengan dana pribadi, apabila ada kekurangan maka saya akan meminjam ke saudara.” (wawancara hari Minggu tanggal 9 Maret 2014)

Sebagian pengrajin lain juga sudah melakukan pinjaman kepada lembaga-lembaga lain, sehingga program bantuan dari pemerintah belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh SM yang mengatakan bahwa :

“saya tidak pernah melakukan pinjaman dengan program yang diusung oleh pemerintah. Dana yang saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan pembuatan genteng baik untuk bahan baku dan sebagainya atau modalnya dari kemampuan pribadi, dan tidak ada pinjaman bank atau program dari pemerintah untuk mempermudah. Akan tetapi saya melakukan pinjaman dari P2KK..” (wawancara hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014)

Ungkapan senada juga diucapkan oleh AW, yang juga salah satu pengrajin industri di Kamulan, beliau ikut dalam kelompok uang uap 100. Beliau mengatakan bahwa :

“saya tidak pernah melakukan pinjaman permodalan yang menjadi program pemerintah, akan tetapi saya ikut dalam

kelompok uang up 100. Dana yang diperlukan untuk modal dan memenuhi kebutuhan produksi genteng ini berasal dari mandiri. Melakukan pinjaman (hutang pribadi) untuk modal dan dengan jaminan rumah. Tapi belum pernah melakukan pinjaman dengan program yang diusung oleh pemerintah.” (wawancara hari Senin tanggal 10 Maret 2014)

Penjelasan lain juga diutarakan oleh MK, yang pernah melakukan pinjaman dengan program Kredit Usaha Rakyat, yang dalam iklannya tanpa syarat dan jaminan, seperti yang diungkapkan berikut :

”Pernah sekali melakukan pinjaman yaitu dengan melakukan pinjaman pada KUR dengan jangka waktu 2 tahun. Melihat iklan di media dimana peminjaman bisa dilakukan tanpa ada syarat, jadi saya ikut melakukan pinjaman. Tapi pada prosesnya ada jaminan yang harus diberikan yaitu dengan memberikan jaminan BPKB. Setelah itu saya tidak pernah lagi melakukan pinjaman, dan lebih memilih menggunakan modal mandiri.” (wawancara hari Senin tanggal 10 Maret 2014)

Wawancara dari para pengrajin industri di desa Kamulan dapat menjelaskan bahwa program yang diusung pemerintah dalam upaya untuk memberdayakan para pengrajin industri melalui bantuan permodalan atau pendanaan belum banyak diketahui oleh para pengrajin industri di desa Kamulan. Sehingga para pengrajin di Kamulan lebih memilih menggunakan modal sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk proses produksinya. Jika ada kekurangan modal, maka mereka lebih memilih untuk meminjam kepada saudara-saudaranya.

#### **b. Pendidikan dan Pelatihan**

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kemajuan industri kecil. Manusia mempunyai peran untuk menggerakkan kegiatan usaha menjadi lebih berkembang. Teknologi yang

semakin maju saat ini merupakan hasil dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, yaitu masyarakat yang mempunyai ketrampilan, mempunyai pandangan yang luas mengenai ilmu pengetahuan serta mental untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dan ikut berperan dalam pembangunan dengan segala kemampuan dan upayanya. Dengan demikian dalam pemberdayaan industri kecil, pemerintah mengharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Setiap tahun Pemerintah Daerah Trenggalek melalui Diskoperindagtamben berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengusaha industri kecil yang ada di Trenggalek. Upaya yang dilakukan oleh diskoperindagtamben adalah dengan memberikan pembinaan dan pelatihan terutama bagi setiap pembentukan kelompok baru, seperti yang diungkapkan oleh BR selaku kabid UKM yang mengatakan bahwa:

“setiap pembentukan kelompok baru, pasti diadakan pelatihan-pelatihan. Jika sudah dilatih, akan difasilitasi dalam bentuk bantuan peralatan. Ada pelatihan dan bantuan peralatan untuk peningkatan produksi. Kelompok baru ini merupakan kelompok yang memanfaatkan potensi yang ada untuk dapat dijadikan sumber penghasilan, dan dapat menumbuhkan iklim usaha serta wirausaha baru. Pelatihan yang dilaksanakan seperti pelatihan barcode, desain kemasan, penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan produksi, dan lain-lain.”  
(wawancara hari Selasa 4 Maret 2014 pukul 09.30 wib, di Dinas Koperindagtamben)

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:

“Yang dilakukan skg mengarah kepada peningkatan kualitas produksi dan bukan pada peningkatan kuantitas. Kuantitasnya, trenggaek tidak kurang dari 100 jenis produk yang dihasilkan ukm. Tapi jika dilihat dari pasarnya itu jenuh, pada pasca itu sendiri. Untuk pasar lokal sejumlah 45 jenis usaha itu jenuh.

Jenuh karena jika ditambah kuantitasnya tapi bukan kualitasnya tidak akan bisa masuk ke pasar modern dan itu sangat sulit. Contohnya dari pasar pon jika ingin masuk ke alfamart atau indomart itu permintaannya harus bersertifikat terlebih dahulu, ada bar codenya, bersertifikat halal. Ini yang mau difasilitasi pemerintah untuk menggeser pasar lokal menjadi pasar modern. Bentuk penggeserannya seperti bersertifikat atau peningkatan kualitas.” (wawancara hari Selasa 4 Maret 2014 pukul 09.30 wib, di Dinas Koperindagtamben)

Senada dengan hal itu AS selaku Kabid Perindustrian dan Perdagangan

juga mengatakan bahwa :

“Regulasi produk hukum tentang industri kecil di Trenggalek tidak muncul, tetapi kita dalam pembinaan selalu memunculkan bahwa kita memang peduli terhadap IKM, bahwa kita memunculkan pembinaan-pembinaan setiap tahunnya terhadap pertumbuhan dan pengembangan IKM kan ada, kebijakannya itu. Seperti tanggal 6 ini akan ada 40 masyarakat yang mengikuti pelatihan kemasan. Pelatihan yang lain seperti pelatihan penggunaan teknologi yang baru.” (wawancara hari Selasa 4 Maret 2014 pukul 09.00 wib, di Dinas Koperindagtamben)

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui

Diskoperindagtamben dititikberatkan pada beberapa hal antara lain:

- 1) Pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang bertujuan untuk memperoleh tenaga terdidik dan terampil yang bersifat *technical skill*, dan diharapkan dengan adanya pelatihan ini nantinya dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi sesuai dengan permintaan pasar. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan bermacam-macam materi seperti:
  - a) *Diversifikasi* (inovasi dan penganeekaragaman) bentuk produk dan kemasan produk;
  - b) Pembuatan produk yang berkualitas dan bernilai jual;
  - c) Pemilihan dan penggunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan produksi.
- 2) Memberikan bimbingan dan penyuluhan, meliputi hak paten merek, manajemen usaha (pembagian tugas dan fungsi) dan manajemen keuangan. Bimbingan dan penyuluhan ini bertujuan

agar para pengusaha industri kecil mampu mengatur manajemen perusahaannya atau tenaga yang bersifat *managerial skill*. (sumber: profil IKM Kabupaten Trenggalek 2013)

Adanya pembinaan Sumber Daya Manusia diharapkan dapat meningkatkan kemampuan manajemen pengusaha industri kecil. Selain itu juga dengan adanya pembinaan dapat meningkatkan profesionalisme dan ketrampilan teknis dalam membuat hasil produksi yang berkualitas, serta bertujuan untuk meningkatkan jumlah wirausahawan baru.

Namun dalam faktanya, pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pelaku industri kecil belum dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat, terutama di desa kamulan yang terkenal sebagai desa kawasan sentra indsutri genteng. Sebagian para pengusaha industri kecil di desa kamulan belum merasakan pelatihan maupun pembinaan yang dilakukan dari pemerintah, seperti yang diungkapkan oleh AW, salah satu pengrajin industri genteng di desa kamulan yang mengatakan bahwa “belum pernah ada pembinaan atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah. Jikapun ada itu hanya survey untuk surat ijin terhadap industri yang dimiliki saja”. (wawancara hari senin 10 maret 2014).

Sementara itu JN, sebagai salah satu pengrajin genteng di desa Kamulan, mengungkapkan bahwa pernah ada pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi itu berlangsung beberapa tahun yang lalu. Seperti yang beliau katakan bahwa :

“pada dahulu, tepatnya tahun berapa saya lupa, pernah mendapatkan pelatihan/pembinaan, tetapi gagal. Untuk pemasaran pernah dibina oleh pemerintah dengan mengadakan

pameran-pameran, dan kita membuat replika genteng besar yang dipasang sebagai contoh dalam pameran dengan kualitas yang baik untuk bisa menarik konsumen yang datang. Akan tetapi masyarakat lebih memilih melakukan pemasaran dengan cara pribadi sendiri.” (wawancara hari Jum’at tanggal 7 Maret 2014)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh IM, yang menyatakan bahwa pernah ada pelatihan tentang bagaimana cara ngobong (membakar) namun hanya diwakili tidak menyeluruh, seperti yang dikatakannya:

”pernah dilakukan pembinaan yaitu cara ngobong. Peserta yang diambil secara acak dan tidak keseluruhan. Pembinaan dilakukan dengan memilih secara acak peserta dimaksudkan untuk nantinya ilmu yang didapat bisa disalurkan kepada para pengrajin lain di desa kamulan, akan tetapi hal itu menjadi sia-sia, sebab prinsip budaya masyarakat lek wes bar yo wes (kalau sudah selesai ya sudah, tidak ada kelanjutannya).” (wawancara hari Minggu tanggal 9 Maret 2014)

Dari pemaparan IM tersebut bisa dipahami bahwa pelaksanaan pembinaan atau pelatihan oleh pemerintah dilakukan dengan cara mengambil peserta dari para pengrajin secara acak, dan nantinya setelah dilakukan pelatihan diharapkan peserta dapat menyalurkan ilmunya kepada pengrajin lain. Akan tetapi hal itu tidak terlaksana secara maksimal, karena prinsip dari masyarakat sendiri yang beranggapan bahwa jika sudah diadakan pelatihan ya sudah, tidak ada langkah terus ke depannya.

### **c. Teknologi**

Teknologi merupakan salah satu modal utama dalam sebuah proses produksi. Teknologi yang semakin maju dan tepat guna bisa menghasilkan kualitas produksi yang lebih baik. Sehingga keberadaan teknologi menjadi salah

satu faktor penting dalam berkembangnya sebuah usaha industri terutama industri kecil. Teknologi yang digunakan para pengusaha industri di Trenggalek sebagian besar masih menggunakan tradisional.

Pemerintah memberikan bantuan dalam rangka peningkatan kualitas produksi dengan memfasilitasi bantuan teknologi atau sarana produksi agar lebih modern, dan bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Seperti yang dikatakan oleh BR, selaku Kabid UKM Dinas Koperindagtamben bahwa “Permasalahan yang dihadapi seluruh IKM adalah proses produksi, yang sekarang masih tradisional, pemerintah memfasilitasi untuk lebih modern dengan bantuan peralatan sarana produksi.” (wawancara hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 pukul 09.30 wib, di Dinas Koperindagtamben).

Selebihnya AS selaku Kabid Perindustrian dan Perdagangan, juga mengatakan bahwa:

“Untuk bantuan teknologi, setiap tahun kita memberikan bantuan hibah peralatan yang diminta oleh masyarakat. Setelah ada bantuan, perbedaan pasti ada, dan yang jelas pasti meningkat. Contoh mesin penggilas tanah. Yang dulunya gawe sikil, setelah mendapat mesin penggiling tanah produksinya pasti tambah. Yang lain alen-alen dulunya dengan tangan sekarang dengan bantuan cetakan mie. Bantuan diberikan karena ingin meningkatkan produksi yang dulu tradisional dengan tangan sekarang dengan mesin. Kita menghitung dampak yang dihasilkan bukan dari pendapatan tapi dari segi produksi.” (wawancara hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 pukul 09.00 wib, di Dinas Koperindagtamben)

Namun usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas produksi melalui bantuan teknologi ini belum sepenuhnya terealisasi di sentra-sentra industri. Seperti di desa Kamulan yang merupakan salah satu pusat sentra industri

genteng, para pengrajinnya belum mendapatkan bantuan berupa teknologi atau peralatan untuk menunjang proses produksi mereka dari pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh SM sebagai salah satu pelaku industri, bahwa “saya tidak pernah mendapatkan bantuan peralatan atau sarana prasarana dari pemerintah, semua peralatan dan keperluan yang dibutuhkan untuk membuat genteng dilakukan dan dipenuhi secara mandiri, tanpa bantuan dari pemerintah setempat.” (wawancara hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014)

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh JN, beliau menganggap bahwa jika ingin mendapatkan bantuan harus membuat proposal dan itu terlalu merepotkan, serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Seperti yang beliau katakan, bahwa

“saya tidak pernah mengajukan bantuan dari pemerintah, karena prosesnya terlalu ribet (rumit). Untuk mengajukan harus menggunakan proposal terlebih dahulu agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Durung mesti proses yo iso cepet (belum tentu prosesnya juga bisa cepat). Selama menjalani usaha industri genteng ini, saya tidak pernah sekalipun mendapat bantuan dari pemerintah.” (wawancara hari Jum’at tanggal 7 Maret 2014)

Ada juga pengrajin yang sudah mencoba mengajukan bantuan peralatan kepada pemerintah, supaya bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi industri gentengnya, akan tetapi belum pernah terealisasi. Seperti yang diungkapkan oleh IM bahwa:

”semua kebutuhan yang diperlukan dalam proses industri ini dipenuhi dengan usaha sendiri dan belum ada bantuan dari pemerintah. Belum tersentuh bantuan pemerintah sama sekali. Saya pernah mencoba mengajukan bantuan berupa mesin hidrolis agar bisa meningkatkan jumlah produksi yang dihasilkan, tapi ndak turun-turun (belum terealisasi).

Mungkin karena pengajuan proposal yang digunakan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah tidak mendapat pendampingan/tidak ada yang mendampingi. Bantuan belum pernah ada, dan jarang ada masyarakat yang mencoba mendekati pemerintah. Bantuan lebih banyak tersebar ke daerah gandsari, dimana dari adanya program bantuan itu pasti ada unsur tersembunyi dibaliknya, mungkin juga politik. Masyarakat gandsari juga lebih dekat dengan pemerintah daripada masyarakat daerah kamulan. Saya mencoba mengajukan bantuan mesin hidrolis karena dengan menggunakan mesin maka produksi yang dihasilkan juga akan meningkat  $\pm 2$  kali lipat dari penggunaan cetakan besi manual. Jika membeli sendiri harganya cukup mahal dan masih diperlukan biaya juga untuk yang lainnya.” (wawancara hari Minggu tanggal 9 Maret 2014)

Hal senada juga diungkapkan oleh AW, yang menyatakan bahwa belum pernah ada realisasi dari bantuan yang pernah diajukannya. Lebih lengkapnya beliau mengatakan bahwa:

”saya belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah, tetapi sudah pernah mengajukan bantuan berupa alat cetakan yakni mesin hidrolis, pengaduk adonan, stang press. Sampai saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah mengenai pengajuan yang saya lakukan. Proposal sudah saya buat dan saya serahkan melalui DPR yang ada di desa Kamulan sini, tapi sampai saat ini realisasi dari bantuan itu belum ada.” (wawancara hari Senin 10 Maret 2014)

Berdasarkan dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa teknologi atau sarana peralatan yang digunakan untuk meningkatkan hasil produksi, memang menjadi modal utama dalam proses produksi sebuah industri. Namun program bantuan yang coba difasilitasi pemerintah melalui bantuan peralatan seperti yang diungkapkan oleh Kabid UKM, belum bisa terealisasi secara maksimal.

#### d. Pemasaran

Pemasaran adalah salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam perkembangan usaha, disamping aspek produksi. Perlu dibutuhkan adanya teknik tertentu dalam pemasaran agar proses penjualan bisa meningkat. Perilaku konsumen dan pesaing juga patut untuk dipertimbangkan dalam proses pemasaran agar kita tahu cara yang harus dilakukan untuk memasarkan produk yang kita hasilkan bisa tetap laku di pasaran. Begitu juga bagi pelaku industri kecil di Kabupaten Trenggalek, pemerintah mencoba menjembatani para pengusaha industri dengan konsumen, salah satunya melalui pameran yang dilakukan seperti yang dikatakan oleh AS selaku kabid Industri dan Perdagangan,

“Dalam proses pemasaran, kita setiap tahun melakukan pameran. Kita memfasilitasi untuk menjembatani antara pengusaha trenggalek dengan calon pembeli melalui pameran. Kemudian ada pasar lelang yang bekerjasama dengan disperindag propinsi. Kemudian pemerintah memfasilitasi Pasarnya dalam bentuk kemitraan dengan pengusaha di luar kabupaten trenggalek.” (wawancara hari Selasa 4 Maret 2014, pukul 09.00, di Dinas Koperindagtamben)

Pemerintah mencoba memfasilitasi hubungan antara pengusaha dan konsumen melalui pameran agar produk yang dihasilkan bisa dikenal luas oleh masyarakat. Hal ini senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh JN yang menyatakan bahwa pernah dilakukan adanya pembinaan pemasaran, yaitu dengan cara pameran dimana para pengusaha industri genteng membuat replika genteng yang besar dan berkualitas untuk di pameran. Akan tetapi masyarakat lebih senang melakukan proses pemasaran dengan caranya sendiri, seperti yang beliau katakan:

“Cara pemasaran yang dilakukan biyen mubeng, golek panggon dewe-dewe, nyang Kalimantan, bali, jawa timur, terutama malang. Enek galangane neng kutho-kutho. Tapi sakiki wes tuwek kari masang neng omah, dijejer. Mengko diparani seng golek gendeng dewe, utowo lewat telfon. Infone yo luweh cepet kesebar lewat omongan soko wong siji nyang sijine mergo kualitaseng apik. Kualitas lebih dikedepankan untuk mendapatkan kepercayaan dari para konsumen. (Pemasarannya dulu dilakukan dengan mencari tempat sendiri-sendiri seperti Kalimantan, Bali, Jawa Timur, terutama malang, dan ada galangannya di setiap kota-kota yang disinggahi. Tetapi sekarang karena umur yang sudah tua sehingga proses pemasarannya hanya dengan meletakkan di halaman rumah, dipasang berjajar dan nantinya akan diambil sendiri oleh konsumen yang membutuhkan genteng tersebut, atau melalui telfon. Selain itu info yang cepat menyebar saat ini adalah dengan omongan dari mulut ke mulut dengan kualitas yang sudah terpercaya.)” (wawancara hari Jum’at tanggal 7 Maret 2014)

Pasar dari industri genteng ini, biasanya sudah memiliki konsumen yang tetap, dan dikirim ke berbagai daerah. Terkadang juga akan diambil sendiri oleh konsumen dari berbagai daerah, seperti yang diungkapkan oleh MK:

“Pasarnya yakni dikirim ke lamongan, selain itu juga ada pesanan yang datang lewat telfon. Terkadang juga pembeli datang langsung ke tempat produksi dan memesan genteng yang dibutuhkan. Selain itu pemasaran dilakukan dengan berdasarkan galangan-galangan yang ada di berbagai kota, seperti blitar, malang, ponorogo, bali.” (wawancara hari Senin 10 Maret 2014)

Hal senada juga diungkapkan oleh IM, yang memiliki industri secara turun temurun dari warisan orang tua, mengatakan bahwa:

“karena ini merupakan usaha turun-temurun maka untuk pemasarannya sudah ada yang mengambil barang/gentengnya sendiri. Juga ada inisiatif sendiri dari para pengrajin yang mempromosikan produk gentengnya lewat media internet. Selain itu pasarnya juga berada di kamulan, karena desa kamulan sudah terkenal dengan industri gentengnya. Apabila

stok genteng habis, maka akan diambil dari daerah industri genteng lain, yaitu gandusari tapi tetap konsumen mengenalnya bukan sebagai genteng gandusari tetapi genteng kamulan. daerah gandusari juga banyak yang menjual genteng di kamulan meskipun membuatnya bukan di kamulan, sehingga desa kamulan dikenal sebagai desa industri genteng. Selain itu pemasarannya juga pada galangan yang ada di kota-kota lain seperti malang, bali.” (wawancara hari Minggu tanggal 9 Maret 2014)

Penjelasan dari wawancara dengan IM, dapat dipahami bahwa saat ini para pengusaha lebih maju dalam memasarkan produknya, salah satunya dengan cara memasarkan produk yang dihasilkan melalui media internet, selain media pamflet, dan kartu nama. Hal lain juga diungkapkan oleh SJ dimana pasar dari industri genteng akan meningkat jika terjadi pembangunan atau renovasi gedung-gedung yang dilakukan pemerintah seperti yang beliau katakan :

“Pasar penjualannya yaitu ada pada galangan-galangan yang ada di berbagai kota seperti nganjuk, jember, malang, kepanjen. Selain itu juga ada pembeli yang langsung datang mengambil genteng di rumah. Pasar yang ada juga tergantung dari situasi dan kondisi, penjualan genteng akan cepat apabila pemerintah sudah mulai melakukan pembangunan, seperti melakukan renovasi dan pembangunan gedung-gedung baru. Jika tidak ya penjualan agak terhambat.”(wawancara hari Minggu tanggal 9 Maret 2014)

Dari wawancara dengan SJ, dapat dijelaskan bahwa pasar industri genteng ini bisa lebih meningkat apabila terjadi pembangunan, dan beliau berharap selalu ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu lancarnya penjualan juga karena kondisi yang ada, seperti tuntutan atau pesanan setelah adanya bencana alam yang datang secara tiba-tiba sehingga genteng menjadi produk yang dicari untuk merenovasi rumah-rumah yang terkena

bencana. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh AB, yang merupakan pengrajin industri dupa yang mengatakan bahwa “Pemasarannya yaitu ke Bali dan Surabaya. Surabaya akan diambil sendiri sedangkan ke Bali dilakukan melalui proses pengiriman. Barang akan dikirim/diambil jika sudah memenuhi kuota produksi yaitu sebesar 1 ton.” (wawancara hari Senin tanggal 10 Maret 2014). Pasar bagi para pelaku industri di desa kamulan sebagian besar diambil sendiri oleh para konsumen, dan sebagian di kirim ke berbagai kota di luar Trenggalek.

#### **e. Perijinan.**

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat telah menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan menjadi pelayanan perijinan satu atap (*one stop service*) yang dimulai sejak tahun 2006. Hal ini semata-mata adalah untuk memberikan kemudahan persyaratan dalam memperoleh perijinan, termasuk bagi para pengusaha industri kecil. Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Kantor Perijinan dan Penanaman Modal (KPPM) telah melaksanakan kegiatan operasional yang dapat menciptakan mekanisme pelayanan perijinan yang sesuai dengan prosedur pelayanan prima dalam perijinan. Pelimpahan semua urusan perijinan ke dalam satu SKPD sesuai dengan pernyataan yang diutarakan oleh Kabid UKM, “Pengurusan surat ijin sekarang menjadi satu atap yaitu di kantor perijinan. Jika yang menandatangani surat ijin ada, satu hari saja sudah jadi. Tapi biasanya badan usaha pasti ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi pada hari itu, dan lamanya proses perijinan bisa selesai antara 1-7 hari.” (wawancara hari Selasa tanggal 4 Maret 2014, pukul 09.30 wib, di Dinas Koperindagtamben)

Penjelasan serupa juga diungkapkan oleh AW, selaku petugas lokal dari KPPM, yang mengatakan bahwa:

“pada prinsipnya lamanya perijinan adalah 5 hari meliputi TDI/IUI (Tanda Daftar Industri/Ijin Usaha Industri), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Target 5 hari ini sesuai dari target KPPM setempat, jika semua persyaratan yang dimiliki oleh pemohon sudah lengkap dari segi IJK (Ijin Usaha Konstruksi), IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), dan HO (Ijin Gangguan Kesehatan dan Lingkungan).” (wawancara hari Selasa tanggal 4 Maret 2014, pukul 11.00 wib, di KPPM)

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa :

“untuk menerbitkan ijin usaha bagi sebuah usaha atau industri meliputi TDI, SIUP dan TDP maka pemohon harus memiliki SITU. Sedangkan untuk syarat pengajuan SITU pemohon atau pengusaha harus memiliki IMB terlebih dahulu. Jika pemohon sudah memiliki IMB dan SITU maka penerbitan ijin usaha bagi industri akan cepat keluar sebagaimana target dari KPPM”. (wawancara hari Selasa tanggal 4 Maret 2014, pukul 11.00 wib, di KPPM)

Lamanya proses perijinan selama 1-7 hari senada dengan apa yang diutarakan oleh IM, yang pernah mengurus surat perijinan namun belum diambil karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengambilnya, seperti yang beliau katakan bahwa:

”saya sudah membuat dan sudah jadi tetapi belum sempat diambil, karena membutuhkan biaya untuk mengambilnya. Biaya yang dibutuhkan sebesar 500 ribu. Jangka waktu yang dibutuhkan kurang lebih antara 1hari-1 minggu untuk mengurus perijinan mendirikan industry kecil.” (wawancara hari minggu tanggal 9 Maret 2014)

Namun masih banyak juga masyarakat yang tidak memiliki surat ijin bagi industri mereka terutama di desa Kamulan, karena mereka beranggapan

bahwa mempunyai surat ijin maupun tidak itu sama saja dan tidak berpengaruh apapun bagi industrinya. Seperti yang diungkapkan oleh JN, yang merupakan salah satu pengusaha industri genteng :

“saya pernah mengurus perijinan pada tahun 1990’an dulu. Tetapi sekarang tidak tahu masih berlaku atau tidak. Menggunakan perijinan atau tidak itu sama saja, karena tidak berpengaruh apapun terhadap usaha industri ini. Membuat surat ijin baru juga membutuhkan uang.” (wawancara hari Jum’at tanggal 7 Maret 2014)

Hal senada juga diungkapkan oleh BR selaku Kabid UKM, yang menjelaskan jika minat dari masyarakat untuk mengurus surat perijinan masih kurang, dan tanpa surat ijinpun bisa mendirikan usaha industri, seperti yang dikatakannya:

“Tapi kadang-kadang minatnya masih kurang, ngene ae uwes to pak, nyapo kog repot-repot (begini saja sudah kok pak, kenapa mesti repot-repot). Kita dan pemerintah ingin merubah image seperti itu, dan menambah wawasan kepada masyarakat untuk bisa berfikir bukan untuk lingkungan sekitarnya atau pasar sekitarnya. Kita mencoba mengarah kepada pasar lebih modern, pasar lebih luas. Menciptakan iklim usaha yang kondusif itu artinya seperti itu, jadi bisa berfikir tidak hanya lokal, tetapi bisa kepada pasar yang lebih luas lagi.” (wawancara hari Selasa tanggal 4 Maret 2014, pukul 09.30 wib, di Dinas Koperindagtamben)

Berdasarkan wawancara dengan BR, dapat dipahami bahwa pemerintah ingin merubah image dari para pengusaha industri di Trenggalek supaya memperhatikan usaha mereka dengan menambah wawasan mereka agar usahanya bisa mengarah ke pasar yang lebih modern lagi, dan tidak tradisional dengan salah satu caranya yaitu membuat surat ijin usaha. Adanya surat ijin usaha akan memudahkan produk dari usaha mereka untuk bisa masuk dalam pasar modern.

## 2. Hasil Pemberdayaan

### a. Perkembangan Industri Kecil

Kamulan merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengrajin industri. Beberapa jenis industri yang ada di Kamulan antara lain yaitu industri tanah liat (genteng), industri dupa, industri kain pantai, serta industri meubel. Industri yang berkembang di desa Kamulan yaitu industri genteng, dimana industri ini sudah menjadi usaha industri yang turun temurun. Berkembangnya industri genteng yang ada di Kamulan juga ditandai dengan jumlah para pengrajin yang ada. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, jumlah kerajinan industri genteng yang ada di Kamulan pada tahun 2013 yaitu sebanyak 418 kerajinan industri dengan para pekerja sebanyak 1443 orang.

Perkembangan dari industri genteng di Kamulan ini juga disertai dengan kualitas produk yang unggulan. Dalam sebuah pengujian yang di adakan di Surabaya kualitas genteng dari desa Kamulan ini tidak kalah dengan kualitas dari daerah lain, terbukti genteng dari daerah kamulan merupakan genteng dengan kualitas sangat baik. Seperti apa yang diungkapkan oleh JN, “Genteng yang dihasilkan juga mempunyai kualitas no 2 saat dilakukan pengetesan di Surabaya. (wawancara hari Jum’at tanggal 7 Maret 2014)”

Perkembangan industri ini di dukung dengan letak strategis daerah Kamulan yang berada diantara jalur utama penghubung antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung serta kabupaten-kabupaten lainnya.

Melihat tempatnya yang strategis, membuat pangsa pasar dari industri ini juga bisa berjalan dengan baik, dimana hasil produksi dari industri ini selain di pasarkan di daerah Kamulan sendiri, produknya juga dikirim ke daerah-daerah lain di luar Trenggalek seperti Kalimantan, Bali, Blitar, Surabaya, Ponorogo, serta Malang. Akses jalur yang mudah juga memudahkan untuk berkembangnya industri ini. Selain itu industri dupa juga mempunyai pangsa pasar yang cukup bagus. Dimana hasil dari pengolahan dupa ini nantinya akan di kirim ke Surabaya dan Bali. Produk olahan dari industri ini sudah dipesan sebelumnya oleh para pelanggan, sehingga setiap selesai proses pembuatan dan sudah mencapai jumlah 1 ton makan akan langsung di kirim ke daerah-daerah lain seperti di Surabaya dan Bali.

Keberadaan industri yang ada di desa Kamulan menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat di desa Kamulan, karena mayoritas penduduknya yang bekerja sebagai para pengrajin industri. Perkembangan industri di desa Kamulan saat ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri, dan peran dari pemerintah yang seharusnya diharapkan mampu mengembangkan industri di Kamulan masih belum terlihat begitu optimal.

#### **b. Perijinan**

Surat ijin bagi sebuah industri merupakan suatu hal yang penting, karena dengan adanya surat ijin, dapat diketahui tingkat keberadaan suatu industri dan juga produk yang dihasilkan. Selain itu dengan mempunyai surat ijin, sebuah industri bisa bersaing di pasar yang lebih modern lagi seperti yang telah diungkapkan oleh BR selaku Kabid UMKM Diskoperindagtamben Kab.

Trenggalek. Beliau juga mengatakan bahwa pemerintah mencoba untuk memfasilitasi masyarakat pelaku industri agar mau untuk membuat surat ijin demi kelangsungan produknya agar bisa bersaing di pasar yang lebih luas lagi, akan tetapi pemahaman dari sebagian masyarakat masih kurang dan beranggapan tidak begitu memerlukan adanya surat ijin.

Kondisi ini sama halnya dengan keberadaan industri yang ada di desa Kamulan. Sebagian besar penduduk yang memiliki industri kerajinan tidak mempunyai surat ijin. Mereka beranggapan bahwa, tanpa adanya surat ijinpun proses kelangsungan produksi ini tetap bisa berjalan dengan baik. Selain itu kontrol dari pemerintah juga tidak ada, sehingga kenapa harus repot-repot membuat surat ijin. Pernyataan ini diungkapkan oleh sebagian masyarakat yang memiliki industri kerajinan di Kamulan, seperti JN, MK, SM.

Tetapi ada juga masyarakat yang memiliki ijin dari keberadaan industri kerajinan yang dimiliki. Minoritas masyarakat di Kamulan yang memiliki surat ijin atas usahanya dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 6. Tabel Industri yang Memiliki Surat Ijin**

<b>Nama Industri</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Nama Produk</b>
Ud Mantalia	Muharor	Mixer
Nova Indah	Dra.H. Riya C	Kain Pantai, Dupa
Ud Abadi Sakti	Rohmat	Karet busa
Pangestu Ibu	Subhan Maliki	Kusen, daun pintu, daun jendela
Fithroh	Isma	Setelan lainnya wanita dari serat sintetik
Ud. Ultra	Murdianto	Mesin Pengolah
Mahkota Super	Abu Wasito	Genteng
Ud. Ibnu Mashud	Ibnu Mashud	Genteng

Sumber: Diskoperindagtamben Trenggalek

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki surat ijin atas keberadaan industri kerajinan yang dimilikinya. Sebagian besar masyarakat yang lain menganggap bahwa tanpa adanya surat ijinpun proses keberlangsungan industri kerajinan di Kamulan juga tetap bisa berjalan. Data tersebut diperoleh dari rekapitulasi Direktori Perusahaan Industri Kecil Menengah Kabupaten Trenggalek tahun 2012 untuk desa Kamulan.

Peran dari pemerintah yang mencoba memfasilitasi keberadaan industri di desa kamulan agar bisa mempunyai ijin usaha yang resmi belum begitu optimal. Peran yang ada masih sangat terbatas, sehingga pemerintah harus lebih dioptimalkan agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

### **c. Pemasaran**

Pasar merupakan tempat yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan sebuah produk hasil industri kerajinan. Mempunyai pangsa pasar yang baik, membuat sebuah produk hasil industri menjadi terkenal di masyarakat. Selain itu kualitas produk yang baik juga menjadi nilai tambah dalam proses pemasaran, dimana kualitas produk yang baik pasti mempunyai konsumen yang tetap dan tidak menutup kemungkinan konsumennya akan terus bertambah.

Peran pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam proses pemasaran dilakukan dengan cara mengadakan pameran setiap tahunnya. Pameran ini bertujuan untuk menjembatani para pengusaha industri dengan konsumen. Selain itu juga ada pasar lelang yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Disperindag Propinsi. Pemerintah juga mencoba menjalin kemitraan atau

hubungan antara pengusaha industri yang ada di Trenggalek dengan pengusaha-pengusaha yang berada di luar kabupaten Trenggalek. Jaringan kerjasama ini dimaksudkan agar bisa terjalin hubungan yang baik antar sesama pengusaha industri kecil, dan bisa saling bertukar informasi nantinya. Penjelasan seperti ini diungkapkan oleh AS selaku kabid Indag dalam wawancara hari Selasa 4 Maret 2014, di Dinas Koperindagtamben.

Peran dari pemerintah daerah juga pernah dirasakan oleh masyarakat desa Kamulan. Tetapi itu sudah berlangsung lama, dan sekarang belum dapat dirasakan lagi peran dari pemerintah yang berkaitan dengan proses pemasaran. Seperti yang dikatakan oleh JN sebagai berikut:

“Dulu ada bantuan pemasaran oleh pemerintah dengan cara diadakan pameran-pameran, dan kita disuruh untuk membuat replika genteng besar yang di pasang sebagai contoh dalam pameran dengan kualitas terbaik yang digunakan untuk menarik konsumen yang datang. Akan tetapi masyarakat lebih memilih melakukan pemasaran dengan cara pribadi sendiri yaitu dengan cara mubeng ke berbagai kota untuk menempatkan genteng hasil produksinya.” (wawancara hari Jum’at tanggal 7 Maret 2014)

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pemasaran melalui pameran-pameran belum dapat berjalan maksimal, ini dibuktikan dengan masyarakat yang lebih memilih menggunakan cara sendiri-sendiri untuk memasarkan produknya. Saat ini industri di desa Kamulan, terutama industri genteng sudah mempunyai pangsa pasar yang luas bahkan bisa sampai ke luar pulau Jawa, seperti Kalimantan, Bali. Selain itu pasar dari industri ini juga melebar ke daerah-daerah di kawasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Seperti yang diungkapkan oleh AW:

“Pasare kadang dikirm nyang lamongan, bali, kalimantan, jember. Enek seng diglethakne neng galangan koyo neng malang, terus blitar, ponorogo. Liyane enek seng dijupuk dewe utowo diparani neng omah. (Pasarnya terkadang dikirim ke Lamongan, Bali, Kalimantan, Jember. Ada juga yang ditinggal di galangan-galangan berbagai kota, seperti malang, blitar, ponorogo. Selain itu ada juga yang diambil sendiri langsung di rumah). (wawancara hari Senin 10 Maret 2014)

Pangsa pasar yang diperoleh ini juga tidak lepas dari upaya masyarakat sendiri yang mencari tempat-tempat untuk bisa meninggalkan produknya di galangan-galangan yang ada diberbagai kota. Dalam proses pemasaran ini, peran pemerintah belum begitu terlihat secara optimal. Masyarakat juga membutuhkan bantuan dari pemerintah agar bisa memberikan tempat yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memasarkan produknya lebih luas lagi, hal ini diungkapkan oleh SJ pada wawancara di rumahnya pada hari Minggu, 9 Maret 2014.

#### **d. Kemampuan SDM**

Sumber Daya Manusia merupakan aset penting dalam sebuah kegiatan produksi. Kemampuan SDM yang memadai dapat menunjang perkembangan dari sebuah industri, dengan dimulai dari peningkatan produksi yang semakin ditingkatkan. Dalam hal ini pemerintah mencoba meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki setiap industri kecil. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti dengan melakukan pelatihan teknologi, pelatihan desain kemasan. Penjelasan ini diungkapkan oleh AS, kabid Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperindagtamben.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga dibenarkan oleh JN, yang mengatakan bahwa dulu pernah ada upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap masyarakat di desa kamulan ini, akan

tetapi upaya tersebut tidak bisa berjalan efektif. Hal senada juga dijelaskan oleh bapak Ibnu Mashud, yang menceritakan bahwa pernah dilakukan pembinaan dan pelatihan terhadap para pengrajin industri genteng di desa kamulan. Tetapi hasil yang diperoleh juga sama dengan apa yang dikatakan oleh JN. Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pemerintah mengambil masyarakat secara acak untuk dapat mengikuti pelatihan dan nantinya apa yang di dapat dari pelatihan bisa ditularkan kepada masyarakat lain di desa Kamulan. Akan tetapi hal itu menjadi sia-sia karena tidak ada kelanjutan dari pelatihan yang pernah diikuti oleh masyarakat. Sehingga pelatihan yang telah dilakukan menjadi sirna, dan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat.

### **3. Faktor pendukung dan penghambat**

#### **a. Faktor Pendukung**

##### **1) Bahan baku yang berkualitas dan kualitas produksi yang ditingkatkan**

Faktor pendukung bagi kemajuan industri di Trenggalek diorientasikan kepada dua hal penting, seperti yang diutarakan oleh Kabid Perindustrian dan Perdagangan:

“Pola membangun industri di Trenggalek berorientasi pada dua hal penting, yang pertama orientasi kepada SDA yang ada. Yang kedua berdasarkan permintaan pasar. Atau bisa keduanya (yang diutamakan). Mengarah pada kondisi kedepan juga ditambahkan pula industri yang berwawasan lingkungan, yaitu yang renewable yakni industry yang bisa diperbaharui.”

(wawancara hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 pukul 09.00 di Dinas Koperindagtamben)

Bagi industri genteng, bahan baku merupakan salah satu faktor penting yang mendukung berkembangnya industri genteng di Kamulan. Bahan dasar dari industri genteng ini adalah tanah kaolin yang di stok dari daerah pogalan, gador, karena tanah di desa kamulan tidak dapat digunakan sebagai bahan baku yang berkualitas dalam pembuatan genteng. Tanah yang digunakan haruslah mempunyai kualitas yang tinggi, karena bahan baku yang berkualitas merupakan modal utama dari pembuatan genteng yang berkualitas. Proses pemesanan bahan baku mudah di dapat, karena tinggal pesan saja dan menunggu bahan baku dikirim ke tempat usaha produksi, seperti yang diungkapkan oleh JN :

“untuk mendapatkan bahan baku cukup mudah, meskipun tanah dari desa kamulan tidak bisa dijadikan bahan baku, tapi bahan baku diambil dari daerah gador dengan proses yang relatif mudah. Kita tinggal pesan saja dan menunggu bahan baku itu dikirim ke tempat produksi. Genteng yang dihasilkan juga mempunyai kualitas no 2 saat dilakukan pengetesan di Surabaya.” (wawancara hari Jum’at tanggal 7 Maret 2014)

Berdasarkan penjelasan dari JN, dapat di ketahui bahwa proses pemesanan bahan baku bisa dilakukan dengan relatif mudah. Bahan baku yang berkualitas akan menghasilkan genteng yang berkualitas pula. Hal serupa juga diungkapkan oleh IM, yang mengatakan bahwa:

”bahan baku harus yang berkualitas, agar pada proses pembuatan sampai pembakaran nanti bisa menghasilkan genteng dengan kualitas yang sangat baik. Kemampuan produksi sebesar 300bh/hari. Keuntungan yang diperoleh tidak pasti tergantung dari cuaca, selain itu juga tergantung dari pangsa pasarnya dan biasanya pada akhir tahun banyak yang menstok permintaan. Jika dihitung hasil keuntungan yang

diperoleh sebesar 2 juta/bulan dengan per pembakaran sebanyak 4 ribu, ini dengan pengerjaan secara manual. Jika dengan mesin bisa sekitar 2 kali lipat hasil yang akan diperolehnya.” (wawancara hari Minggu tanggal 9 Maret 2014)

Berdasarkan dari keterangan IM selaku pengusaha industri genteng di Kamulan diketahui bahwa bahan baku yang berkualitas menjadi syarat utama agar di dapatkan produksi genteng yang berkualitas. Produksi yang dihasilkan bisa mencapai 300 buah/hari dan menghasilkan keuntungan sekitar 2 juta/bulan. Produksi genteng dengan kualitas terbaik yang dihasilkan akan mempunyai kepercayaan di masyarakat dan konsumen. Semakin berkualitas genteng yang diproduksi, semakin luas juga pasarnya melalui omongan dari satu orang ke orang lain, dan merupakan salah satu cara pemasaran yang efektif. Seperti yang diungkapkan oleh AW :

”selain bahan baku yang berkualitas, faktor yang dapat menunjang kemajuan industri saya ini adalah dengan memberikan kartu nama dan tetap memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa genteng yang dihasilkan berkualitas sangat baik. Setiap daerah yang disinggahi, atau setiap galangannya diberikan kartu nama jika nanti membutuhkan genteng saya dimanapun berada.” (wawancara hari Senin 10 Maret 2014)

AW memberikan penjelasan bahwa selain bahan baku, faktor yang mendukung industri gentengnya adalah dengan memberikan kartu nama di setiap daerah yang pernah di singgahi dan tetap memberikan kepercayaan kepada konsumen dengan menghasilkan kualitas genteng terbaik. Kepercayaan dari konsumen menjadi hal sangat penting dalam proses penjualan produk gentengnya.

Tidak semua pengrajin industri menganggap bahan baku menjadi salah faktor penting yang menunjang kemajuan industrinya. Bagi AB, sebagai pengrajin dupa di desa Kamulan, bahan baku merupakan salah faktor penghambat dalam proses produksinya, seperti yang beliau katakan bahwa:

”bahan baku menjadi kendala dalam proses industri saya, karena bahan baku yang digunakan langsung didatangkan dari china, sehingga agak sulit untuk terus menerus mendatangkan bahan baku utama dari pembuatan dupa ini.” (wawancara hari Senin tanggal 10 Maret 2014)

Wawancara dengan AB, menjelaskan bahwa bahan baku yang digunakan dalam menjalankan proses industri dupanya merupakan salah satu hambatan yang dialami bagi kemajuan industrinya. Hal ini disebabkan karena bahan baku dasar pembuatan dupa didatangkan langsung dari China yang berupa tepung dan bahan baku tersebut tidak dapat di datangkan langsung terus menerus. Bahan baku didatangkan langsung dari China karena kualitas tepungnya yang sudah teruji bagi pembuatan dupa.

## **b. Faktor Penghambat**

### **1) Sarana dan Prasarana**

Salah satu kendala atau faktor penghambat dari proses kemajuan industri kecil adalah peralatan yang masih tradisional. Alat yang masih tradisional membutuhkan tenaga manusia yang cukup banyak dengan hasil yang belum maksimal dibandingkan dengan menggunakan peralatan yang modern. Pengadaan teknologi produksi yang semakin modern untuk bisa menggantikan peralatan produksi yang tradisional juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan relatif cukup besar, seperti yang diungkapkan oleh IM yang mengatakan bahwa:

“hambatan dari segi teknologi yaitu butuh mesin cetak hidrolis yang mampu mempermudah cetakan dan mampu mencetak  $\pm$  2 kali lipat cetakan biasa/hari dengan tenaga kerja yang seadanya, tetapi untuk membelinya sangat mahal dan dibutuhkan listrik yang besar juga.” (wawancara hari Minggu tanggal 9 Maret 2014)

Berdasarkan wawancara dengan IM, dapat dijelaskan bahwa teknologi produksi merupakan salah satu faktor penghambat dari kemajuan industri genteng. Teknologi yang semakin modern akan dapat menghasilkan produksi yang berkualitas dengan jumlah 2 kali lipat daripada menggunakan teknologi produksi biasa. Namun untuk mendapatkan peralatan yang lebih modern tersebut sangat sulit karena harganya yang cukup mahal. Hal serupa juga diungkapkan oleh SM yang mengatakan bahwa:

“Peralatan masih menggunakan teknologi manual, cetakan besi dan belum menggunakan mesin hidrolis. Cetakan manual masih menggunakan kekuatan manusia atau pekerja yang membuat genteng. Sedangkan jika menggunakan mesin hidrolis, bisa menghasilkan sampai 1000 buah/hari. Sumber air ijek nggawe disel, nyewo disel.” (wawancara hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014)

Penjelasan dari SM juga senada dengan apa yang diutarakan oleh IM, dimana peralatan merupakan kendala dari proses industri genteng yang digeluti. Peralatan yang semakin modern akan membuat produksi semakin meningkat 2 kali lipat daripada proses produksi dengan menggunakan mesin cetak manual tanpa mengabaikan kualitas dari hasil produksi. Namun bagi SM, selain peralatan produksi faktor lain yang menjadi penghambat yaitu proses pengairan, dimana untuk melakukan pengairan masih harus menyewa diesel terlebih dahulu.

Hal senada juga diungkapkan oleh AW yang mengatakan bahwa:

“faktor penghambat dari proses kemajuan industri genteng ini salah satunya adalah peralatan. Peralatan yang digunakan saat ini masih manual, butuh mesin hidrolis yang dapat memproduksi  $\pm 2$  kali lipat cetakan manual dan tanpa membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Selain itu juga lokasi pemasaran harus dibantu agar produk genteng yang sudah jadi bisa ditinggal di beberapa tempat, tanpa kita mubeng golek panggon dan itu bisa dilakukan secara terus menerus.” (wawancara hari Senin 10 Maret 2014)

AW juga mengungkapkan hal yang sama dimana peralatan merupakan faktor penghambat dalam proses kemajuan industri. Selain peralatan, AW juga mengungkapkan bahwa harus ada bantuan dalam proses pemasaran, dimana perlu disediakan tempat untuk meninggalkan produksi gentengnya dan tidak harus berkeliling mencari tempat untuk memasarkan produknya. Tempat yang dibutuhkan hendaklah bisa dijadikan pasar yang menampung produksi gentengnya secara terus menerus tanpa perlu berkeliling lagi untuk mencari tempat pemasaran yang ideal. Bagi pengusaha industri genteng di Kamulan, peralatan produksi yang masih tradisional dan belum modern menjadi faktor penghambat bagi kemajuan industri mereka.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Industri**

##### **a. Pendanaan**

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam berkembangnya suatu usaha, baik dalam skala usaha besar, maupun kecil. Modal dapat menggerakkan maupun menghentikan suatu kegiatan produksi. Modal yang cukup dapat menjadi faktor pendorong bagi kemajuan suatu kegiatan produksi begitu

pula sebaliknya, proses produksi akan berhenti dan terhambat jika tidak ada modal yang mencukupi. Masalah yang sering dialami oleh para pelaku industri kecil adalah keterbatasan dana atau modal untuk bisa mengembangkan usahanya, seperti yang diungkapkan oleh Kuncoro (1997), Imam Hanafi dan Imam Hardjanto (2006:42) bahwa masalah dasar atau kendala yang sering dihadapi oleh industri kecil adalah keterbatasan permodalan dan keterbatasan akses untuk memperoleh bantuan terhadap sumber-sumber permodalan. Oleh karena itu dibutuhkan peranan dari pemerintah untuk bisa memberikan berbagai macam fasilitas dalam membantu masyarakat untuk memajukan usahanya. Salah satunya berupa bantuan modal dalam bentuk kredit dengan bunga lunak.

Adanya akses maupun bantuan dari pemerintah yang diberikan bertujuan agar para pengusaha industri dapat dengan mudah melakukan pinjaman untuk mencukupi modal usahanya demi kemajuan usaha mereka. Strategi yang dilakukan pemerintah untuk memajukan industri yang ada di Trenggalek salah satunya yaitu melalui program bantuan permodalan, seperti yang diungkapkan oleh Hetifah Syaifudin (1995:66-75), Kartasmita (1996) bahwa strategi yang bisa diterapkan dalam upaya untuk pengembangan industri kecil yaitu melalui strategi peningkatan akses produktif terutama modal.

Pembinaan pendanaan dalam bentuk penyediaan bantuan permodalan yang dilakukan oleh Dinas Koperindagtamben Kabupaten Trenggalek untuk para pelaku usaha baik besar maupun kecil, terutama industri kecil di Trenggalek dilakukan melalui lembaga perbankan dengan program subsidi bunga lunak. Pembinaan permodalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek

merupakan salah satu strategi untuk bisa memajukan kegiatan para pelaku usaha kecil terutama industri kecil di Trenggalek. Pemberian bantuan modal ini bekerjasama dengan lembaga perbankan yang ada di Trenggalek. Dimana para pengusaha melakukan pinjaman ke bank sama seperti melakukan pinjaman pada umumnya, namun bunga pinjaman dari bank dapat di subsidi beberapa persen oleh pemerintah dengan mengajukan bantuan melalui proposal kepada pemerintah terlebih dahulu. Misalnya melakukan pinjaman dengan bunga 16% bisa disubsidi oleh pemerintah sebesar 6%, sehingga bunga dari pinjaman pengusaha tinggal 10%.

Pada pelaksanaannya banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program bantuan modal yang diusung oleh pemerintah. Seperti di desa Kamulan, yang merupakan kawasan sentra industri genteng dan sebagian besar masyarakatnya merupakan para pengrajin genteng, selama ini belum mengetahui tentang program bantuan itu, sehingga masyarakat lebih mengandalkan pinjaman kepada sanak saudara sendiri daripada ke bank. Alasan lain karena mereka takut jika tidak bisa melunasi pinjaman yang dilakukan kepada pihak bank. Kondisi yang ada di lapangan menunjukkan bahwa program bantuan dari pemerintah belum bisa terealisasi secara optimal, bahkan informasinya pun juga belum sampai ke para pelaku industri di desa Kamulan. Diharapkan dengan kondisi seperti ini, pemerintah lebih peka lagi dalam menjangkau para pelaku industri kecil dan bisa memberikan bantuan permodalan yang merupakan salah satu persoalan utama sebuah industri kecil dengan lebih efektif dan efisien sehingga nantinya

keberadaan industri kecil yang ada di Trenggalek, terutama di desa Kamulan ke depannya bisa lebih maju dan berkembang.

#### **b. Pendidikan dan Pelatihan**

Sumber Daya Manusia merupakan komponen utama dalam kegiatan produksi. Meskipun suatu usaha menggunakan teknologi yang sangat modern tapi keberadaan Sumber Daya Manusia tetap dibutuhkan dalam prosesnya. Keberadaan SDM yang berkualitas akan memacu perkembangan tingkat kreatifitas dan inovasi dalam setiap kegiatan usaha, tidak terkecuali pada usaha kecil maupun besar di Trenggalek, terutama industri kecil. Mengadopsi dari UU No 20 tahun 2008 tentang indikator Pemberdayaan UMKM, di dalamnya terdapat pengembangan dan pembinaan UMKM salah satunya yaitu pembinaan dan pengembangan terhadap Sumber Daya Manusia.

Merujuk pada peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Koperindagtamben melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada usaha industri kecil yang ada di Trenggalek melalui pendidikan dan pelatihan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Syarif (1991:3), Kartasmita (1996) bahwa salah satu bentuk pengembangan industri kecil yaitu melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. Mengacu pada hal itu pemerintah mengadakan pendidikan dan pelatihan agar ketrampilan para pengrajin bisa meningkat.

Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan ketrampilan dari para pengusaha yaitu dengan melakukan

pelatihan-pelatihan seperti pelatihan penggunaan teknologi modern, pelatihan desain kemasan. Selain itu setiap ada kelompok baru yang terbentuk maka akan dilakukan pelatihan dan menumbuhkan iklim wirausaha baru dengan memanfaatkan potensi yang ada. Namun secara khusus untuk pelatihan yang diperuntukan bagi pengrajin di desa Kamulan belum dapat terealisasi secara optimal.

Para pengusaha industri di desa Kamulan, yang mayoritas pelaku industri tanah liat, juga ada industri dupa kebanyakan belum merasakan adanya pelatihan dan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam hal ini melalui Dinas Koperindagtamben. Pernah ada sebagian para pengrajin yang mendapat pelatihan, namun setelah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah selesai, mereka juga selesai dan tidak ada kelanjutan dari pelatihan yang didapatkan. Masyarakat yang menjadi peserta pelatihan diambil secara acak dari seluruh pelaku industri yang ada di Kamulan dan nanti setelah diadakan pelatihan, diharapkan mereka mampu menularkan apa yang didapat dari pelatihan itu. Akan tetapi semua tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selain itu juga tidak ada penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah ke daerah Kamulan, untuk melihat lebih jauh hasil yang diperoleh dari adanya pelatihan tersebut. Akibatnya hasil dari pelatihan yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan industri di desa Kamulan.

Peran dari pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan ketrampilan para pelaku industri di Trenggalek dengan melalui pendidikan dan pelatihan belum menjangkau seluruh daerah di Trenggalek. Kedepannya diharapkan

pemerintah harus bisa lebih menjangkau setiap pelaku industri di daerah-daerah terutama yang merupakan daerah sentra industri tertentu, seperti di desa Kamulan yang merupakan sentra industri genteng.

### c. Teknologi

Setiap kegiatan produksi, teknologi selalu ada dan digunakan untuk membantu pengusaha dalam memudahkan produksinya. Namun masalah umum yang dihadapi oleh sebagian besar usaha kecil termasuk di dalamnya industri kecil, menurut Imam Hanafi dan Imam Hardjanto (2006:42), Tambunan (2002:70) yaitu penguasaan teknologi dan teknologi yang masih lama/tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua dan alat-alat yang sifatnya masih manual. Keterbelakangan teknologi ini membuat rendahnya kualitas dan kuantitas produksi dan mempengaruhi efisiensi dalam proses produksi. Hal ini dikarenakan teknologi merupakan bagian dari kegiatan produksi suatu industri, baik industri besar maupun kecil.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek mencoba melakukan terobosan untuk mengatasi permasalahan teknologi dengan mengganti teknologi yang masih tradisional dengan yang lebih modern melalui pemberian bantuan peralatan kepada para pelaku industri kecil di Trenggalek. Meskipun tidak semua para pelaku industri kecil mendapatkan bantuan, akan tetapi kegiatan yang dilakukan pemerintah sedikit banyak diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi yang dihasilkan, dan dapat meningkatkan daya saing di era pasar yang lebih modern. Mekanisme yang dilakukan dalam proses bantuan teknologi atau peralatan, yaitu diawali dengan permintaan dari para pelaku

industri yang mengajukan bantuan peralatan kepada pemerintah melalui proposal bantuan peralatan. Kemudian pemerintah menindak lanjuti bantuan tersebut dan memprosesnya. Kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memberikan bantuan peralatan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kartasasmita (2003:21-22) bahwa strategi mengembangkan ekonomi rakyat dalam hal ini industri kecil dilakukan melalui dua tahap yang pertama peningkatan akses dalam aset produksi termasuk di dalamnya modal dan teknologi, dan yang kedua adalah memperkuat posisi transaksi (dalam hal ini pasar) dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.

Namun bagi para pengusaha industri di desa Kamulan, bantuan pemerintah sangat sulit mereka dapatkan. Bahkan seperti desa mereka terisolasi dari setiap program yang pemerintah lakukan. Ada sebagian pemilik usaha industri genteng yang mencoba mengajukan proposal bantuan peralatan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek, akan tetapi belum pernah ada realisasi dari pemerintah terhadap pengajuan bantuan yang dilakukan. Seharusnya upaya dari pemerintah untuk lebih memajukan industri kecil di Trenggalek juga diikuti dengan penyuluhan ke daerah-daerah tempat industri kecil berada dan memberikan informasi yang lebih jelas mengenai program-program yang diusung oleh pemerintah. Sehingga bisa memaksimalkan peran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk memajukan dan mengembangkan industri-industri kecil yang ada di Trenggalek, terutama pada daerah yang menjadi kawasan sentra industri, salah satunya yaitu di daerah kamulan yang merupakan sentra industri genteng.

#### **d. Pemasaran**

Kondisi pasar atau pangsa pasar bagi produk hasil industri kecil tidak bisa selamanya lancar, tergantung dari situasi dan kondisi lingkungan yang ada. Menurut Imam Hanafi dan Imam Hardjanto (2006:42), Kuncoro (1997:316-317) menyebutkan bahwa kesulitan pasar juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh industri kecil. Akses pasar yang mudah dibutuhkan agar industri kecil dapat bersaing secara kompetitif. Berdasarkan kondisi itu Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Koperindagtamben mencoba memfasilitasi pasar dengan melakukan berbagai macam kegiatan seperti melaksanakan pameran, pasar lelang, serta kemitraan dengan pengusaha di luar Kabupaten Trenggalek dengan tujuan agar pengusaha industri kecil lokal bisa menjalin kemitraan dengan para konsumen dan pengusaha lain di luar kota. Pemerintah juga berusaha untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi.

Kegiatan pameran yang dilakukan oleh Dinas Koperindagtamben, disambut baik oleh para pengusaha industri di Desa Kamulan. Namun dalam perjalanannya masyarakat lebih memilih melakukan pemasaran sesuai dengan kehendak mereka sendiri, karena mereka beranggapan bahwa proses pemasaran secara mandiri bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Ada sebagian pula masyarakat yang menginginkan di sediakan tempat oleh pemerintah untuk tempat pasar mereka tanpa mereka harus mencari ke kota-kota lain. Permasalahan pasar ini sudah coba diselesaikan oleh pemerintah dengan melakukan berbagai kegiatan seperti disebutkan di atas, akan tetapi hasilnya belum terlihat secara

optimal, karena peran pemerintah juga belum mampu dirasakan secara maksimal meskipun ada beberapa hal yang sudah diupayakan oleh pemerintah.

Peran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu mencari pangsa pasar para pelaku industri di Trenggalek sesuai dengan pernyataan Kartasamita (Zubaedi, 2007:103), Hetifah Syaifudin (1995:66-67), yang mengungkapkan bahwa pengembangan terhadap akses pemasaran perlu dilakukan sebagai sebuah strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan industri kecil. Selain itu, peran yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan proses pemasaran juga mengadopsi dari bunyi UU No 20 Tahun 2008 tentang pengembangan dan pembinaan UMKM yang termasuk di dalamnya industri kecil yang menyebutkan bahwa pengembangan industri kecil didasarkan oleh beberapa bidang seperti, produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi dan pendanaan.

#### **e. Perijinan**

Setiap usaha harus mendaftarkan usaha mereka dan membuat surat izin untuk mendirikan sebuah usaha. Proses perizinan harus dilakukan agar sebuah kegiatan produksi bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan lebih modern. Adanya kepemilikan surat izin sudah menunjukkan bahwa keberadaan usaha tersebut baik kecil maupun besar sudah layak berdiri dan mempunyai aturan serta manajemen yang jelas. Klasifikasi usaha di Kabupaten Trenggalek yang dituntut untuk mempunyai ijin usaha yaitu dilihat dari kriteria usahanya. Dimana untuk industri yang diwajibkan membuat surat ijin usaha adalah industri dengan investasi lebih dari 5 juta tidak termasuk dengan tanah dan bangunan di dalamnya,

sedangkan untuk industri dengan investasi di bawah 5 juta tidak diwajibkan memiliki ijin usaha. Klasifikasi perijinan industri di Trenggalek dilihat berdasarkan investasinya, yaitu dengan uraian antara 200 juta - 1 M menjadi kewenangan kabupaten, sedangkan lebih dari 1 M sudah menjadi kewenangan propinsi.

Pemerintah mencoba membuka wawasan kepada para pengusaha industri di Trenggalek agar lebih berfikir bukan untuk lingkungan sekitarnya tetapi jauh lebih maju ke arah yang modern. Adanya perijinan akan mempermudah jalan menuju akses pasar yang modern karena kualitas dari produk yang dihasilkan sudah diakui melalui surat perijinan yang dimiliki. Akan tetapi peran dari pemerintah untuk menyadarkan kembali wawasan tentang pentingnya surat ijin bagi sebuah usaha belum mendapat respon yang positif dari sebagian besar pelaku industri kecil.

Seperti halnya dengan para pelaku industri kecil di desa Kamulan, sebagian besar mereka tidak memiliki surat ijin pada usaha mereka. Para pelaku industri beranggapan bahwa tanpa adanya surat ijinpun, usaha mereka tetap bisa berjalan dan bisa menjadi sumber mata pencaharian, kenapa juga mesti repot untuk mengurusinya. Anggapan seperti ini yang coba dihilangkan oleh pemerintah untuk menuju pasar yang lebih luas dan lebih modern lagi. Kegiatan yang coba dilakukan oleh pemerintah untuk menyadarkan para pelaku industri terhadap pentingnya surat ijin usaha selain untuk langkah menuju pasar yang lebih modern, juga bertujuan untuk mendata berapa banyak industri yang ada di Trenggalek. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Hetifah Syaifudin (1995:66-67) bahwa strategi

yang dapat diterapkan dalam pengembangan industri kecil salah satunya adalah melalui pengaturan dan perijinan. Dalam UU No 20 tahun 2008 juga mengatakan bahwa indikator dalam pemberdayaan UMKM termasuk di dalamnya industri kecil yaitu melalui penumbuhan iklim usaha yang di dalamnya terdapat indikator tentang perizinan usaha. Sehingga kesadaran dari para pelaku industri dibutuhkan untuk mengetahui akan pentingnya pembuatan surat izin usaha, terutama bagi industri yang wajib mempunyai izin usaha, dengan kriteria seperti yang disebutkan di awal yaitu industri dengan investasinya di atas 5 juta tidak termasuk tanah dan bangunannya. Proses perijinan yang ada di Kabupaten Trenggalek saat ini juga relatif mudah, karena semua proses perijinan sudah menjadi satu di kantor KPPM dan hanya membutuhkan waktu 1-7 hari untuk mengurus perijinan. Sementara itu peran dari pemerintah juga dibutuhkan untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mensosialisasikan tentang pentingnya sebuah perijinan terhadap keberadaan industri yang dimiliki.

## **2. Hasil Pemberdayaan**

### **a. Perkembangan Industri Kecil**

Industri yang sangat berkembang di Kamulan adalah industri genteng. Terkenalnya industri genteng di Kamulan ini membuat daerah Kamulan dikenal sebagai kawasan sentra industri genteng. Industri yang dihasilkan dari kamulan sudah terkenal ke berbagai kota di luar Trenggalek, dan mencakup wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Keberadaan industri ini harus menjadi perhatian

dari pemerintah agar bisa lebih dikembangkan lagi untuk ke depannya, dan agar dapat memunculkan industri-industri lain sebagai ikon dari desa Kamulan.

Peran dari pemerintah diperlukan dalam upaya menjaga keberadaan dari industri yang ada di desa Kamulan. Peran dari pemerintah untuk menjaga keberadaan industri di desa Kamulan bisa dilakukan melalui berbagai macam cara. Proses dari perkembangan industri di desa Kamulan bisa dimulai dengan pemberian bantuan-bantuan yang sangat dibutuhkan untuk dapat digunakan sebagai sarana yang dapat meningkatkan produktivitas dari industri di Kamulan. Selain itu, peran dari pemerintah juga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dari industri yang ada di Kamulan yang belum dapat ditemukan solusinya oleh masyarakat daerah Kamulan.

Peran dari pemerintah dalam proses perkembangan industri di desa Kamulan belum begitu terlihat, karena proses perkembangan yang terjadi terhadap industri yang ada di Kamulan dilakukan oleh sebagian besar masyarakatnya. Sehingga dalam proses pemberdayaan dan perkembangan industri di Kamulan ini, peran yang diberikan oleh pemerintah masih sangat sedikit. Kedepannya diharapkan peranan dari pemerintah bisa lebih dilakukan secara optimal, dan perkembangan industri di Kamulan bisa berlangsung secara maksimal.

#### **b. Perijinan**

Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupaya untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan perijinan menjadi proses pelayanan perijinan yang satu atap (*one stop service*). Semua jenis perijinan bisa diproses disini tidak terkecuali dengan proses perijinan terhadap usaha yang dimiliki,

seperti industri kecil. Dalam konteks usaha, perijinan menjadi hal yang penting dan banyak para pelaku industri kecil yang tidak memiliki surat ijin dari usaha yang dikelolanya. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa ada atau tidak adanya surat ijin terhadap keberadaan industri mereka tidak mempunyai pengaruh apapun juga, seperti juga yang terjadi di desa Kamulan. Masyarakat desa Kamulan yang mayoritas berprofesi sebagai para pelaku industri tidak mempunyai surat ijin atas industri yang dikelolanya bertahun-tahun.

Pemahaman seperti ini yang coba dihilangkan oleh pemerintah kabupaten trenggalek. Pemerintah mencoba memberikan gambaran tentang pentingnya surat ijin usaha sebagai salah satu syarat agar bisa masuk ke dalam pasar yang lebih modern. Pemerintah juga memberikan pemahaman bahwa dengan adanya surat ijin usaha yang dimiliki para pengusaha, termasuk pengusaha industri kecil itu membuktikan bahwa produk yang dihasilkan dari industri yang dikelola sudah layak masuk ke dalam pasar yang lebih luas lagi dan bisa lebih berkembang.

Pemahaman yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perijinan ini mengadopsi dari apa yang dikemukakan oleh Hetifah Syaifudin (1995:66-67) yang menjelaskan bahwa strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan industri kecil salah satunya adalah melalui pengaturan dan perijinan. Serta dalam UU No 20 tahun 2008 yang juga mengatakan bahwa indikator dalam pemberdayaan UMKM termasuk di dalamnya industri kecil yaitu melalui penumbuhan iklim usaha yang di dalamnya terdapat indikator tentang perizinan usaha.

Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini dalam hal pemahaman untuk pentingnya sebuah ijin usaha belum terlaksana secara optimal. Meskipun pemerintah sudah mencoba memberikan pengetahuan akan pentingnya surat ijin ke depannya nanti. Ini terbukti dengan jumlah para pelaku industri kecil di desa Kamulan yang mempunyai ijin usaha terhadap industrinya. Pemahaman yang dilakukan oleh pemerintah belum tersampaikan secara menyeluruh, dan sosialisasinya masih kurang.

### **c. Pemasaran**

Pasar merupakan komponen yang sangat penting dalam proses perkembangan industri kecil. Pasar menjadi salah satu bagian terpenting dalam sebuah proses perkembangan industri karena melalui pasar produk hasil industri kecil bisa dikenal luas oleh konsumen dan masyarakat banyak. Melalui pasar juga, kualitas dari suatu produk hasil industri bisa dinilai. Karena itu, pemerintah Kabupaten Trenggalek memberikan bantuan terhadap akses pasar terhadap para pelaku industri yang ada di Trenggalek, termasuk masyarakat di desa Kamulan. Pemerintah memberikan bantuan terhadap akses pasar, dengan maksud agar produk yang dihasilkan para pelaku industri kecil di Trenggalek, terutama dari Kamulan, bisa dikenal lebih luas dan mempunyai koneksi terhadap warga masyarakat luar. Selain itu alasan yang lain yakni agar dapat terciptanya hubungan kerjasama diantara pelaku industri di Kabupaten Trenggalek, dengan pengusaha di luar Kabupaten Trenggalek.

Program yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Trenggalek, seperti pameran, pasar lelang diharapkan mampu mengenalkan produk industri dari

daerah Kamulan. Akan tetapi semua program yang dirancang oleh pemerintah belum semuanya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagian dari masyarakat masih belum mendapatkan arahan yang pasti terkait dengan program yang dilakukan. Sebagian lainnya sudah bisa ikut berpartisipasi dalam pameran yang diadakan oleh pemerintah. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengenalkan produknya ini sejalan dengan pernyataan dari Kartasmita (dalam Zubaedi, 2007:103), yang menjelaskan bahwa pengembangan terhadap akses pemasaran perlu dilakukan sebagai sebuah strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan industri kecil.

Harapan dari pemerintah melalui program ini, atau setelah diadakannya proses pameran serta pasar lelang diharapkan pangsa pasar dari produk hasil industri di Kamulan bisa lebih dikenal di masyarakat luas. Akan tetapi hal itu tidak bisa berjalan maksimal, karena tidak semua masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha industri kecil di desa Kamulan mengikuti pameran yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek. Kondisi yang ada seperti ini menyiratkan bahwa peran dari pemerintah terhadap perkembangan proses industri di desa kamulan melalui proses pemasaran belum optimal, dan masih sangat sedikit.

#### **d. Kemampuan SDM**

Pemerintah Kabupaten Trenggalek mencoba mengembangkan ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia pada tiap-tiap industri kecil. Berbagai program dilakukan sebagai bentuk pengembangan terhadap SDM agar bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Program yang

dilakukan antara lain seperti pelatihan-pelatihan teknologi, pelatihan kemasan, dan pelatihan lainnya. Pelatihan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk hasil industri yang dikelola.

Proses pelatihan juga terjadi di desa Kamulan, dimana sebagian masyarakat mendapatkan kesempatan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun hasil dari pelatihan tersebut tidak bisa dirasakan oleh semua masyarakat di desa kamulan. Beberapa masyarakat yang mengikuti pelatihan diharapkan mampu menularkan ilmu yang diperoleh kepada masyarakat lainnya yang tidak mengikuti. Ternyata setelah diadakan pelatihan tidak ada kelanjutan dari kegiatan pelatihan itu. Seharusnya pemerintah harus memilih peserta tidak sama setiap tahunnya, karena yang terjadi para masyarakat yang mengikuti pelatihan setiap tahun hampir sama orangnya.

Upaya dari pemerintah yang mencoba meningkatkan kualitas SDM di desa Kamulan belum didukung dengan pemilihan masyarakat secara bergantian. Upaya dari pemerintah ini dilakukan sebagai sarana untuk bisa lebih mengembangkan kualitas industri di kamulan agar bisa lebih maju lagi. Akan tetapi peran yang diberikan oleh pemerintah belum dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh warga masyarakat di daerah Kamulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, karakteristik pemberdayaan yang terjadi di desa kamulan yakni sebagai berikut:

1. Proses pemberdayaan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat sendiri.

2. Pemenuhan akan kebutuhan tiap-tiap industri kerajinan yang ada di desa Kamulan dipenuhi secara personal. Seperti pemenuhan modal, mencari pangsa pasar, teknologi yang digunakan masih sederhana.
3. Sebagian besar masyarakat di Kamulan beranggapan bahwa tidak memerlukan surat perijinan untuk melaksanakan kegiatan industri karena tidak ada pengecekan oleh pemerintah.
4. Peran dari pemerintah dalam proses pemberdayaan belum begitu optimal dan masih sangat sedikit.
5. Masyarakat membutuhkan pemerintah sebagai fasilitator yang dapat memberikan bantuan terhadap kebutuhan dari masyarakat yang sulit untuk di dapatkan terutama bantuan terhadap modal, dan teknologi, selain SDM dan proses pemasaran. Serta dapat mencari solusi pemecahan dari masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat.

Dilihat dari indikator seperti permodalan, SDM, teknologi, pemasaran, maka pola pemberdayaan yang terjadi di desa kamulan dapat dikatakan sebagai proses pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek dan bukan sebagai obyek seperti yang dikatakan oleh Kartasasmita (2003). Masyarakat mampu menjalankan pemberdayaan sendiri dan menjadikan diri mereka sebagai subyek yang sudah berdaya dalam proses pemberdayaan terhadap industri di desa Kamulan, meskipun mereka bertahan dengan kondisi yang apa adanya dan dengan fasilitas yang sederhana. Pola pemberdayaan yang ada di desa kamulan dilakukan secara personal oleh seluruh lapisan masyarakat yang berada di desa kamulan.

Para pelaku industri lebih banyak menjalankan industrinya dengan kemampuan mandiri setiap orang, meskipun ada juga yang membuat kelompok-kelompok swadaya. Ketika kebutuhan yang muncul tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat, mereka membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah yang berwenang. Masyarakat, dalam hal ini para pelaku industri di desa kamulan yang bisa dikatakan lapisan bawah mencoba melakukan proses pemberdayaan untuk tetap menjaga kelangsungan industri mereka, dan membutuhkan respon dari pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan untuk lebih memaksimalkan proses pemberdayaan yang berlangsung. Akan tetapi tanggapan atau respon yang diberikan oleh pemerintah sebagai pemangku kepentingan belum terlihat disini. Seharusnya pemerintah lebih berperan untuk menanggapi permasalahan serta kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat.

Pemberdayaan tidak dapat berjalan optimal atau masih banyak kekurangan tanpa adanya peran dari pemerintah yang dalam hal ini berperan sebagai fasilitator. Sebab dalam proses sebuah pemberdayaan keberadaan pemerintah menjadi sebuah hal yang amat penting, karena pemerintah mempunyai tempat yang strategis sebagai pembuat kebijakan yang salah satunya tentang pemberdayaan masyarakat. Dalam kebijakan yang telah dibuat pasti ada program-program yang harus dilaksanakan untuk keberhasilan suatu proses pemberdayaan. Tidak terkecuali di Trenggalek, pemerintah mempunyai program-program yang ditujukan sebagai sarana untuk memberdayakan industri kecil, akan tetapi program yang ada belum mencapai sasaran secara optimal. Ini dibuktikan dengan masyarakat desa kamulan yang mayoritas berprofesi sebagai pelaku industri,

belum merasakan dampak dari peran pemerintah terhadap proses pemberdayaan yang dilakukan. Peran pemerintah yang dalam hal ini sebagai otoritas utama pengambil kebijakan belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat di Kamulan. Dilihat dari indikator keberdayaan, seperti permodalan, teknologi, pelatihan dan pendidikan, pemasaran, dan perijinan, peran pemerintah daerah masih sangat minim, meskipun sudah ada beberapa program yang dilakukan untuk mengembangkan industri di desa Kamulan.

Pada konteks model pemberdayaan seperti yang dikemukakan oleh Khan (dalam Bakri 2011:20-24) pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan terhadap keadaan atau permasalahan atau kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat sendiri, serta pemerintah membangun hubungan yang baik dengan masyarakat agar pemberdayaan bisa berlangsung secara optimal dan maksimal. Namun pada faktanya fungsi yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah belum sepenuhnya dipenuhi, dan masyarakat sendirilah yang melangsungkan proses pemberdayaan terhadap industri di daerahnya yaitu desa kamulan untuk menjaga kelangsungan keberadaan industri dan perkembangan industri di kamulan. sementara itu peran dari pemerintah belum begitu terlihat dalam proses pemberdayaan di desa Kamulan.

Peran dari pemerintah dalam sebuah proses pemberdayaan sangat dibutuhkan dan pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting seperti yang dikemukakan oleh Kartasmita (2003). Pemerintah mempunyai otoritas sebagai pemangku kebijakan yang bertanggung jawab atas semua program-program dari

pemerintah terutama pada proses pemberdayaan yang akan dilakukan terhadap masyarakat, terutama para pelaku industri kecil.

Peran dari pemerintah dalam proses pemberdayaan dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana atau solusi untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat pelaku industri di desa kamulan. Keberadaan pemerintah juga dibutuhkan untuk melindungi masyarakat pengrajin industri dalam mekanisme pasar yang memihak golongan lemah. Selain itu keberadaan peran pemerintah dibutuhkan juga sebagai sarana membuka jalur informasi dan akses yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Sehingga dapat ditarik sebuah garis besar bahwa peran dari pemerintah sangat dibutuhkan terhadap keberadaan dan pemberdayaan industri yang ada di desa kamulan, sehingga industri yang ada bisa lebih mendapat perhatian dan dapat bersaing lebih luas lagi. Peran yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pada bantuan teknologi, bantuan modal yang meringankan masyarakat, mekanisme pasar. Pola pemberdayaan yang terjadi di desa kamulan ini belum berjalan secara optimal, karena masih sedikitnya peran yang diberikan oleh pemerintah dalam pemberdayaan di desa Kamulan sehingga dampaknya terhadap industri di desa Kamulan belum begitu dirasakan langsung oleh masyarakat Kamulan.

### 3. Faktor pendukung dan penghambat

#### a. Faktor Pendukung

##### 1) Bahan baku yang berkualitas dan kualitas produksi yang ditingkatkan

Bahan baku seringkali menjadi kendala serius bagi pertumbuhan dan kelangsungan kegiatan produksi usaha kecil termasuk di dalamnya industri kecil. Kemudahan mendapatkan bahan baku akan membawa dampak yang signifikan terhadap kelangsungan sebuah produksi, begitu juga sebaliknya jika bahan baku suatu produksi terbatas akan dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan suatu produksi, bahkan bisa mematikan kegiatan produksi itu sendiri. Ketersediaan bahan baku yang cukup menjadi salah satu syarat utama yang dapat menunjang perkembangan suatu industri. Suatu kegiatan industri tidak mungkin dapat bertahan tanpa bahan baku yang memadai dan dapat diperoleh dengan mudah. Kemudahan mendapatkan bahan baku tidak bisa dirasakan hanya dengan memanfaatkan kondisi alam di daerah sekitar industri.

Bahan baku produksi yang di penuhi langsung dari daerah industri itu sendiri tidak dipungkiri memberikan kemudahan dalam pemenuhannya bagi pelaku industri dibandingkan dengan harus mengambil dari daerah lain. Namun kemudahan juga bisa dirasakan meskipun bahan baku utama suatu kegiatan produksi diambil dari daerah lain dan bukan daerah tempat produksi itu berasal. Seperti yang dirasakan oleh para pelaku industri di desa Kamulan yang mayoritas sebagai pengrajin industri genteng, bahan baku utama di datangkan langsung dari daerah lain yang mempunyai tanah yang cukup baik, sebab di daerahnya sendiri

tanah yang ada sudah tidak dapat dijadikan sebagai bahan baku utama pembuatan genteng. Bahan baku yang berkualitas dapat menghasilkan produk yang berkualitas juga.

Mendapatkan bahan baku meskipun dari daerah lain tidaklah sulit, karena tinggal melakukan pesanan, maka bahan baku yang dibutuhkan akan segera diantarkan. Adanya bahan baku yang berkualitas bisa menjadi faktor utama bagi kemajuan suatu kegiatan produksi, dan dengan berorientasi pada produk hasil industrinya yang sudah mempunyai kepercayaan di lingkungan masyarakat. Desa Kamulan merupakan salah satu desa yang merupakan desa sentra industri genteng, dimana produk genteng hasil kegiatan produksi masyarakatnya sudah mempunyai pasar di kalangan masyarakat dan bahkan bisa sampai ke luar kota.

Pemerintah mencoba memfasilitasi untuk pemenuhan bahan baku utama bagi kelangsungan sebuah industri. Namun dalam program pemerintah dicanangkan untuk lebih mengembangkan industri yang bersifat *renewable* (dapat diperbaharui), dimana bahan baku utama dari sebuah industri bisa untuk diperbaharui kembali dan bisa berlangsung secara terus menerus. Bahan baku untuk pembuatan genteng, tidak bisa terus menerus ada karena suatu ketika tanah yang digunakan sebagai sumber utama bahan baku industri akan habis dan tidak bisa diperbaharui kembali. Sehingga pemerintah lebih mengedepankan industri dengan pemanfaatan bahan baku utama yang dapat diperbaharui.

Selain bahan baku, faktor pendukung lain yaitu berupa adanya papan/plang yang menunjukkan bahwa wilayah desa Kamulan merupakan wilayah sentra industri genteng. Letak desa yang strategis, juga menambah

kemudahan bagi para konsumen untuk datang, dan bisa menjadi faktor bagi kemajuan industri di desa Kamulan. Sehingga keberadaan desa Kamulan sebagai sentra industri genteng, dan industri lain yang ada seperti industri dupa bisa lebih berkembang dan terkenal dengan keberadaan papan atau plang yang menunjukkan keberadaan industri di desa Kamulan.

## **b. Faktor Penghambat**

### **1) Sarana dan Prasarana**

Keberadaan sarana atau prasarana yang mendukung bagi sebuah kegiatan industri menjadi hal yang bisa memajukan atau bahkan menghambat kemajuan suatu kegiatan industri. Bagi para pelaku industri di desa Kamulan kebutuhan akan peralatan yang lebih modern menjadi masalah tersendiri dalam perkembangan industri mereka. Dimana saat ini peralatan yang ada masih bersifat tradisional. Pemenuhan peralatan yang lebih modern sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Kamulan yang mayoritas berprofesi sebagai pelaku industri.

Peran dari pemerintah untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat ini sangat dibutuhkan. Pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan hambatan-hambatan yang dialami oleh para pelaku industri, karena pemerintah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi perkembangan industri kecil yang ada di daerahnya. Seperti yang terkandung dalam UU No 20 Tahun 2008. Kartasmita (2003:21-22) juga mengatakan bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengembangkan ekonomi rakyat dalam hal ini industri kecil dilakukan melalui dua tahap yang pertama peningkatan akses dalam aset produksi

termasuk di dalamnya modal dan teknologi, dan yang kedua adalah memperkuat posisi transaksi (dalam hal ini pasar) dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.

Kendala nyata yang dirasakan oleh para pelaku industri di desa Kamulan saat ini adalah penggunaan teknologi yang masih tradisional dan membutuhkan pembaharuan dengan teknologi yang lebih modern agar bisa menghasilkan produk yang lebih berkualitas dengan efektif dan efisien. Peran dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan setiap hambatan-hambatan yang muncul, dan pemerintah dituntut untuk lebih dekat dengan para pelaku industri di daerahnya. Sehingga dengan demikian program pemberdayaan industri yang dilakukan oleh pemerintah bisa mencapai target dan mempunyai dampak yang signifikan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan yang diteliti pada bab sebelumnya, maka peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Trenggalek merupakan wilayah yang mempunyai beragam potensi lokal sebagai produk unggulan daerah. Salah satu potensi yang dimiliki adalah usaha kecil, termasuk di dalamnya industri kecil. Desa Kamulan merupakan salah satu desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pengrajin industri. Industri yang ada di kamulan merupakan industri kecil dengan kualifikasi memiliki investasi di bawah 200 juta. Keberadaan desa kamulan juga dikenal sebagai sentra industri genteng. Lokasinya yang strategis memudahkan para masyarakat ataupun konsumen untuk menjangkau sentra industri di desa Kamulan. Namun keberadaannya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar industri di desa Kamulan ini bisa berkembang dan permasalahan-permasalahan serta hambatan yang dialami oleh industri ini bisa terselesaikan dengan maksimal.
2. Peran Pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Tambang dan Energi dibutuhkan dalam pemberdayaan industri lokal yang ada di desa Kamulan. Peran yang dilakukan oleh

pemerintah terhadap para pelaku industri di Trenggalek antara lain dengan memberikan bantuan permodalan melalui subsidi bunga lunak yang bekerja sama dengan lembaga perbankan yang ada di Trenggalek; pembinaan Sumber Daya Manusia dalam hal ini melalui pelatihan-pelatihan dalam hal produk kemasan, pelatihan pengobongan, penggunaan teknologi, serta pembinaan dalam menumbuhkan iklim usaha dengan memunculkan jiwa wirausaha baru; bantuan teknologi dengan memberikan bantuan peralatan kepada para pengusaha industri kecil yang membutuhkan atau meminta bantuan kepada pemerintah; pemasaran yang bertujuan untuk menjembatani interaksi antara pengusaha dan konsumen melalui pameran, pasar lelang, kemitraan dengan pengusaha lain di luar Kabupaten Trenggalek; perijinan dengan memberikan kemudahan untuk mengurus layanan perijinan dengan pelayanan perijinan yang sudah satu atap (*one stop service*). Namun peran yang diberikan oleh pemerintah masih belum optimal dan masih sangat sedikit.

3. Peran Pemerintah Daerah dalam memberdayakan industri lokal di desa Kamulan masih rendah. Sehingga belum dirasakan dampaknya secara signifikan oleh sebagian besar masyarakat di desa Kamulan. Peran dari pemerintah hendaknya harus lebih menjangkau lagi kebutuhan dari para pengusaha industri di Trenggalek pada umumnya dan di daerah sentra-sentra industri pada khususnya, seperti sentra industri di desa Kamulan.

4. Pengembangan upaya pemberdayaan itu sendiri terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan industri kecil. Faktor pendukung perkembangan industri kecil itu berupa bahan baku yang berkualitas dan kualitas produksi yang ditingkatkan. Bahan baku yang mudah di dapat dan berkualitas menjadi syarat utama untuk produksi genteng yang berkualitas, selain itu pada industri dupa bahan baku juga berasal dari tepung berkualitas di china. Faktor penghambat dari proses perkembangan industri ini adalah sarana dan prasarana untuk proses kegiatan produksi yang belum maksimal, seperti peralatan yang masih tradisional dalam proses kegiatan produksi, dan dibutuhkan teknologi yang lebih modern untuk menunjang perkembangan industri di desa Kamulan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang disajikan maka penulis memberikan saran-saran yang diharapkan mampu memberikan masukan dalam pengembangan industri kecil di Trenggalek pada umumnya dan industri yang ada di desa Kamulan pada khususnya.

1. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya dengan lebih mengenal kondisi dan kultur masyarakatnya, juga lebih dekat dengan masyarakat terutama para pengusaha industri kecil, dan dilakukan secara rutin serta berkelanjutan untuk memperoleh hasil dari pemberdayaan yang optimal.

2. Hendaknya dilakukan penyuluhan dan pembinaan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan yang menjadi kendala bagi perkembangan industri kecil pada umumnya dan industri di desa Kamulan pada khususnya, sehingga pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan keadaan para pelaku industri kecil.
3. Pemerintah daerah harus lebih memberikan pendampingan dan penyuluhan di lapangan untuk mendata kondisi riil yang ada di lapangan sehingga setiap muncul persoalan atau kebutuhan yang diperlukan oleh para pelaku industri secara umum dan industri di Kamulan secara khusus bisa langsung ditanggapi dan diberikan solusi secara maksimal.
4. Pemerintah harus lebih tanggap untuk bisa menjawab problem dari masyarakat pelaku industri serta respon terhadap kebutuhan yang coba diutarakan oleh pelaku industri pada umumnya, dan industri di Kamulan secara khususnya.
5. Koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa diperlukan untuk bisa memberikan alternatif terbaik bagi kelangsungan perkembangan industri kecil serta dapat memberikan penyelesaian secara optimal terhadap permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil di desa Kamulan.
6. Program bantuan yang dicanangkan oleh pemerintah hendaknya harus sudah diketahui oleh para pelaku industri kecil, dimana informasi dari

program pemerintah harus tepat sasaran, karena sebagian besar pengusaha industri kecil tidak mengetahui program bantuan dari pemerintah terutama seperti bantuan modal dan teknologi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Bakri, Masykuri. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan RRA dan PRA*. Surabaya: Visipress Media.
- Bappeda. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025*. Diakses (02 Desember 2013).
- BPS. 2013. *Electronic Book: Statistik Daerah Kabupaten Trenggalek 2013*. Diakses melalui <http://trenggalekkab.bps.go.id/index.php> (02 Desember 2013).
- Budiyanto. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Airlangga.
- Fitriyah. 2002. "Demokratisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Dalam Teguh Yuwono (ed.). *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Puskodak UNDIP.
- Hanafi, Imam dan Imam Hardjanto. 2006. *Entrepreneurship Kewirausahaan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ife, Frank Tesoriero Jim. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Edisi ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irianto, Jusuf. 1996. *Industri Kecil Dalam Perspektif Pembinaan dan Pengembangan*. Surabaya: Airlangga university Press.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Power Dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan*. Jurnal. Diakses melalui <http://www.ginandjar.com> (18 Desember 2013).

- Kartasasmita, Ginandjar. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*. Jurnal. Diakses melalui <http://www.ginandjar.com> (18 Desember 2013).
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KECIL: Kesempatan dan Tantangan dalam Proses Transformasi Global dan Nasional*. Jurnal. Diakses melalui <http://www.ginandjar.com> (18 Desember 2013).
- Kesi, Widjajanti. 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal. Diakses <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/> (23 Desember 2013).
- Kristanto, Philip. 2002. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kuncoro, Mudrajat. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Marpaung, Happy. 1994. *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Perindustrian Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.
- Muluk, M.R.K. 2005. *Reorientasi Pengembangan Aparatur Daerah*. Malang: FIA UNIBRAW.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Mattaram: BAPPEDA Propinsi NTB.
- Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Saleh, Irsyan Ansyhari. 1986. *Industri Kecil Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Suryono, Agus. Dan Trilaksono Nugroho. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Syaifudin, Hetifah. 1995. *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*. Bandung: Yayasan Akgita.

Syarif, Syahrial. 1991. *Industri dan Kesempatan Kerja*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.

Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia "Beberapa Isu Penting"*. Jakarta: PT. Salemba Empat.

Thoha, Miftah. 1993. *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: Rajawali Press.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

[www.trenggalekkab.go.id](http://www.trenggalekkab.go.id) (website pemerintah kabupaten trenggalek).

[www.koperindagtamben-trenggalek.com](http://www.koperindagtamben-trenggalek.com) (website dinas koperasi, perindustrian, perdagangan, tambang dan energi kabupaten trenggalek).

Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.



# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
 Jln. HOS. Cokroaminoto No. 1 Telp. (0355) 796547  
 T R E N G G A L E K Kode Pos. 66316

Trenggalek, 1 November 2013

Kepada :  
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Koperindagtamben Kab. Trenggalek  
 di  
**TRENGGALEK**

**SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/KKN/KKL/PPL/PSG/PRAKERIN**

Nomor : 072/ 1130 /406.043/2013

MEMBACA	: Surat dari Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya nomor: 12693/UN10.3/PG/2013 tanggal 30 Oktober 2013.
NAMA PENANGGUNG JAWAB	: Dr. Choirul Saleh, M.Si
TEMA/SURVEY/KKN/PPL/PSG	: Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Lokal (Studi Pada Desa Kamulan, Kabupaten Trenggalek).
TUJUAN	: Penelitian awal guna penyusunan proposal riset.
LAMANYA SURVEY/KKN/KKL/PPL/PSG	: 1 s/d 8 November 2013
TEMPAT DILAKUKAN SURVEY/KKN/KKL/PPL/PSG	: Dinas Koperindagtamben Kab. Trenggalek
PENGIKUT/PESERTA SURVEY/KKN/KKL/PPL/PSG	: <b>TEDJA BAGUS SULAKSANA</b>
ALAMAT	: RT. 011/ RW. 004 Desa Gayam Kec. Panggul
LAIN-LAIN	: 1. Wajib mentaati segala peraturan setempat dimana yang bersangkutan mengadakan kegiatan. 2. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana/ proposal yang telah diajukan. 3. Selesai melakukan kegiatan, melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Bupati Trenggalek melalui Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Trenggalek. 4. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

a. n. KEPALA KANTOR KESBANGPOLLINMAS  
 KABUPATEN TRENGGALEK  
 Kasi Bina Ideologi dan Politik



**DARSONO**

Penata

NIP. 196010151985081002

Tembusan Disampaikan Kepada :  
 Yth. 1. Sdr. Dekan FIA, Unibraw,  
 2. Sdr. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
 Jln. HOS. Cokroaminoto No. 1 Telp. (0355) 796547  
 T R E N G G A L E K Kode Pos. 66316

Trenggalek, 27 Februari 2014

Kepada :  
 Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Koperindagtamben Kab. Trenggalek;  
 2. Camat Durenan  
 di

TRENGGALEK

**SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/KKN/KKL/PPL/PSG/PRAKERIN**

Nomor : 072/227 /406.043/2014

- MEMBACA : Surat dari Fakultas Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya Malang Nomor : 891/UN10.3/PG/2014 tanggal 22 Januari 2014
- NAMA PENANGGUNG JAWAB : Dr. CHOIRUL SALEH, M. Si
- TEMA/ACARA SURVEY/KKN/PPL/PSG : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Lokal (Studi Kasus Pada Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)
- TUJUAN : Penelitian guna penyusunan Skripsi
- LAMANYA SURVEY/KKN/KKL/PPL/PSG : 27 Februari s/d 28 April 2014
- TEMPAT DILAKUKAN SURVEY/KKN/KKL/PPL/PSG : Dinas Koperindagtamben Kab. Trenggalek dan Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek
- PENGIKUT/PESERTA SURVEY/KKN/KKL/PPL/PSG : TEDJA BAGUS SULAKSANA
- ALAMAT : RT. 011/ RW. 004 Ds. Gayam Kec. Panggul Kab. Trenggalek
- LAIN-LAIN :
  1. Wajib mentaati segala peraturan setempat dimana yang bersangkutan mengadakan kegiatan.
  2. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana/ proposal yang telah diajukan.
  3. Selesai melakukan kegiatan, melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Bupati Trenggalek melalui Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Trenggalek.
  4. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

a.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS  
 KABUPATEN TRENGGALEK  
 Kasi Linmas



MARYANI, S. Sos

Penata

NIP. 196004101002021002

Tembusan Disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya;
- 2. Sdr. Yano bersangkutan

**Wawancara untuk instansi Dinas (Lembaga Pengelola,  
DISKOPERINDAGTAMBE)**

1. Bagaimanalah gambaran industri kecil yang ada di kabupaten trenggalek?
2. Potensi usaha industri kecil apa sajakah yang ada di kabupaten trenggalek?
3. Peran yang dilakukan pemreintah kabupaten trenggalek dalam pemberdayaan industry kecil di trenggalek?
- f. Peran Pemerintah sebagai fasilitator, meliputi:
  - Segi Pendanaan; program/bantuannya seperti apa?
  - Segi Teknologi/ teknik produksi; program/bantuannya seperti apa?
  - Hibah/Bantuan Langsung?
  - Pemasaran; program/bantuannya seperti apa?
  - Pendidikan dan Pelatihan; program/bantuannya seperti apa?
  - Perijinan yang mudh atau sulit?
- g. Setelah diberdayakan, bagaimana keberdayaan Industri Lokal itu, dilihat dari:
  - Jenis Industri yang berkembang;
  - Ijin;
  - Pasar;
  - SDM.
4. Dampak penyediaan infrastruktur yang ada bagi industry kecil di kabupaten trenggalek..??
5. Faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan industri kecil ?
  - Factor pendukung
  - Factor penghambat/kendala

**Wawancara Untuk Pengusaha Industri**

Nama : .....

Alamat : .....

Nama Usaha : .....

Tahun Berdiri : .....

Jumlah Karyawan : .....

No	Uraian			Keterangan
		Pertanyaan	Ya	
1	Pernah mendapat bantuan dari pemerintah setempat (bantuan hibah/peralatan)			
2	Pernah memperoleh pinjaman / perkreditan (dana lunak/bank)			
3	Pernah mendapat pembinaan / pelatihan / penyuluhan dari pemerintah.			
4	Pernah mendapat pelatihan Teknik / manajemen pemasaran			
5	Pernah mengurus perijinan (jenis perijinan / lamanya)			
6	Manfaat layanan infrastruktur yang ada seperti alat-alat transportasi, komunikasi (telepon), jalan raya, listrik dan			



	air terhadap industry.		
7	Keuntungan / laba bersih yang diperoleh per tahun		
8	Kemampuan produksi maksimal per bulan/per tahun		
9	Hambatan/kendala yang sering dihadapi (segi produksi, teknologi, dana, kemampuan SDM dan segi pemasaran)		
10	Factor pendukung yang dapat menunjang kemajuan industry		
11	Usaha apa yang telah diupayakan untuk menunjang perkembangan industry		



FOTO – FOTO



Produk Hasil Industri Dupa



Produk Dupa yang Dikemas





Mesin Pembuat Dupa



Mesin Pembuat Dupa dan Bahan Baku



Mesin Press Pembuat Genteng



Mesin Press dan Bahan Baku Genteng





Produk Hasil Industri Genteng yang Sedang dijemur



Genteng yang sudah Kering

**CURRICULUM VITAE**

- Nama : Tedja Bagus Sulaksana
- Tempat, dan tanggal lahir : Trenggalek, 27 November 1992
- Agama : Islam
- Alamat Rumah : RT/RW 11/04 Desa Gayam Kec. Panggul, Kabupaten Trenggalek
- Alamat di Malang : Jl. Sudimoro No.4 Malang
- Riwayat Pendidikan : 1. SDN Gayam, Pangul 2004
2. SMP Negeri 1 Panggul-Trenggalek 2007
3. SMA Negeri 1 Trenggalek 2010
4. Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya 2010

